



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
MASTER PLAN SMART CITY TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan *smart city* merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan inovatif dengan mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan;
- b. bahwa Kabupaten Tangerang sebagai salah satu wilayah strategis dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi yang pesat memerlukan pengelolaan sumber daya dan infrastruktur yang berbasis inovasi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing;
- c. bahwa untuk mewujudkan transformasi menuju *smart city*, diperlukan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program pembangunan berbasis teknologi yang terintegrasi di Kabupaten Tangerang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Master Plan Smart City* Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTER PLAN SMART CITY* TAHUN 2025-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. *Smart City* adalah kota cerdas yang mengembangkan dan mengelola kota dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
6. *Master Plan Smart City* adalah dokumen perencanaan pengembangan *Smart City* di Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya *Master Plan Smart City* sebagai pedoman perencanaan pembangunan dan pengembangan *Smart City* di Daerah.

(2) Tujuan...

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini:
- a. sebagai dasar, acuan, dan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan *Smart City* di Daerah;
 - b. sebagai alat pengendali terhadap seluruh kegiatan untuk mendukung *Smart City* di Daerah;
 - c. sebagai dasar yang dijadikan pedoman pemilihan keputusan dan penetapan kebijakan dalam pembangunan *Smart City* di Daerah;
 - d. untuk menyelaraskan penerapan *Smart City* di Daerah dengan *business process* Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, lembaga terkait, serta dapat berakselerasi dalam percepatan transformasi birokrasi;
 - e. untuk menetapkan perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan 6 (enam) dimensi *Smart City* yaitu *smart governance, smart economy, smart society, smart branding, smart living, dan smart environment*;
 - f. untuk menjamin sinkronisasi sasaran pembangunan di dalam rencana pembangunan daerah dan rencana strategis dengan dokumen perencanaan *Smart City* di Daerah; dan
 - g. untuk mendorong proses pengembangan *Smart City* yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

BAB II MASTER PLAN SMART CITY

Pasal 3

- (1) Dokumen *Master Plan Smart City* meliputi identifikasi pencapaian program kerja yang telah disusun oleh Perangkat Daerah.
- (2) Identifikasi pencapaian program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menilai ketercapaian, hambatan, dan inisiatif perbaikan serta relevansinya dengan visi dan misi dalam rencana pembangunan daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) *Master Plan Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
 - a. buku I berisi tentang analisis dan strategi *Smart City*;
 - b. buku II berisi tentang rencana aksi dan *quick win Smart City*; dan
 - c. buku III berisi tentang peta jalan *Smart City*.
- (2) Rincian *Master Plan Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5...

BAB III ELEMEN SMART CITY

Pasal 5

Konsep *Smart City* yang dikembangkan dalam Dokumen *master plan* terdiri dari 6 (enam) elemen *Smart City* meliputi:

- a. tata kelola pemerintahan pintar (*smart governance*);
- b. branding daerah pintar (*smart branding*);
- c. ekonomi pintar (*smart economy*);
- d. hidup pintar (*smart living*);
- e. masyarakat pintar (*smart society*); dan
- f. lingkungan pintar (*smart environment*).

BAB IV RENCANA AKSI SMART CITY

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan dan pengembangan *Smart City* di Daerah dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan dan pengembangan *Smart City* di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan melibatkan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Elemen *Smart City* dijabarkan dalam rencana aksi yang akan dilaksanakan setiap tahun dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaksanaan rencana aksi menuju *Smart City* Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Dokumen Pengembangan *Master Plan Smart City* Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap Perangkat Daerah atas pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan *Smart City* Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika melakukan pendampingan dan evaluasi atas pelaksanaan program pembangunan *Smart City* Daerah dan melaporkan kepada Bupati.

BAB VI...

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Pendanaan dalam pelaksanaan program *Smart City* dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 10 Juni 2025

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

SOMA ATMAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BENI RACHMAT, S.H.
NIP. 197012071998031005



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
MASTER PLAN SMART CITY TAHUN 2025-2026

RINCIAN *MASTER PLAN SMART CITY* TAHUN 2025-2026

1

Masterplan Smart City Kabupaten Tangerang



2025-2026

**“Kabupaten Tangerang Berdaya
Saing Menuju Masyarakat Madani”**



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tangerang**

KEYNOTE SPEECH BUPATI TANGERANG

Dalam pengembangan Buku 1 Masterplan Smart City Kabupaten Tangerang 2024-2026, kami menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap konsep Smart City di era teknologi informasi dan komunikasi yang tengah berkembang. Konsep ini tidak hanya relevan, melainkan juga mendesak untuk membawa Kabupaten Tangerang ke tingkat pelayanan publik, efisiensi, dan inovasi yang lebih unggul. Saat kita berada di ambang era teknologi informasi dan komunikasi, tekad kami adalah menjadi lebih tangkas, lebih cerdas, dan lebih adaptif dalam melayani masyarakat kami.

Tidak lagi cukup hanya menjadi penonton dalam kompetisi ini. Presiden Jokowi dengan tegas mengingatkan kita bahwa kecepatan dalam memberikan layanan akan menjadi penentu utama dalam perbandingan antarnegara. Oleh karena itu, kami menyadari bahwa inilah saatnya untuk berubah, berinovasi, dan mengambil peran aktif dalam perubahan yang kami idamkan.

Gerakan Mewujudkan 100 Smart City menjadi pintu gerbang bagi Kabupaten Tangerang untuk meraih potensi yang lebih besar dan lebih cerah. Dalam perumusan visi, strategi, dan prioritas Smart City kami dalam Buku 1 Masterplan, fokus utama kami adalah pada pemecahan masalah yang mendesak dan pengembangan sektor unggulan.

Kami percaya bahwa perubahan ini tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga melibatkan penciptaan masyarakat yang cerdas, terkoneksi, dan berdaya saing. Oleh karena itu, kami akan bersama-sama membangun Smart People dan Smart Society. Dengan semangat perubahan ini, dalam Buku 1 Masterplan Smart City, kami akan membentuk Dewan Smart City dan Tim Pelaksana untuk meraih cita-cita ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut berperan aktif dalam penyusunan Buku 1 Masterplan Smart City. Inisiatif ini, sebagaimana tercantum dalam Buku 1 Masterplan, akan menjadi panduan utama dalam perjalanan kami untuk mencapai visi dan misi pembangunan yang berkelanjutan. Kami yakin, dengan membangun Smart City, Kabupaten Tangerang akan menjadi daerah yang tak hanya berdaya saing tinggi, tetapi juga tempat yang kaya dengan inovasi dan pelayanan publik yang cerdas.

Mari bersama-sama, kita akan menciptakan masa depan yang cerah, nyaman, dan menyenangkan untuk dihuni. Mari bergerak maju, berubah, dan berkarya untuk Kabupaten Tangerang yang lebih baik.

DAFTAR ISI

KEYNOTE SPECH BUPATI TANGERANG	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I ANALISIS MASA DEPAN	1
1.1 Sejarah Kabupaten Tangerang	1
1.2 Kondisi Geografis dan Demografi Kabupaten Tangerang	1
1.3 Potensi Perekonomian Kabupaten Tangerang	3
1.4 Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang	5
1.5 Keberlanjutan Pembangunan berlandaskan Agenda Sustainable Development Goals (SDG's).....	7
1.6 Teknologi Masa Depan Mendorong Smart City	14
BAB II ANALISIS KESIAPAN KABUPATEN TANGERANG	16
2.1 Analisis Kesiapan Struktur Kabupaten Tangerang	16
2.2 Analisis Kesiapan Infrastruktur Kabupaten Tangerang	19
2.3 Analisis Kesiapan Suprastruktur Kabupaten Tangerang	21
BAB III ANALISIS KESENJANGAN KABUPATEN TANGERANG	29
Matriks Analisa Kesenjangan Smart Governance	30
Matriks Analisa Kesenjangan Smart Branding	34
Matriks Analisa Kesenjangan Smart Economy	37
Matriks Analisa Kesenjangan Smart Living	41
Matriks Analisa Kesenjangan Smart Society	45
Matriks Analisa Kesenjangan Smart Environment	49
BAB IV ANALISIS VISI SMART CITY KABUPATEN TANGERANG	53
4.1 Analisis Visi Pembangunan Daerah	53
4.2 Sasaran Tangerang Smart City	54

BAB I

ANALISIS MASA DEPAN

1.1 Sejarah Kabupaten Tangerang

Wilayah Kabupaten Tangerang adalah bagian dari Provinsi Banten, yang terdiri dari 8 kabupaten dan kota. Banten menjadi provinsi tersendiri setelah dipisahkan dari Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Keputusan ini diambil dalam sebuah rapat paripurna di DPR RI pada tanggal 4 Oktober 2000, dan Provinsi Banten secara resmi dibentuk pada tanggal 18 November 2000.

Sejarah Kabupaten Tangerang jauh lebih tua daripada pembentukan Provinsi Banten. Kabupaten ini merujuk pada masa lalu yang erat kaitannya dengan Kesultanan Banten, yang pada suatu waktu mengirim tiga tokoh berpangkat Tumenggung, yakni Tumenggung Aria Yudhanegara, Aria Wangsakara, dan Aria Jaya Santika, untuk mendirikan sebuah komunitas pertahanan di wilayah perbatasan dengan Batavia. Ketiga Tumenggung ini mendirikan pusat pertahanan dan pemerintahan yang saat ini dikenal sebagai Kawasan Tigaraksa, yang kini menjadi Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang. Legenda rakyat menceritakan bahwa asal usul Kabupaten Tangerang bermula dari Tigaraksa.

Nama "Tigaraksa" merupakan lambang yang mengandung makna mendalam, yaitu "Tiang Tiga" atau "Tilu Tanglu," yang mencerminkan rasa hormat terhadap tiga Tumenggung yang mengawasi wilayah tersebut pada masa lampau. Asal-usul kata "Tangerang" bermula dari inisiatif seorang anak Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten, yang mendirikan sebuah monumen peringatan di sebelah barat Sungai Cisadane, yang kini kita kenal sebagai Kampung Gerendeng. Monumen ini, yang dikerjakan oleh Pangeran Soegri, diberi nama "Tangerang," yang dalam bahasa Sunda mengartikan "tanda" atau "penanda." Nama "Tangerang" ini kemudian secara perlahan bermetamorfosis menjadi sebutan yang dikenal saat ini.

Kisah berlanjut dengan berakhirnya pemerintahan "Tiga Maulana," "Tiga Pemimpinan," atau "Tilu Tanglu" pada tahun 1684, saat tercapainya sebuah perjanjian antara Pasukan Belanda dan Kesultanan Banten pada tanggal 17 April 1684. Kesepakatan ini menyebabkan seluruh wilayah Tangerang beralih ke dalam penguasaan Belanda.

Pada saat yang bersamaan, Atik Soardi, yang menjabat sebagai asisten Wakil Kepala Pemerintahan Provinsi Jawa Barat bersama Raden Pandu Suradiningrat, diangkat menjadi Bupati Tangerang pada periode 1943-1944. Selama masa kepemimpinan Bupati Kabupaten Tangerang ini, bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, H. Tadjus Sobirin (1983-1988 dan 1988-1993), menetapkan tanggal 27 Desember 1943 sebagai hari berdirinya Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1984 tanggal 25 Oktober 1984. Selanjutnya, dengan pembentukan wilayah baru dan pembentukan pemerintahan Kota Tangerang pada tanggal 28 Februari 1993 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993, pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang dipindahkan ke Tigaraksa. Perpindahan ini juga menjadi bagian penting dari sejarah Tigaraksa.

1.2 Kondisi Geografis dan Demografi Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang terletak di bagian timur Provinsi Banten dan memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Wilayah ini berdekatan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat. Secara transportasi, Kabupaten Tangerang dilintasi oleh Jalan Raya Serang-Jakarta, Jalan Tol Merak-Jakarta, serta jalur ganda Kereta Api Jakarta-Rangkas Bitung. Selain itu,

terdapat akses alternatif ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Wilayah ini membutuhkan akses yang cepat untuk mendukung pertumbuhan industri dan perdagangan. Oleh karena itu, dibutuhkan kawasan pergudangan dan industri yang memudahkan distribusi produk. Keberadaan pelabuhan dan bandara menjadi kunci penting dalam memenuhi kebutuhan ini. Di samping itu, sektor properti juga mengalami perkembangan pesat, terutama di sekitar Bandara Soekarno-Hatta, seperti di daerah Cisauk dan Pagedangan. Hal ini menandakan kebutuhan akan lahan yang luas untuk pemukiman warga yang bekerja di Jakarta dan Tangerang.

Kabupaten Tangerang terletak di bagian Timur Provinsi Banten pada koordinat 106°20'-106°44' Bujur Timur dan 5°58'-6°21' Lintang Selatan. Luas Kabupaten Tangerang adalah 959.6 Km². Kabupaten Tangerang termasuk salah satu daerah yang menjadi bagian dari wilayah Provinsi Banten. Terletak pada posisi geografis cukup strategis dengan batas-batas.

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan DKI Jakarta
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Lebak
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak

Jarak antara Kabupaten Tangerang dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) sekitar 30 km, keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan Jakarta-Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Kabupaten Tangerang mempunyai garis pantai sepanjang kurang lebih 50 km, terdiri dari 29 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 246 desa dan 28 kelurahan.

Tabel 1.1 Luas Wilayah dan Presentase menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Km ²	Presentase (%)
1	Cisoka	29.98	3.12
2	Solear	29.01	3.02
3	Tigaraksa	48.74	5.08
4	Jambe	26.02	2.71
5	Cikupa	42.68	4.45
6	Panongan	34.93	3.64
7	Curug	27.41	2.86
8	Kelapa Dua	24.38	2.54
9	Legok	35.13	3.66
10	Pagedangan	45.69	4.76
11	Cisauk	27.77	2.89
12	Pasar Kemis	25.92	2.70
13	Sindang Jaya	37.15	3.87
14	Balaraja	33.56	3.50
15	Jayanti	23.89	2.49
16	Sukamulya	26.94	2.81
17	Kresek	25.97	2.71
18	Gunung Kaler	29.63	3.09
19	Kronjo	44.23	4.61

20	Mekar Baru	23.82	2.48
21	Mauk	51.42	5.36
22	Kemiri	32.7	3.41
23	Sukadiri	24.14	2.52
24	Rajeg	53.7	5.60
25	Sepatan	17.32	1.80
26	Sepatan Timur	18.27	1.90
27	Pakuhaji	51.87	5.41
28	Teluknaga	40.58	4.23
29	Kosambi	29.76	3.10
	Total	959.61	100

Dengan posisinya yang berbatasan dengan DKI Jakarta menjadi salah satu potensi Kabupaten Tangerang untuk berkembang menjadi daerah penyangga Ibukota Jakarta. Secara geografis Kabupaten Tangerang berada diantara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta, sehingga Kabupaten Tangerang merupakan pintu gerbang di perbatasan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta. Posisi ini menimbulkan interaksi yang menumbuhkan saling ketergantungan yang kemudian berdampak pada timbulnya pertumbuhan pada suatu wilayah melalui proses *trickle down effect* dan *backwash effect*.

Kabupaten Tangerang merupakan daerah dengan wilayah terluas di Provinsi Banten yang perkembangan pembangunannya tergolong cepat dengan tersedianya infrastruktur, pusat perbelanjaan, pertokoan dan pasar, serta pembangunan perumahan di kawasan baru dan prasarana lainnya sebagai pendukung. Dalam era otonomi daerah, pembangunan diarahkan kepada tercapainya tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

1.3 Potensi Perekonomian Kabupaten Tangerang

Di tahun 2022, PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku (nominal) sebesar 160.168,18 miliar rupiah, sedangkan pada tahun yang sama. PDRB atas dasar harga konstan (PDB riil) adalah sebesar 103.221,02 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 5,47 persen dari tahun sebelumnya yang nilainya 97.869,38 miliar rupiah. Kondisi tersebut mulai menunjukkan peningkatan setelah tahun 2021 yang merupakan fase pemulihan ekonomi PDRB Kabupaten Tangerang baik ADHB maupun ADK terganggu. Pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Tangerang menurut PDRB harga konstan relatif sedikit berfluktuasi sejak tahun 2016. Pada tahun 2016 sebesar 5,41%. tahun 2017 meningkat menjadi 5,82% yang merupakan titik tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi turun tipis menjadi 5,80% dan kembali menurun di tahun 2019 mencapai 5,56%.

Perekonomian Kabupaten Tangerang tahun 2022 mengalami kenaikan setelah pandemic Covid-19 yang tadinya mengalami kontraksi di tahun 2020 sekitar 3,76%. tumbuh positif di tahun 2021 menjadi 4,70%. upaya pemulihan ekonomi baik nasional dan daerah berdampak kepada laju pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Tangerang di tahun 2022 yang mencapai 5,47%. angka tersebut berada di atas angka nasional, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang tahun 2022 merupakan angka tertinggi selama dua tahun terakhir (2020-2021).

Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,34% dan sektor lapangan usaha konstruksi sebesar 8,25%. Dari 17 sektor

lapangan usaha yang ada sebanyak 2 sektor lapangan mengalami penurunan yaitu sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta sektor lapangan usaha jasa Pendidikan.

Tabel 1.2 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Kategori Lapangan Usaha (persen) 2018-2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*	2022*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,98	2,25	2,84	(0,84)	2,28
B	Pertambangan dan Penggalian	5,72	2,30	(5,90)	(9,45)	(12,20)
C	Industri Pengolahan	2,66	3,20	(8,74)	4,26	5,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,82	(4,23)	(12,35)	11,69	5,56
Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*	2022*
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,19	6,71	8,60	5,81	1,36
F	Konstruksi	8,18	9,44	(3,29)	11,96	8,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,69	6,22	(3,70)	1,82	3,27
H	Transportasi dan Pergudangan	9,60	9,55	(5,32)	9,90	7,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,62	7,86	(5,63)	4,45	8,34
J	Informasi dan Komunikasi	8,35	9,69	9,12	5,17	6,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,16	0,72	1,56	6,07	6,81
L	Real Estat	9,44	9,49	1,96	3,07	5,19
M,N	Jasa Perusahaan	6,02	9,20	(6,00)	(2,25)	4,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,48	8,75	(0,38)	(0,76)	1,09
P	Jasa Pendidikan	8,25	8,30	0,62	(1,10)	(0,02)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,68	11,13	4,41	9,14	2,94
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,69	9,36	(6,11)	1,39	7,77
Total	5,80	5,56	(3,76)	4,70	5,47	

Keterangan :

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber : Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2022

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Berdasarkan pemantauan Badan Pusat Statistik terhadap 416 jenis barang dan jasa serta hasil Survei Biaya Hidup (SBH) di Kota Serang, Tangerang dan Cilegon baik secara mingguan, dua mingguan maupun bulanan. Angka inflasi disajikan dalam tabel 1.3.

Tabel 1.3 Perkembangan Inflasi di Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2018-2022

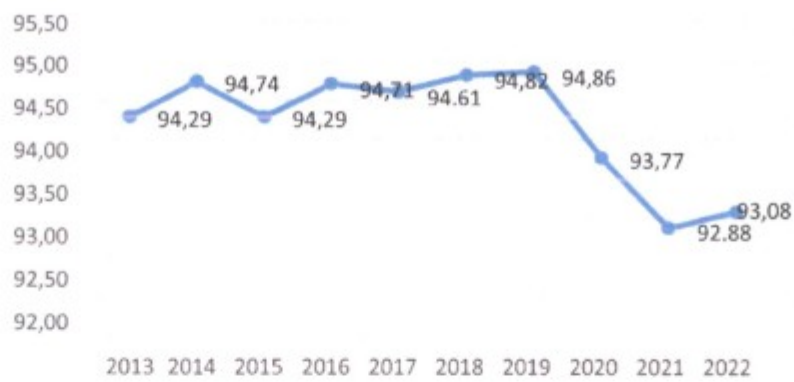
inflasi YoY (%)	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Tangerang	3,46	3,31	1,17	1,81	4,56
Kota Serang	3,78	3,06	1,89	2,23	7,22
Kota Cilegon	2,73	3,54	2,59	2,19	5,86
Provinsi Banten	3,42	3,30	1,45	1,51	5,08
Nasional	3,13	3,13	1,68	1,87	5,51

Sumber: Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Provinsi Banten, 2015 – 2022 (Inflasi Kota Tangerang)

Inflasi Kabupaten Kabupaten Tangerang sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Tangerang, hal tersebut karena Kabupaten Tangerang belum dipilih oleh BPS RI sebagai acuan penghitungan inflasi pada kota-kota di Indonesia. Pada periode tahun 2015-2022, laju inflasi di Kabupaten Tangerang sekitar 4,56% tahun 2022. Inflasi di Tangerang terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks 11 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok transportasi sebesar 18,80 persen. Kenaikan pada transportasi merupakan dampak secara nasional pemerintah menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) pada September 2022.

1.4 Pembangunan Manusia Kabupaten Tangerang

Kemiskinan didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemiskinan absolut yang mana pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada satu garis yang disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan ini terdiri dari 2 komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian Pemerintah Daerah. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2013- 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.1 Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022
Sumber: BPS RI. Diolah

Dari gambar grafik diatas dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan terhadap persentase penduduk diatas garis kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019 capaian Penduduk di atas garis kemiskinan adalah sebesar 94,86%. kemudian capaian ini pada tahun 2020 menjadi 93,77% dan kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 92,88%. Capaian ini kemudian kembali meningkat di tahun 2022 mencapai 93,08%.

Selain itu, terdapat berbagai tolak ukur yang dapat digunakan dalam menghitung tingkat pemerataan pendapatan, antara lain Kurva Conrad Lorenz, Corrado Gini Coefficient, Kuznets Index, Oshima Index dan Theil Decomposition Index. Namun yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah Gini Coefficient atau lebih dikenal dengan nama Gini Ratio (GR). Gini Ratio dibagi atas tiga level. Level pertama. menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah, yaitu berada pada kisaran 0 sampai 0,3. Level kedua ketimpangan menengah yaitu antara 0,3 hingga 0,5. Level ketiga ketimpangan tinggi yaitu berada di atas 0,5. Gini Ratio (GR) Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada gambar 1.2



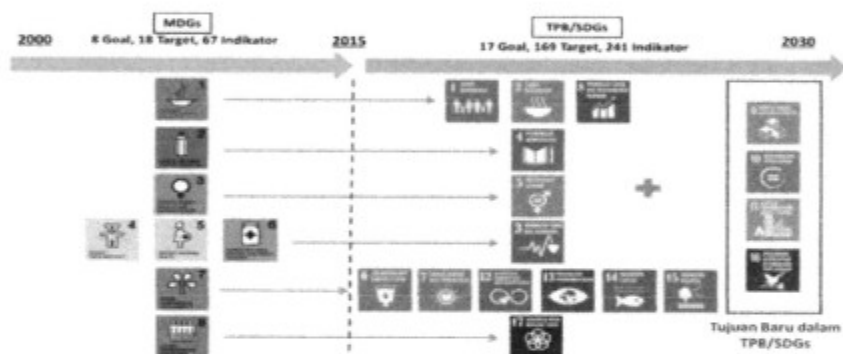
Gambar 1.2 Gini Rasio Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2022, diolah

Gini Rasio Kabupaten Tangerang tahun 2022 sebesar 0,282 angka ini menurun dibandingkan dengan Gini Ratio 2021 yang sebesar 0,294. Ini menandakan level ketimpangan Pendapatan penduduk di Kabupaten Tangerang masih tergolong pada level rendah.

1.5 Keberlanjutan Pembangunan berlandaskan Agenda Sustainable Development Goals (SDG's)

Pasca MDG's dilaksanakan agenda pembangunan multidimensi 2030 yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs) atau agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDG's merupakan rencana aksi global untuk mewujudkan kemakmuran bersama, perdamaian, dan penghargaan pada kebebasan. 193 kepala Negara dan pemerintahan, termasuk Indonesia mendatangi agenda ini dalam Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung di New York, 25 September 2015 yang lalu.

Program PBB berskala global ini merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals - MDG's. Program tersebut diluncurkan melihat kemiskinan dengan berbagai dimensinya yang ekstrem masih terjadi di berbagai belah dunia. Kemiskinan ekstrem adalah tantangan global yang paling besar untuk diselesaikan bersama. Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2015- 2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) 2000- 2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali.



Gambar 1.3 Perubahan Millennium Development Goals (MDG's) ke Sustainable Development Goals atau (SDGs)

SDGs menegaskan pentingnya upaya mengakhiri kemiskinan agar dilakukan bersama dengan upaya strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menerapkan langkah kebijakan sosial untuk memenuhi aneka kebutuhan sosial (seperti pendidikan, kesehatan, proteksi sosial, kesempatan kerja), dan langkah kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim dan proteksi lingkungan.

Berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan, SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target yang meliputi berbagai isu pembangunan berkelanjutan, 17 tujuan global tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Tanpa Kemiskinan (No Poverty)
Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di setiap tempat.
2. Tanpa Kelaparan (Zero Hunger)
Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan gizi, dan meningkatkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (Good Health and Well-being)
Menjamin hidup yang sehat dan meningkatkan kesehatan /kesejahteraan bagi semua pada semua usia.
4. Pendidikan Berkualitas (Quality Education)
Menjamin pendidikan yang berkualitas, inklusif dan adil, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.
5. Kesetaraan Gender (Gender Equality)

- Menjamin kesetaraan gender, serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi (Clean Water and Sanitation)
Menjamin ketersediaan, dan pengelolaan air bersih, serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.
 7. Energi Bersih dan Terjangkau (Affordable and Clean Energy)
Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau (terbeli), andal, berkelanjutan, dan modern, bagi semua orang.
 8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (Decent Work and Economic Growth)
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif; partisipasi penuh dalam pekerjaan yang produktif, jenis pekerjaan yang layak bagi semua orang.
 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (Industry, Innovation and Infrastructure)
Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong industrialisasi yang inklusif, dan berkelanjutan serta membina inovasi.
 10. Mengurangi Kesenjangan (Reduced Inequalities)
Mengurangi ketidaksetaraan di dalam, dan di antar negara.
 11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas (Sustainable Cities and Communities)
Menjadikan kota, dan pemukiman manusia inklusif, aman, dan berkelanjutan.
 12. Konsumsi dan Produksi Bertanggungjawab (Responsible Consumption and Production)
Menjamin pola produksi, dan konsumsi yang berkelanjutan.
 13. Aksi terhadap Iklim (Climate Action)
Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim, serta dampaknya.
 14. Kehidupan Bawah Laut (Life Below Water)
Melindungi dan menggunakan lautan, laut, dan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan yang berkelanjutan.
 15. Kehidupan di Darat (Life on Land)
Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan penggunaan ekosistem bumi secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, menghentikan dan membalik degradasi (kerusakan) tanah, dan kehilangan biodiversitas (keragaman hayati).
 16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (Peace, Justice and Strong Institutions)
Menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, memberikan akses terhadap keadilan bagi semua, membangun lembaga yang efektif, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), dan inklusif, pada semua level
 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnership for the Goals)
Memperkuat implementasi, dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan prinsip no one left behind, Agenda 2030 mensyaratkan semua lapisan masyarakat tidak ada yang ditinggalkan dalam proses pembangunan yang inklusif dan partisipatif. Dengan 17 tujuan, 169 sasaran, dan lebih dari 234 indikator diharapkan memstimulasi aksi setiap Negara sepanjang lima belas tahun ke depan dalam pembangunan di setiap dimensi yang penting dalam kehidupan manusia dan lingkungan.



Gambar 1.4 Goals SDG's

Observasi informasi mengenai SDG's di Indonesia masih terlalu sedikit. Sementara itu, informasi yang terkandung di dalam SDGs ternyata terlampaui banyak dan tidak semua mudah dipahami. SDGs dapat dipahami dalam berbagai dimensi yang berbeda; (i) kronologinya dan prosesnya; (ii) tujuan dan targetnya dan di dalamnya skala perubahan yang diimpikannya; (iii) proses perundingannya; serta (iv) perbedaan dibandingkan pendahulunya, Millenium Development Goals

Proses perumusan SDGs berbeda sekali dengan MDGs. SDGs disusun melalui proses yang partisipatif, salah satunya melalui survei Myworld. Salah satu perubahan mendasar yang dibawa oleh SDGs adalah prinsip "tidak ada seorang pun yang ditinggalkan". SDGs juga mengandung prinsip yang menekankan kesetaraan antar- negara dan antar-warga negara. SDGs berlaku untuk semua (universal) negara-negara anggota PBB, baik negara maju, miskin, dan negara berkembang. SDGs dibangun secara partisipatif. PBB bekerja sama dengan beberapa lembaga mitranya telah menyelenggarakan survei warga, yang disebut sebagai Myworld Survey (<http://data.myworld2015.org/>).

Hasil survei hingga November tanggal 21 pukul 11.34 telah mengumpulkan sebanyak 8, 5 juta lebih suara (persisnya 8.583.717 untuk semua negara). Untuk seluruh dunia, empat prioritas menjadi usulan yaitu pendidikan yang bermutu, kesehatan yang lebih baik, kesempatan kerja lebih baik, dan tata pemerintahan yang jujur dan tanggap. Untuk Indonesia, telah terkumpul 38 ribu suara (persisnya 38.422 suara), dengan prioritas yang sedikit berbeda dengan prioritas global yaitu; pendidikan yang bermutu, kesehatan yang baik, tata pemerintahan yang jujur dan tanggap, serta kesempatan kerja yang lebih baik. Survei mengajak warga untuk memilih enam di antara 16 keadaan yang lebih baik untuk masa depan. Meksiko menjadi negara yang paling banyak menyumbang suara, dengan jumlah lebih dari 1,6 juta suara. Survei ini diadakan sejak 2013 hingga 2015, untuk menjadi masukan bagi Sekjen PBB dan para pemimpin dunia yang merumuskan dan mengesahkan SDGs pada September 2015.

MDGs – 2000–2015	SDGs – 2015–2030
<p>50 persen Target dan sasarnya adalah separuh: mengurangi separuh kemiskinan. Target yang terlalu minimal. Banyak negara telah terlebih dahulu mencapainya</p>	<p>100 persen Target dan sasarnya adalah semua, sepenuhnya dan tuntas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengakhiri kemiskinan • 100 persen penduduk memiliki akta kelahiran • memerlukan fokus, untuk merangkul mereka yang terpinggir dan terjauh.
<p>Dari negara maju, untuk negara berkembang MDGs mengandaikan bahwa negara miskin dan berkembang yang mempunyai pekerjaan rumah. Sementara itu negara maju mendukung dengan penyediaan dana.</p>	<p>Berlaku universal SDGs memandang semua negara memiliki pekerjaan rumah. Tiap-tiap negara wajib mengatasinya. Tiap-tiap negara harus bekerja sama untuk menemukan sumber pembiayaan dan perubahan kebijakan yang diperlukan.</p>
<p>Dari Atas (top down) Dokumen MDGs dirumuskan oleh para elite PBB dan OECD, di New York, tanpa melalui proses konsultasi atau pertemuan dan survei warga.</p>	<p>Dari Bawah (bottom up) dan partisipatif Dokumen SDGs dirumuskan oleh tim bersama, dengan pertemuan tatap muka di lebih dari 100 negara dan survei warga.</p>
<p>Solusi parsial atau tambal sulam 8 Tujuan MDGs sebagian besar hanya mengatasi gejala-gejala kemiskinan saja. Masalah ekologi dan lingkungan hidup tidak diakui. Ketimpangan tidak mendapatkan perhatian. Demikian halnya dengan soal pajak dan pembiayaan pembangunan.</p>	<p>Solusi yang menyeluruh Berisi 17 tujuan yang berupaya merombak struktur dan sistem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesetaraan gender • Tata pemerintahan • Perubahan model konsumsi dan produksi • Perubahan sistem perpajakan • Diakuihnya masalah ketimpangan • Diakuihnya masalah perkotaan

Gambar 1.5 Pokok Perbedaan MDG's dan SDG's

Pada tingkatan nasional, keselarasan SDG's dan prioritas pembangunan nasional telah dijabarkan dalam konvergensi dan divergensi antara SDG's dan Nawacita.

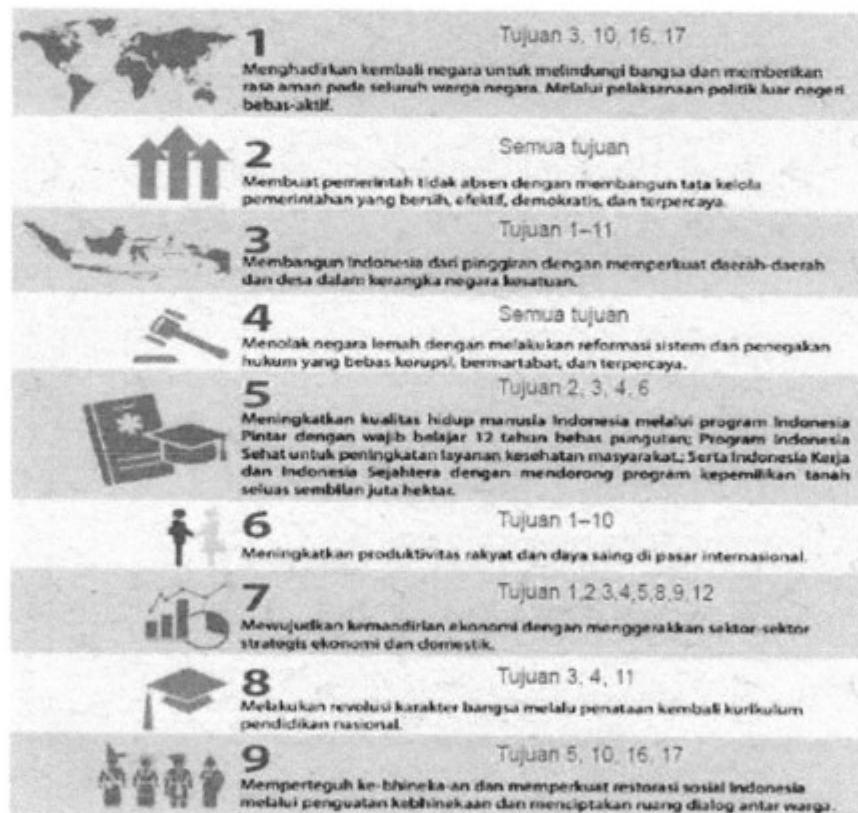
Dalam hal pembangunan manusia dan upaya penurunan ketimpangan, kedua dokumen selaras berjalan. Dalam hal pembangunan ekonomi, keduanya juga teman seiring. Namun, dalam hal keberlanjutan, ekologi dan konservasi lingkungan hidup, maka Nawacita dan RPJMN harus melakukan banyak penyesuaian (konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, penurunan kerusakan hutan, manajemen air, laut, dan sebagainya). Meski begitu, secara keseluruhan banyak pihak sepakat bahwa terdapat beberapa fokus SDGs yang dapat menjadi panduan pembangunan serta sesuai dengan sembilan agenda prioritas Presiden Joko Widodo (Nawacita) di antaranya:

1. Keberlanjutan agenda pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan, keadilan gender, serta pemenuhan akses terhadap air dan sanitasi sebagai isu yang senantiasa strategis.
2. Peningkatan kesejahteraan dan pendidikan sesuai dengan agenda prioritas peningkatan kualitas hidup manusia melalui jaminan sosial, pendidikan, kesehatan serta reformasi agraria.
3. Pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan isu baru yang akan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi inklusif, serta industrialisasi yang berkelanjutan dan pembangunan hunian serta kota yang berkelanjutan disertai penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.
4. Akses energi yang terjangkau, sebagai fokus baru yang dikombinasikan dengan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pembangkit listrik, penggunaan biofuel, bendungan, serta jalur transportasi. Pengalihan kepada sumber energi terbarukan serta transparansi pengelolaan sektor energi turut menjadi fokus penting serta tanggung jawab sosial sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk menerapkan tata kelola sumber daya berkelanjutan.

5. Perubahan iklim, di mana Indonesia telah secara sukarela menyatakan komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

Komitmen ini dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca melalui Perpres No. 61/ 2011 dan 33 Rencana Aksi Daerah yang ditetapkan melalui peraturan gubernur. Langkah penurunan emisi diiringi dengan langkah adaptasi. Pelaksanaan rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di berbagai bidang terkait dituangkan di dalam program lintas bidang dalam RPJMN 2015–2019 dengan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sekitar 26 persen pada tahun 2019 dan peningkatan ketahanan perubahan iklim di daerah.

Keselarasan SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo–Jusuf Kalla “Nawacita” diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian RPJMN 2014–2019 sekaligus melengkapi prioritas strategi pembangunan terutama terkait dengan tujuan– tujuan yang berkaitan dengan lingkungan, energi bersih serta upaya menangani perubahan iklim.



Gambar 1.6 Keselarasan Nawacita dan SDG's

Di sisi lain, keterlibatan pemerintah daerah perlu didorong dalam pencapaian SDG'S sebagaimana hal yang belum dilakukan secara optimal dalam pelaksanaan MDG's. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa sejak pemberlakuan desentralisasi di Indonesia, dua pertiga nasib dan kualitas hidup warga, dalam praktiknya, sangat ditentukan oleh baik–buruknya kinerja pemerintah daerah, mulai dari soal kebersihan lingkungan, seperti pengelolaan sampah, hingga kualitas sekolah dan pelayanan kesehatan. Kita semua tergantung pada tinggi–rendahnya mutu pelayanan publik di daerah. Bahkan, hal ini bukan saja gejala Indonesia tetapi juga sebuah arus di tingkat dunia. Benjamin Barber, dalam buku *If Major Ruled The World* (2013), meletakkan harapan kepada para walikota untuk mengatasi

masalah-masalah besar dunia (perubahan iklim, pencegahan terorisme, pengurangan kemiskinan, tata niaga perdagangan obat). Merekalah tenaga dan energi perubahan. Menurut Barber, ada tiga alasan yang menyebabkannya:

- A. Kota merupakan hunian bagi lebih dari separuh penduduk dan karenanya merupakan mesin penggerak ekonomi.
- B. Kota telah menjadi rumah pencetus dan inkubator berbagai inovasi sosial, ekonomi dan budaya.
- C. Para pemimpin kota dan pemerintah daerah tidak terbebani dengan isu kedaulatan serta batas-batas bangsa yang menghalangi mereka untuk bekerja sama

Kesepakatan yang tertuang dalam SDGs adalah (a) sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs. Masa berlakunya 2015–2030; (b) sebuah dokumen setebal 35 halaman yang disepakati oleh lebih dari 190 negara; (c) berisikan 17 goals dan 169 sasaran pembangunan. Tujuh belas tujuan dengan 169 sasaran diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara-negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum).

Keberhasilan SDGs tidak dapat dilepaskan dari peranan penting pemerintah daerah. Karena pemerintah kota dan kabupaten (a) berada lebih dekat dengan warganya; (b) memiliki wewenang dan dana; (c) dapat melakukan berbagai inovasi; serta (d) ujung tombak penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan serta program pemerintah. 5 Dari pengalaman era MDGs (2000–2015), Indonesia ternyata belum berhasil menurunkan angka kematian ibu, akses kepada sanitasi dan air minum, dan penurunan prevalensi AIDS dan HIV. Mengapa? Karena pemerintah daerah tidak aktif terlibat di dalam pelaksanaan MDGs baik. Juga karena pemerintah daerah kurang didukung. Bagaimana agar pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lebih siap dan lebih mampu melaksanakan SDGs? Salah satu upaya untuk mendorong keberhasilan SDGs di daerah adalah melalui penyediaan informasi yang cukup bagi pemerintah daerah serta mengharmonisasikan kaidah SDGs dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan daerah.

Proses perumusan SDGs tidak lepas dari aspirasi dan inspirasi dari pemerintah daerah. Melalui asosiasi kota dan pemerintah daerah di tingkat global, pemerintah daerah telah sangat aktif ikut andil dalam perumusan dan pengesahan SDGs. Maka, bagi pemerintah daerah, “SDGs adalah kita”. Sangat wajar dan layak bila peran kota dan kabupaten menjadi sangat penting. Ada sejumlah fakta dan alasan mengapa demikian:

Pertama, selama periode penyusunan dokumen SDGs (2014–2015), pemerintah daerah dan kota telah memainkan peranan sangat aktif. Salah satunya, membentuk Gugus Tugas untuk SDGs dan Habitat III [Global Taskforce of Local and Regional Governments for Post-2015 Agenda towards Habitat III (GTF)]. Gugus tugas ini secara aktif melakukan advokasi selama masa penyusunan dokumen SDGs. Gugus tugas ini terdiri dari berbagai organisasi dan asosiasi kota serta kepala daerah, di antaranya International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), The Network of Regional Governments for Sustainable Development (nrg4SD), and United Cities and Local Governments (UCLG).

Kedua, salah satu keberhasilan pemerintah daerah adalah lahirnya Tujuan Nomor 11 tentang Perkotaan dan Hunian Warga yang Inklusif, Aman, Tangguh terhadap Bencana dan Berkelanjutan (UCLG, 2015).

Ketiga, Paragraph Nomor 45 dalam dokumen SDGs menyatakan bahwa negara-negara anggota PBB yang mengadopsi dokumen SDGs “akan bekerja sama erat dengan otoritas regional dan pemerintah daerah” (“work closely on implementation with regional and local authorities”). Hal ini merupakan penanda yang sangat jelas tentang peranan penting pemerintah kota dan kabupaten dalam mewujudkan SDGs di seluruh dunia.

Keempat, Gugus Tugas Pemerintah Daerah (GTF) dalam proses SDGs juga telah mengajukan berbagai usulan substansial yang penting, yang akhirnya masuk menjadi Tujuan dan Sasaran dalam dokumen SDGs, di antaranya:

- a. Goal 3. Kesehatan untuk semua lapisan usia, dengan usulan indikator antara lain (i) tingkat kematian penduduk akibat penyakit dan kecelakaan per 100 ribu penduduk; (ii) tingkat polusi.
- b. Goal 5. Kesetaraan gender, dengan indikator (i) keterwakilan politik perempuan yaitu proporsi kursi perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat nasional dan daerah, serta (ii) proporsi perempuan dalam posisi manajer di pemerintah nasional dan daerah.
- c. Goal 6. Ketersediaan air dan sanitasi, dengan indikator (i) proporsi rumah tangga dengan akses air minum (bukan air bersih); (ii) pengolahan limbah rumah tangga yang diolah sesuai dengan standar nasional.
- d. Goal 9. Pembangunan infrastruktur, dengan beberapa usulan indikator di antaranya proporsi penduduk yang berlangganan internet/broadband di antara 100 ribu penduduk (artinya, akses yang lebih luas dan terjangkau bagi semua penduduk terhadap internet).
- e. Goal 10. Penurunan ketimpangan dalam negara dan antar-negara dengan menerapkan indikator Rasio Palma, yaitu perbedaan antara lapisan pendapatan tertinggi 10 persen dan lapisan pendapatan termiskin 10 persen (bukan hanya Rasio Gini, yang terbukti kurang sensitif dalam memetakan ketimpangan pendapatan antara kelompok pendapatan teratas dan terbawah).
- f. Goal 16. Masyarakat inklusif, pemerintah daerah mengajukan usulan agar pemerintah di semua tingkatan termasuk pemerintah daerah membuka seluruh informasi mengenai anggaran pemerintah.

Salah satu indikator kesiapan Indonesia adalah kapan dan bagaimana pemerintah kabupaten dan kota akan melaksanakan SDGs. Pada tahun 2010, pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pemerintah provinsi. Dengan rencana aksi tersebut, pemerintah provinsi akan dapat berperan aktif dan pada gilirannya, diharapkan mempercepat pencapaian target-target MDGs pada tahun 2015.

MDGs dimulai tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2015. Artinya, upaya membawa MDGs ke tingkat lokal melalui RAD oleh pemerintah nasional sesungguhnya berjalan terlambat selama 10 tahun. Meski terlambat, upaya tersebut patut diapresiasi dan menjadi bahan pembelajaran bersama. Salah satunya adalah pengakuan bahwa peranan pemerintah daerah ternyata sangatlah penting.

Hingga akhir tahun 2015, Indonesia berpeluang gagal mencapai sasaran-sasaran MDGs.6 Bahkan beberapa provinsi di Jawa saja masih memiliki tugas yang berat seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa

Timur Target–target yang berpeluang gagal untuk dicapai itu di antaranya;

1. Penurunan angka kematian ibu.
2. Penurunan angka kematian balita,
3. Penurunan angka AIDS/HIV,
4. Cakupan air minum dan sanitasi.

SDGs tidak lain merupakan kelanjutan dari target–target MDGs dalam hal bagaimana mewujudkan pembangunan manusia. Keempat sasaran yang belum selesai itu tidak dapat dilupakan dan diabaikan begitu saja, karena sasaran–sasaran tersebut juga termuat ke dalam beberapa Tujuan dan Sasaran SDGs. Goal Nomor 2: Mengakhiri kelaparan, termasuk di dalamnya mengatasi gizi buruk. Goal Nomor 3: Kesehatan untuk semua lapisan penduduk (usia) dan Goal Nomor 6: Ketersediaan air bersih dan sanitasi. Harmonisasi kaidah SDG’s dalam peraturan perundang–undangan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan pusat dan daerah merupakan pembelajaran dari kegagalan pelaksanaan tujuan pembangunan millenium (Millenium Development Goals/MDG) pada akhir tahun 2015.

TPB/SDGs bukan hanya program pemerintah daerah saja, akan tetapi merupakan keinginan dari seluruh masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik dengan tujuan akhir menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kabupaten Gresik berkomitmen untuk melaksanakan TPB/SDGs di semua tingkatan kota hingga desa bahkan sampai di tingkat masyarakat. Pelaksanaan TPB/SDGs adalah komitmen semua pihak, tidak hanya kewajiban pemerintah, namun harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan lainnya (baik Filantropi dan Bisnis, Organisasi Masyarakat, serta Akademisi dan Pakar).

1.6 Teknologi Masa Depan Mendorong Smart City

Untuk mendorong keberlangsungan konsep smart city, terdapat berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan. Teknologi ini berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan smart city. Teknologi tersebut adalah :

1. *Mobile internet* merupakan akses internet yang menggunakan gawai personal. Dengan semakin meningkatnya pengaksesan internet melalui gawai personal, layanan SPBE harus dapat diakses oleh para pengguna dalam bentuk layanan bergerak tanpa batas waktu dan lokasi.
2. *Cloud computing* merupakan teknologi layanan berbagi pakai yang dapat diakses melalui internet untuk memberikan layanan data, aplikasi, dan infrastruktur kepada pengguna. Teknologi ini memberikan efektifitas dan efisiensi yang tinggi untuk melakukan integrasi TIK.
3. *Internet of Things (IoT)* merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas internet sehingga mampu melakukan pengiriman atau pertukaran data melalui akses internet.
4. *Big Data Analytics* merupakan teknologi analisis terhadap data yang berukuran sangat besar, tidak terstruktur, dan tidak diketahui pola, korelasi ataupun relasi antar data.
5. *Artificial Intelligence (AI)* merupakan teknologi kecerdasan buatan pada mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan

pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan AI dalam *Smart City* berpotensi membantu pemerintah dalam mengurangi beban administrasi seperti menjawab pertanyaan, mengisi dokumen, mencari dokumen, menerjemahkan suara/tulisan, dan membuat draf dokumen. Dalam hal pelayanan publik, AI dapat membantu memecahkan permasalahan yang kompleks seperti permasalahan sosial, kesehatan, dan transaksi keuangan.

Pada tahapan pengembangan *Smart City* yang akan dilaksanakan dari tahun 2024 hingga 2026, fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas *Smart City* agar menjadi lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan *Smart City*. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, telah dibangun portal *Smart City* yang didukung oleh teknologi kecerdasan buatan dan big data.

Diharapkan, melalui tahapan ini, *Smart City* akan terus berkembang menjadi lingkungan yang lebih pintar, inovatif, dan berkelanjutan. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan yang digunakan demi mendukung *Smart City* :

- A. Teknologi kecerdasan buatan merupakan kemampuan mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan manusia.
- B. Teknologi ini dapat diterapkan pada layanan administrasi pemerintahan untuk mengurangi beban kerja administrasi dan pada layanan publik untuk memecahkan permasalahan yang kompleks.
- C. Kecerdasan buatan didukung oleh teknologi big data analytics untuk menghasilkan informasi analisis dari data yang besar, tidak terstruktur, dan kompleks. Hasil analisis big data dimanfaatkan oleh mesin kecerdasan buatan untuk pembelajaran kondisi yang kompleks.
- D. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan big data diarahkan untuk menghasilkan layanan berbasis teknologi.

BAB II **ANALISIS KESIAPAN KABUPATEN TANGERANG**

Analisis kesiapan smart city Kabupaten Tangerang merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai kondisi Kabupaten Tangerang saat ini guna mendapatkan gambaran kapasitas dan kapabilitas Kabupaten Tangerang dalam menerapkan program-program pembangunan smart city. Di dalam analisis kesiapan smart city Kabupaten Tangerang, terdapat tiga aspek utama yang menjadi komponen kajian, yaitu:






- Struktur, atau komponen inti dari kabupaten Tangerang, yaitu sumberdaya manusia, kapasitas keuangan kabupaten Tangerang, dan sumber daya pemerintah kabupaten Tangerang.
- Infrastruktur, atau komponen sarana dan prasarana fisik kabupaten Tangerang yang terdiri dari infrastruktur sosial, infrastruktur digital, dan infrastruktur fisik lainnya.
- Suprastruktur, atau komponen kelembagaan dan non-fisik yang terdapat di Kabupaten Tangerang seperti lembaga sosial dan pemerintahan, regulasi dan kebijakan, dan hubungan antarlembaga

2.1 Analisis Kesiapan Struktur Kabupaten Tangerang

1. Analisis kualitas sumber daya manusia

Analisis kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang dilakukan untuk mengukur tingkat kapasitas masyarakat di Kabupaten Tangerang dalam menerima konsep smart city. Beberapa informasi yang perlu diketahui di dalam analisis ini adalah tingkat literasi masyarakat terhadap smart city yang nanti akan sangat membutuhkan partisipasi aktif dan positif dari masyarakat di Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, di dalam analisis ini diharapkan Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan pengukuran terhadap kondisi masyarakat di Kabupaten Tangerang dalam menghadapi era smart city di masa depan. Analisis terhadap kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tangerang dilakukan dengan menggunakan isian pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Analisis Kualitas SDM Kabupaten Tangerang

No	Komponen	Jumlah	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1.	Jumlah komunitas minat bakat/hobbie/ kreatif di Kab.Tangerang	24			
2.	Adanya komunitas pengembang/developer perangkat lunak TIK di Kab.Tangerang	15			
3.	Adanya digital startup di Kab. Tangerang	20			
4.	Adanya perguruan tinggi diKab. Tangerang	53			
5.	Jumlah penerima beasiswa perguruan tinggi dari pemerintah Kab. Tangerang	50			

No	Komponen	Jumlah	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
6.	Jumlah tindakan pelanggaran ketertiban umum dalam satu tahun	25		✓	
7.	Jumlah angka kriminalitas dalam satu tahun	74		✓	
8.	Jumlah tindakan perusakan fasilitas umum dalam satu tahun	8		✓	
9.	Jumlah kegiatan tawuran antar kelompok warga dalam satu tahun	-	✓		











2. Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintahan

Analisis terhadap sumber daya pemerintahan dilakukan untuk mengukur tingkat kesiapan pemerintah Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan program smart city dimana di dalamnya dituntut adanya integrasi dan interoperabilitas di dalam proses bisnis pemerintah Kabupaten Tangerang. Disamping itu, sebagai unsur yang menjadi penggerak dari smart city, kesiapan pemerintah Kabupaten Tangerang di dalam melaksanakan smartcity merupakan factor kunci keberhasilan smart city. Sehingga di dalam analisis terdapat lebih banyak butir-butir informasi yang perlu ditelaah lebih lanjut di dalam analisis kesiapan pemerintah Kabupaten Tangerang.

Analisis terhadap kualitas sumber daya pemerintahan dilakukan dengan menggunakan isian pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintahan Kabupaten Tangerang

No	Komponen	Jumlah	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1.	Jumlah pegawai dengan jenjang pendidikan S2 ke atas	982	✓		
2.	Persentase pegawai dengan latar belakang pendidikan Ilmu Komputer/Teknik Informatika	3%	✓		
3.	Jumlah relawan TIK di daerah	100	✓		
4.	Persentase jumlah unit komputer (PC & Laptop) terhadap jumlah pegawai	20%		✓	
5.	Persentase pegawai berusia 50 tahun ke atas terhadap jumlah pegawai	20%	✓		
6.	Persentase pegawai berusia 40-50 tahun terhadap jumlah pegawai	35%	✓		
7.	Persentase pegawai berusia 25-40 tahun terhadap jumlah pegawai	45%	✓		

No	Komponen	Jumlah	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
8.	Jumlah sistem informasi yang digunakan di pemerintah daerah	126			
9.	Persentase ketersediaan jaringan broadband access terhadap jumlah kantor pemerintahan	90%			
10.	Persentase ketersediaan jaringan LAN/WAN di kantor pemerintahan	90%			
11.	Jumlah lokasi wireless internet (hotspot) dikawasan perkantoran pemerintahan	200			
12.	Ketersediaan data center (baik yang dikelola sendiri maupun manage service) untuk kepentingan pemerintahan	Ada			
13.	Ketersediaan rencana dan SOP mitigasi bencana terhadap data pemerintahan	Ada			
14.	Ketersediaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang interoperabel	Ada			
15.	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang interoperabel	Ada			
16.	Ketersediaan sistem informasi kantor virtual pemerintah daerah yang interoperabel	Ada			
17.	Ketersediaan sistem dan evaluasi pembangunan daerah yang interoperabel	Ada			
18.	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan kepegawaian daerah yang interoperabel	Ada			
19.	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan legislasi daerah yang interoperabel	Ada			
20.	Ketersediaan sistem informasi pelayanan publik yang interoperabel	Ada			

3. Analisis Kapasitas Keuangan Kab. Tangerang

Analisis terhadap kapasitas keuangan Kabupaten Tangerang diperlukan untuk mengetahui seberapa besar sumber daya yang dapat dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan pelaksanaan smart city. Melalui analisis ini, diharapkan pemerintah Kabupaten Tangerang dapat memperkirakan alokasi sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan dan keuangan yang dapat dialokasikan untuk program smart city.

Disamping itu, melalui analisis ini, Pemerintah Kabupaten

Tangerang juga didorong untuk dapat mulai mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif atau sumber pembiayaan pihak ketiga lainnya sebagai sumber daya dalam hal keuangan untuk menjalankan program smart city. Analisis terhadap kapasitas keuangan dilakukan dengan menggunakan isian pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3 Analisis Kapasitas Keuangan Kabupaten Tangerang

No	Komponen	Jumlah	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1.	Persentase Nilai Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Kab. Tangerang	20%		✓	
2.	Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu di Kab. Tangerang	5%	✓		
3.	Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kab. Tangerang	45%		✓	
4.	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Total Belanja	20%		✓	
5.	Jumlah Anggaran untuk Belanja Smart City yang dapat dialokasikan di dalam APBD Tahun 2022	20%	✓		
6.	jumlah program pembangunan untuk mendukung smart city	175	✓		
7.	Nilai investasi masuk yang mendukung pembangunan	1T	✓		
8.	Jumlah sumber-sumber pendanaan pembangunan alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung smart city	10M	✓		

2.2 Analisis Kesiapan Infrastruktur Kabupaten Tangerang

Analisis terhadap kesiapan infrastruktur daerah dilakukan untuk mengukur kesiapan kondisi infrastruktur daerah yang dikategorikan ke dalam tiga dimensi, yaitu:

- Infrastruktur Fisik
- Infrastruktur Digital
- Infrastruktur Sosial

1. Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Kabupaten Tangerang

Analisis terhadap kesiapan infrastruktur fisik Kabupaten Tangerang dilakukan untuk mengukur kondisi sarana dan prasarana fisik Kabupaten Tangerang yang menjadi titik tolak dalam pembangunan smart city Kabupaten Tangerang. Dengan mengetahui posisi saat ini dalam hal infrastruktur fisik, maka pemerintah Kabupaten Tangerang akan dapat mengukur seberapa banyak pembangunan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk mencapai visi smart city Kabupaten Tangerang. Analisis terhadap kesiapan






infrastruktur fisik Kabupaten Tangerang dilakukan dengan menggunakan isian pada tabel 2.4. berikut:



Tabel 2.4. Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Kabupaten Tangerang

No	Komponen	Jumlah	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1.	Persentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik	85%			
2.	Persentase panjang pedestrian (fasilitas pejalan kaki) per panjang jalan beraspal	30%			
3.	Persentase lampu jalan yang berfungsi dengan baik	75%			
4.	Persentase rambu dan tunjuk jalan dalam kondisi baik	90%			
5.	Adanya kawasan perkantoran untuk kegiatan bisnis	Ada			
6.	Adanya kawasan perbelanjaan untuk kegiatan perdagangan masyarakat	Ada			
7.	Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik	90%			
8.	Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam kondisi baik	80%			

2. Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Kabupaten Tangerang Analisis terhadap kesiapan infrastruktur digital Kabupaten Tangerang diperlukan untuk mengukur kesiapan Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan program smart city, mengingat di dalam konsep smart city, teknologi merupakan enabler yang dapat memberikan percepatan terhadap hasil capaian dari smart city. Analisis terhadap kesiapan infrastruktur digital Kabupaten Tangerang dilakukan dengan menggunakan isian pada Tabel 2.5 berikut:


Tabel 2.5 Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Kabupaten Tangerang

No	Komponen	Jumlah	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1.	Persentase luas area dengan jaringan 4G atau 3G	90%			
2.	Tersedianya jaringan broadband access Ada untuk masyarakat	Ada			
3.	Jumlah lokasi wireless untuk public	10			
4.	Persentase rumah tangga yang terlayani listrik	95%			
5.	Jumlah kejadian pemadaman listrik setiap bulan (dalam jam)	30			

No	Komponen	Jumlah	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
6.	Jumlah sekolah yang memiliki akses internet	200			
7.	Jumlah rumah sakit yang menggunakan sistem layanan elektronik/online	3			

- Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Kabupaten Tangerang Analisis kesiapan infrastruktur sosial di Kabupaten Tangerang dilakukan untuk mengukur kondisi kesiapan infrastruktur di Kabupaten Tangerang yang terkait dengan kewargaan. Kebutuhan akan sarana prasarana sosial merupakan suatu hal yang dapat meningkatkan partisipasi dan keguyuban warga kota disaat smart city akan dan mulai dilaksanakan. Analisis terhadap kesiapan infrastruktur sosial Kabupaten Tangerang dilakukan dengan menggunakan isian pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Kabupaten Tangerang

No	Komponen	Jumlah	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Adanya Ruang Terbuka Publik di tingkat RT	200			
2	Adanya Ruang Terbuka Publik di tingkat RW	300			
3	Adanya aula/balai warga di tingkat kelurahan/desa	247			
4	Adanya fasilitas olahraga ditingkat kelurahan/desa	247			
5	Ketersediaan perpustakaan umum yang dikelola oleh pemerintah Kab. Tangerang	29			

2.3 Analisis Kesiapan Suprastruktur Kabupaten Tangerang

Suprastruktur atau aspek kelembagaan dan kebijakan di Kabupaten Tangerang merupakan suatu perangkat yang akan menjamin lancar tidak pelaksanaan smart city, khususnya smart city-smart city yang dimulai dan didorong dari inisiatif pemerintah Kabupaten Tangerang seperti yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, analisis terhadap dimensi suprastruktur atau kebijakan dan kelembagaan dilakukan terhadap tiga aspek, yaitu:

- Kesiapan Kebijakan Kabupaten Tangerang
- Kesiapan Kelembagaan Kabupaten Tangerang
- Kesiapan Organisasi Masyarakat Kabupaten Tangerang

1. Analisis Kesiapan Kebijakan Kabupaten Tangerang

Aspek kebijakan merupakan salah satu aspek yang diperlukan bagi pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menjamin keberlanjutan sebuah program pembangunan. Begitu pun dengan inisiatif smart city yang dilaksanakan di Kabupaten Tangerang, memerlukan seperangkat kebijakan untuk menjamin pelaksanaannya berjalan dengan baik, lancar dan berkelanjutan. Untuk itu, analisis

terhadap aspek kebijakan di Kabupaten Tangerang perlu dilakukan. Analisis terhadap kesiapan kebijakan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan isian pada Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7. Analisis Kesiapan Kebijakan di Kabupaten Tangerang

No	Komponen	Jumlah	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1.	Adanya Peraturan Daerah tentang Dewan Smart City Daerah	Ada			
2.	Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang Ada Tim Pelaksana Smart City Daerah	Ada			
3.	Adanya Peraturan Daerah tentang Masterplan Smart City Daerah	Ada			
4.	Adanya visi pembangunan smart city yang selaras dengan visi misi pembangunan daerah	Ada			
5.	Adanya kepastian terhadap keberlanjutan program smart city dalam jangka panjang	Ada			
6.	Adanya mekanisme evaluasi dan apresiasi kinerja terhadap aparatur dan organisasi yang berprestasi dalam melaksanakan program smart city	Ada			

2. Kesiapan Kebijakan, Peraturan Daerah

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;

- Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 Smart City di Indonesia.
- SK Bupati Tangerang No. 459/HK/KPTS/2018 tentang Pembentukan Dewan Smart City Pemerintah Kabupaten Tangerang
- SK Bupati Tangerang No. 460/HK/KPTS/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Smart City di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

3. Analisis Kesiapan Kelembagaan Di Kabupaten Tangerang

Kelembagaan di Kabupaten Tangerang merupakan perangkat nonfisik selanjutnya setelah kebijakan yang sangat menentukan keberlanjutan pelaksanaan smart city di Kabupaten Tangerang dari sisi pengelola kota, yaitu pemerintah Kabupaten Tangerang. Di dalam aspek kelembagaan ini, nantinya akan diatur pembagian peran dalam pelaksanaan smart city. Oleh karena itu, aspek kelembagaan menjadi salah satu bagian dari analisis kesiapan smart city di Kabupaten Tangerang. Analisis terhadap kesiapan kelembagaan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan isian pada Tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8. Analisis Kesiapan Kelembagaan di Kabupaten Tangerang

No	Komponen	Jumlah	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1.	Adanya Dewan Smart City di Kab.Tangerang	Ada			
2.	Adanya Tim Pelaksana Smart City di Kab.Tangerang	Ada			
3.	Adanya SOP smart city diKab. Tangerang	Ada			
4.	Adanya tata pamong yang bertugas sebagai anggota Tim Pelaksana Smart City di setiap OPD	Ada			

4. Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Kabupaten Tangerang Disamping aspek kebijakan dan kelembagaan, terdapat satu aspek nonfisik selanjutnya yang akan menjadi penentu dari keberlanjutan smart city di daerah. Aspek tersebut adalah aspek organisasi di masyarakat sipil. Aspek ini menjadi salah satu aspek dalam kesiapan smart city karena di dalam sebuah smart city, aspek partisipasi masyarakat yang digerakkan di dalam organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu inti dari smart city. Analisis terhadap kesiapan organisasi masyarakat daerah dilakukan dengan menggunakan isian pada Tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9. Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Kabupaten Tangerang

No	Komponen	Jumlah	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1.	Adanya lembaga pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi di Kab. Tangerang	Ada			
2.	Adanya forum-forum Swadaya masyarakat pendukung smart city	Ada			
3.	Adanya forum swadaya masyarakat pendukung smart city	Ada			
4.	Dukungan operasional pemerintah terhadap forum pendukung smart city	Ada			
5.	Adanya forum pendukung smart city yang memiliki sekretariat definitif	Ada			
6.	Adanya partisipasi pakar dari perguruan tinggi lokal dalam Dewan Smart City di Kab. Tangerang	Ada			

BAB III

ANALISIS KESENJANGAN KABUPATEN TANGERANG

Analisis kesenjangan strategis dikenal juga sebagai “gap analysis”. Digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara keadaan saat ini (“as is”) dan keadaan pada masa akan datang (“to be” atau “future state”). Selanjutnya kesenjangan digunakan sebagai referensi untuk menetapkan strategi dan langkah langkah yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan yang ditemukan. Analisis kesenjangan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketimpangan antara tujuan masa depan yang ingin dicapai atau ingin terjadi yang dapat dilihat sebagai hasil dari analisis masa depan, dengan kondisi saat ini yang dapat dilihat pada analisis kesiapan Kabupaten Tangerang. Kesenjangan inilah yang menjadi mata analisis di dalam bagian ini. Untuk melakukan analisis ini, digunakan perangkat analisis berupa Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
Matriks Analisa Kesenjangan Smart Governance
Smart Governance



Strengths

1. Eksistensi Lembaga Sumber Daya Aparatur di Daerah (UU No. 43 Tahun 1999 beserta peraturanpelaksananya, Keppres No. 59 Tahun 1999);
 2. Pelimpahan kewenangan pengelolaan aparatur dari Pusat ke Daerah, sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008;
 3. Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang baku dalam pengelolaan Sumber Daya Aparatur;
 4. Tersedianya pengelola Sumber Daya Aparatur yang memadai didukung uraian tugas yang jelas pada masing- masing fungsi;
 5. Kapasitas Fiskal pembangunan Kabupaten Tangerang mencapai 5,3 Triliun yang memberikan alokasi dalam pembangunantata kelola pemerintahan serta pengembangan sumber daya manusia;
 6. Tata kelola manajemen penyelenggaraan pemerintahan telah memanfaatkan system informasi e- planing, e- budgeting, e-controlling, e-procurement, si-kepegawaian dan e-kinerja;
 7. Komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam pengembangan sistem informasi dan penetrasi teknologi guna mewujudkan Tangerang Smart City;Kesiapan regulasi terhadap pengaturan dan rencana pengembangan Smart City;
 8. Kesiapan Sarana digital dengan cakupan layanan 4G atau 3G mencapai 80%;
 9. Karakteristik sumber daya aparatur berlatar belakang IT mencapai 3% dengan rentang usia pegawai pada umur 25-40 tahun mencapai 45%;
- Rumusan RPJMD 2019-2023 telah memetakan Indikator Kinerja Utama di tingkat tujuan dan sasaran. Pengukuran indikator kinerja belum sesuai dengan kaidah akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (AKIP) sehingga tidak dapat dilaksanakan cascading indkator kinerja utama bersifat outcome hingga indikator output di level kegiatan serta sebagian besar memenuhi kaidah indikator *Smart*;
11. Pemerintah Daerah telah mengembangkan inovasi pelayanan publik diantaranya membayar pajak sambil berbelanja dan Sistem Informasi Jaringan Elektronik Medik Pasien Online (Si-Jempol) Rumah Sakit Umum Balaraja;
 12. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Lembaga Perguruan Tinggi mencapai 15 Perguruan Tinggi.



Weaknesses

1. Belum tersedianya analisa jabatan sebagai dasar perencanaan manajemen SDM;
2. Belum optimalnya pemberdayaan diklat di masing- masing SKPD;
3. Kurangnya pemahaman proses manajemen pengembangan SDM diindikasikan dengan masih lemahnya koordinasi;
4. Masih terdapatnya pelanggaran disiplin PNS.
5. Belum ada kebijakan yang mengatur tentang pemanfaatan TI.
6. Sistem informasi yang digunakan pemerintah Daerah mencapai 126 aplikasi namun sebagian besar belum terintegrasi atau interoperable baik secara sistem maupun basis data. Interoperabilitas Sistem Informasi belum terwujud sehingga data yang dihasilkan dalam suatu informasi di sektor tertentu belum dapat ditransfer untuk dimanfaatkan di sistem informasi lain.
7. Aksesibilitas data dan informasi pembangunan dan dokumen hasil pembangunan yang dapat diakses publik (*open government*) sebagai bagian dari transparansi pelayanan publik belum optimal;
8. Pengukuran performa kinerja pembangunan belum dapat dipantau oleh eksekutif maupun publik secara realtime;
9. Struktur Organisasi belum berdasarkan keinerja (*organization based on performance*) dan penyeragaman kinerja berbasis bisnis proses perangkat Daerah belum optimal



Opportunities

1. Keputusan. MENPAN tentang Penataan PNS;
2. Keputusan Kepala BKN No 46 A tentang Standar kompetensi Jabatan Struktural dan No 46 B tentang Evaluasi Jabatan;
3. Surat Gubernur tentang tes potensi untuk pejabat struktural;
4. Tuntutan tentang Standar pelayanan minimal (SPM) dalam Pelayanan Kepegawaian;
5. Kebijakan kepegawaian secara nasional yang mensyaratkan diklat sebagai bagian system pembinaan pegawai;
6. Banyaknya lembaga pendidikan dan pelatihan lokal maupun nasional yang bisa diajak kerjasama diindikasikan dengan Kerjasama penyelenggaraan Diklat dengan sistem pola kemitraan;
7. Kerjasama dalam proses pelayanan kepegawaian (pensiun, askes, dll);
8. Banyaknya tawaran peningkatan SDM (diklat fungsional, beasiswa, pendidikan formal);
9. Makin banyaknya lembaga pengawasan formal dan non formal.
10. Banyaknya Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lokal maupun nasional yang bisa diajak kerjasama di bidang IT
11. Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki 246 Desa dan 28 Kelurahan yang memiliki peluang dalam pengelolaan Alokasi Anggaran Desa (Dana Desa, ADD, dan Bagi Hasil) serta Dana Kelurahan untuk pengembangan sistem informasi, penetrasi teknologi, dan penguatan infrastruktur pendukung Smart City.
12. Ketunggalan identitas berbasis Nomor Induk Kependudukan Kabupaten mencapai 94,95% atau interpretasi sangat tinggi sehingga dapat dimanfaatkan untuk membentuk BigData.
13. Pengembangan Sistem Informasi dan Peneterasi Teknologi yang dilakukan oleh sektor privat atau pelaku start up digital;
14. Pengembangan Artifisial Intelligent atau Artifisial Neural Network yang dapat dikembangkan dalam sistem pengambilan keputusan dan dashboard tata kelola penyelenggaran pemerintahan
15. Perkembangan digital yang mendorong IoT meliputi data dan informasi yang saling terkoneksi (ubiquitous connectivity), jaringan berbasis IP, ekonomi komputasi (computing economics), teknologi miniature (miniaturization), big data analytics dan berkembangnya komputasi awan (cloud computing);
16. Komitmen Pemerintah dalam melaksanakan Sustainable Development Goal's (SDG's) dan agenda global lainnya.
- 17.



Threats

1. Situasi kondisi politik nasional dan lokal (dalam komitmen pengembangan SDM Aparatur);
2. Komitmen pengembangan dan peningkatan kualitas SDM berupa anggaran belum sesuai (dibawah standar) dengan kektentuan SE. MENDAGRI. Dengan diindikasikan terbatasnya kuantitas pengiriman dan penyelenggaraan Diklat Teknis / Fungsional;
3. Belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur;
4. Semakin kritisnya pola pikir masyarakat;
5. Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur di daerah lain;
6. Disharmonisasi peraturan perundang-undangan seperti perbedaan kaidah akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan tata cara perumusan perencanaan pembangunan daerah, atau pelaksanaan diklat di Daerah;
7. Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN di sektor perawatan kesehatan (*health care*), turisme (*tourism*), jasa logistik (*logistic services*), e-ASEAN, jasa angkutan udara (*air travel transport*), produk berbasis agro (*agrobased products*), barang-barang elektronik (*electronics*), perikanan (*fisheries*) jika tanpai disertai perubahan adaptif dari pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya;
8. Perkembangan informasi hoax yang by design ditambah interaksi mediasosial dengan konten negatif yang mendorong terjadinya disharmonisasi, ujaran kebencian, provokatif, dsb.
9. Penyalahgunaan data penerima manfaat melalui tindakan hacking, fraud, atau kesepakatan illegal oleh oknum vendor yang memiliki akses terhadap data publik;
10. Disharmonisasi data penerima manfaat program-program pembangunan lintas sektoral seperti pemberian kuota siswa miskin yang tidak berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) untuk program kemiskinan.

Tabel 3.2
Matriks Analisa Kesenjangan Smart Branding Smart Branding



Strengths

1. Kabupaten Tangerang memiliki potensi wisata alam yang sangat beragam 8 Situ (danau), 7 Wisata Pantai, 6 situs Pubakala, 6 bangunan Bersejarah didukung 8 seni tradisional dan 72 seni modern;
2. Kabupaten Tangerang telah mengembangkan Landmark daerah dengan tagline Daerah seribu Industri;
3. Kapasitas Fiskal pembangunan Kabupaten Tangerang mencapai 5,3 Triliun yang memberikan alokasi dalam pembangunan kepariwisataan;
4. Kunjungan wisata mencapai 5,1 Juta wisatawan dalam negeri namun wisman hanya mencapai 45 Ribu jiwa;
5. Banyaknya hotel/akomodasi lainnya di Tangerang mencapai 23 Hotel yang menyediakan 2.372 kamar didukung 22 usaha perjalanan wisata;
6. Kabupaten Tangerang memiliki 942 Koperasi Aktif diantaranya terdapat 2 koperasi yang bergerak di wisata;
7. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mengembangkan kawasan industri diantaranya KI Milinium, KI Cikupa Mas, KI Balaraja, KI Laksana Bisnis Park dan KI Cileles
8. Minat dan realisasi investasi di Kabupaten Tangerang terus meningkat. Tahun 2016 tercatat sebanyak 115 PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp3.986.356,3 juta dan sebanyak 110 PMA dengan nilai investasi sebesar \$560.327,6 ribu. Sedangkan pada tahun 2017 tercatat sebanyak 181 PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp6.413.641,5 juta dan 132 PMA dengan nilai investasi sebesar \$412661,5ribu;
9. Konektivitas Daerah yang tinggi dengan infrastruktur bandara internasional, jalan tol dan lajur kereta api



Weaknesses

1. Perangkat daerah yang membidangi Pariwisata belum optimal dan regulasi daerah belum tersedia;
2. Belum adanya penetapan RTRW;
3. Sistem OSS (Online Single Submission) belum berjalan optimal
4. Tidak adanya tanda batas wilayah di beberapa titik, landmark yang belum bernilai arsitektur tinggi dan tidak adanya regulasi mengenai hal tersebut
5. Tingkat okupansi hunian kamar hotel masih rendah;
6. Realisasi investasi untuk hotel dan restoran masih rendah namun didukung investasi industri makanan mencapai 99,8 Milyar.



Opportunities

1. Daya dukung dari Kementerian, Lembaga lain dan Pemprov serta Pihak swasta;
2. Potensi investor dalam dan luar negeri
3. Kerja sama antar Pemerintah Daerah baik dalam maupun luar provinsi
4. Adanya daya dukung APBD Provinsi dan APBN;
5. Kabupaten Tangerang merupakan wilayah hinterland untuk kawasan metropolitan kota Tangerang dan Jabodetabek;
6. Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN;
7. Penetrasi teknologi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengembangkan ekosistem bisnis daerah, mengembangkan platform ekonomi digital bekerjasama dengan pelaku usaha seperti traveloka, booking, tiket, serta mengembangkan digital market untuk promosi produk lokal Kabupaten Tangerang, meningkatkan okupansi hotel, dan promosi pariwisata;
8. Pemanfaatan alokasi Anggaran Desa (ADD, Bagi Hasil, dan Dana Desa) dan Dana Keluarahan yang dapat dimanfaatkan untuk Pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas, kawasan Desa Tematik,
9. Pemanfaatan Dana CSR dalam pengembangan pariwisata dan ekosistem bisnis daerah didukung pelaksanaan Program-program sektoral kementerian dan pemerintah provinsi dalam pengembangan wilayah dan destinasi wisata.



Threats

1. Ketidakpastian perdagangan Global didukung inkondusifitas politik dan perekonomian yang mempengaruhi perekonomian regional;
2. Efek hubungan Tiongkok-AS mempengaruhi inflasi daerah
3. Adanya persaingan pengajuan HAKI warisan budaya dan pariwisata dengan daerah sekitar;
4. Perkembangan informasi hoax design ditambah interaksi media sosial dengan konten negatif yang mendorong terjadinya disharmonisasi dengan Adanya Haters, "Netizen Julid" dan Cluster Masyarakat yang belum menerima informasi pembangunan dengan baik;
5. Adanya urbanisasi dari luar Kabupaten yang tak terbendung setiap tahun;
6. Mobilitas penduduk yang padat (Rapid Mobility) dari daerah hinterland Medan kawasan metropolitan kota Tangerang dan Jabodetabek menghambat mobilitas atau akses wisatawan ditambah pertumbuhan kendaraan pribadi;
7. Pendapatan per kapita relative rendah dengan nilai 33,28 Juta atau urutan ke 6 dari 8 Kabupaten Kota di Tangerang dapat menghambat konsumsi di sektor wisata;



Tabel 3.3
Matriks Analisa Kesenjangan Smart EconomySmart Economy



Strengths

1. Letak geografi strategis
2. Anggaran daerah tersedia
3. Jumlah penduduk yang besar
4. Jumlah UMKM, IKM dan industri banyak
5. Infrastruktur fisik memadai
6. Adanya peningkatan produktifitas Industri Kecil Menengah (IKM)
7. Adanya regulasi tentang sistem antar kerja
8. Adanya aplikasi sistem antar kerja
9. PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2017 mencapai 119,293 triliunrupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar 86,937 triliun rupiah tertinggi ke-2 setelah Kota Tangerang di Banten dan uruatan ke-23 secara nasional;
10. Minat dan realisasi investasi di Kabupaten Tangerang terus meningkat. Tahun 2016 tercatat sebanyak 115PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp3.986.356,3 juta dan sebanyak 110 PMA dengan nilai investasi sebesar \$560.327,6 ribu. Sedangkan pada tahun 2017 tercatat sebanyak 181 PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp 6.413.641,5 juta dan 132 PMA dengan nilai investasi sebesar \$412661,5 ribu;
11. Nilai ekspor Barang dan Jasa mencapai 88,136 Triliun. Lebih tinggi dari impor dan membentuk netto ekspr-impor senilai 24,4 Triliun atau sebesar 20,5% PDRB;
12. Kontribusi PDRB menurut lapangan Usaha dengan sumbangan tertinggi adalah industry pengolahan 36,87%,usaha kontruksi 13,61%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor 10,92%, real estate 7,22% sedangkan pertanian, kehutana, dan perikanan 6,81%. Secara keleuruhan,sector lain menyumbang 24,57%.
13. Paritas Daya beli masyarakat cukup mencapai 1.12 Juta per bulan dengan komposisi 53,04% konsumsimakanan dan 46,66% non makanan;
14. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mengembangkan kawasan industry diantaranya kawasan industri Milinium, KI Cikupa Mas, KI Balaraja, KI Laksana Bisnis Park dan KI Cileles.



Weaknesses

1. Lahan terbatas
2. Kualitas SDM rendah
3. Sumber bahan baku sulit didapat
4. Kualitas dan kuantitas produksi tidak stabil
5. Terbatasnya kualitas dan kuantitas pendamping IKM
6. Minimnya pegawai pengantar kerja yang bertugas mempertemukan pencari kerja dan pengguna tenaga kerja
7. Pengawas ketenagakerjaan yang berfungsi selaku penegak hukum ketenagakerjaan ditarik ke provinsi
8. Tingkat Kemiskinan pada 2018 dari total penduduk yang mencapai 3.477.495 jiwa, sebanyak 923.405 orang di antaranya berada di bawah garis kemiskinan atau mencapai 26,6%
9. *Performance* pertumbuhan ekonomi Tangerang secara year on year mengalami pertumbuhan yang fluktuatif cenderung menurun mengikuti trend nasional;
10. Pendapatan per kapita relative rendah dengan nilai 33,28 Juta atau urutan ke 6 dari 8 Kabupaten Kota di Tangerang;
11. Tingkat pengangguran terbuka mencapai 174.546 dari 1.651.753 angkatan kerja atau mencapai 10,57%
12. Pengeluaran belanja pemerintah atau *Government Expenditure* masih rendah mencapai Rp3.746 (juta) atau hanya 3,14% dari struktur PDRB menurut Pengeluaran.
13. Belum adanya penetapan RTRW;



Opportunities

1. Pangsa pasar besar
2. Tingkat permintaan produk tinggi
3. Akses jalan, transportasi, informasi mudah
4. Adanya hubungan kemitraan dengan usaha besar
5. Adanya Gerai Tangerang Gemilang
6. Adanya program pendampingan bagi pelaku industri kecil menengah (IKM)
7. Banyak perusahaan industri yang dapat menyerap tenaga kerja;
8. Pertumbuhan industri pengolahan mencapai 3,94% dengan nilai NTB 43,899 Milyar.
9. Tingkat Kesempatan Kerja mencapai 89,43% namun tingkat partisipasi angkatan kerja hanya 63,79%
10. Kabupaten Tangerang sebagai daerah hinterland kota Tangerang dan Jabodetabek memiliki pangsa pasar yang besar;
11. Meningkatnya intensitas usaha e-commerce dan industri ekonomi kreatif dan pengembangan start up oleh pelaku usaha dan generasi muda didukung Perkembangan digital yang mendorong IoT meliputi data dan informasi yang saling terkoneksi (*ubiquitous connectivity*), jaringan berbasis IP, ekonomi komputasi (*computing economics*), teknologi miniature (*miniaturization*), big data analytics dan berkembangnya komputasi awan (*cloud computing*);
12. Kebijakan E-Money dalam transaksi;
13. Alokasi anggaran Desa (ADD, Bagi Hasil, dan Dana Desa) dan Dana Kelurahan yang dapat dimanfaatkan untuk Pengembangan perekonomian lokal, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan didukung Pemanfaatan Dana CSR dalam pengembangan ekonomi lokal



Threats

1. Urbanisasi meningkat, sehingga jumlah pengangguran meningkat, membutuhkan lahan pemukiman kebutuhan pangan pun semakin meningkat.
2. Lahan pertanian pangan semakin sempit. Alih fungsi lahan pertanian. Penggunaan lahan kering untuk permukiman, perkantoran, dan sungai mencapai 38.371 dari total 59.768 Ha lahan kering dan 36.193 lahan sawah
3. Kekurangan dukungan modal bagi pelaku UMKM dan IKM
4. Harga komoditas bahan baku produksi yang mahal;
5. Produk luar yang bermerk dan lebih berkualitas membanjiri lokal, sehingga lebih diminati konsumen
6. Jumlah pesaing bisnis yang banyak
7. Sistem pemasaran produk luar gencar melalui media online
8. Masih rendahnya ketaatan perusahaan dalam melaporkan lowongan kerja
9. Adanya ego wilayah sehingga menyulitkan bagi pencari kerja yang berada di luar kawasan industri/perusahaan Disharmonisasi pengembangan wilayah dengan
10. belum adanya penetapan RTRW;
11. Pertumbuhan pemukiman (Backlog Perumahan) jauh lebih cepat dari kemampuan daerah untuk menyediakan akses jalan;
12. Mobilitas penduduk yang padat (Rapid Mobility) dari daerah hinterland kota Tangerang dan Jabodetabek ditambah pertumbuhan kendaraan pribadi;
13. Adanya urbanisasi dari luar Kabupaten yang tak terbendung setiap tahun;
14. Ketidakpastian perdagangan Global didukung inkondusifitas politik dan perekonomian yang mempengaruhi perekonomian regional;



Tabel 3.4
Matriks Analisa Kesenjangan Smart LivingSmart Living



Strengths

1. Wilayah yang luas
2. Adanya Bandara internasional
3. Wilayah dekat dengan DKI
4. Listrik merata
5. Jalan raya memadai
6. Budaya gotong royong
7. Budaya Paperless
8. Dasar hukum pengaturan lalu lintas
9. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan
10. Konektivitas Daerah yang tinggi dengan infrastruktur bandara internasional, jalan tol dan lajur kereta api
11. Kepemilikan rumah milik sendiri dengan luas lantai per kapita lebih atau sama dengan 7,2 m² mencapai 88%;
12. Akses terhadap pembuangan akhir tangki atau sistem pengolahan air limbah mencapai 87,38%;
13. Persentase rumah tangga yang terlayani listrik mencapai 99,85%;
14. Sumber air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat mencapai 59% bersumber dari air kemasan 29,28% dari sumur.
15. Kualitas Udara masih di bawah ambang batas dengan rata-rata kadar No₂ mencapai 27,95% dan SO₂ mencapai 8,52 atau dengan nilai Indeks Kualitas Udara mencapai 74,30 terbaik ke-3 di provinsi Banten;
16. Memiliki fasilitas rumah sakit sebanyak 20 unit dengan total 2.042 tenaga medis didukung 43 puskesmas yang tersebar di 29 Kecamatan;
17. Cakupan imunisasi dasar lengkap mencapai 93,84%;
18. Sarana pendukung perhubungan sebagian telah ramah kelompok marginal seperti trotoar yang dapat diakses penyandang disabilitas, ruang untuk pojok ASI, ruang khusus merokok dan kawasan terbatas merokok.



1. Standar gedung puskesmas yg belum sesuai
2. Jumlah sarana kesehatan yg tidak sebanding dengan jumlah penduduk
3. Tingkat pendidikan rendah
4. IPM masih rendah
5. Kurangnya ketersediaan air bersih
6. Jumlah penduduk miskin
7. Angka pengangguran tinggi
8. Belum optimalnya budaya perilaku hidup bersih dan sehat
9. Kurangnya kesadaran Budaya antri
10. Kurangnya SDM dalam kuantitas dan Kualitas
11. Tingginya kemacetan lalu lintas
12. Tidak tertibnya pengguna jalan
13. Disharmonisasi pengembangan wilayah dengan belum adanya penetapan RTRW;
14. Terdapat 6,49% rumah tangga dengan rumah ber dindingkan anyaman bambu serta 4,52% jenis lantai tanah;
15. Terdapat 0,67% rumah tangga dengan akses sumber air dari mata air tak terlindungi;
16. Angka harapan hidup Kabupaten Tangerang mencapai 69,47 teringgi ketiga di Banten namun masih dibawah rata-rata rpovinsi sebesar 69,47 tahun
17. Tenaga pelayanan keschatan di Kecamatan masih belum memadai dengan jumlah tenaga mendid mencapai 127, paramedis perawatan 705, paramedis non perawatan 140, dan tenaga non medis 344;
18. Dari total Bayi yang dilaporkan sejumlah 323.227 jiwa terdapat 490 bayi mengalami gizi buruk; sedangkadari total bayi yang ditimbang sebanyak 283.050 jiwa terhadap 2.227 kelebihan giz dan 2.227 kurang gizi;
19. Angka kematian bayi mencapai 310 dari total 71.305 kelahiran hidup;
20. Peserta KB aktif berdasarkan metode jangka panjang dan metode non jangka panjang mencapai 44,59%
21. Angka Kecelakaan lalu lintas mencapai 366 Kasus sepanjang tahun 2018



Opportunities

1. Peluang usaha tinggi
2. Kemajuan teknologi
3. Lowongan kerja besar
4. Adanya BPJS
5. Adanya CSR perusahaan
6. Adanya Transportasi online
7. Perkembangan digital yang mendorong IoT dapat dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan dan transportasi serta pengendalian tata ruang;
8. Perkembangan teknologi medis dan alat-alat kesehatan untuk menguatkan kualitas pelayanan kesehatan, efisiensi biaya pengobatan dan meningkatkan angka kesembuhan;
9. Meningkatnya intensitas usaha industry ekonomi kreatif di sektor jasa transportasi dan pengembangan start up oleh pelaku usaha dan generasi muda
10. Komitmen Pemerintah dalam melaksanakan Sustainable Development Goal's (SDG's); didukung program sektoral kementerian dan pemerintah provinsi seperti Kebijakan sektoral 100 0 100 (sanitasi, kumuh, air bersih) yang mendukung kesehatan promotif dan preventif serta Pelaksanaan Program Sektoral Pola Hidup Bersih dan Sehat dan Gerakan Masyarakat melalui program Kabupaten Sehat;
11. Alokasi anggaran Desa (ADD, Bagi Hasil, dan Dana Desa) dan Pemanfaatan Dana CSR yang dapat dimanfaatkan dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Desa melalui pengembangan Ponkesdes dan Posyandu serta pemberdayaan kader- kader kesehatan.



Threats

1. Adanya urbanisasi dari luar Kabupaten yang tak terbendung setiap tahun;
2. Konsumerisme;
3. Kesenjangan ekonomi;
4. Sering bencana banjir;
5. Limbah pabrik;
6. Rumah sakit luar negeri (Internasional);
7. Pertumbuhan pemukiman (Backlog Perumahan) jauh lebih cepat dari kemampuan daerah untuk menyediakan akses jalan;
8. Parkir liar menyebabkan kebocoran pendapatan asli daerah akibat belum dilaksanakannya penegakan *parkiron street* dan mekanisme park and ride dalam penataan *parkir of street*;
9. Alih fungsi lahan pertanian. Penggunaan lahan kering untuk permukiman, perkantoran, dan sungai mencapai 38.371 dari total 59.768 Ha lahan kering dan 36.193 lahan sawah;
10. Peredaran obat-obatan terlarang yang menjangkau masyarakat usia sekolah atau;
11. Pengawasan obat-obatan dan makanan yang belum optimal serta gaya hidup yang tidak sehat memicu munculnya Kejadian Luar Biasa penyakit menular dan tidak menular.

Tabel 3.5
Matriks Analisa Kesenjangan Smart Society Smart Society



Strengths

1. Telah berkembang pusat-pusat Industri, pemukiman dan perkantoran
2. Terus meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan
3. Terus meningkatnya Angka Pendapatan Asli Daerah
4. Terus meningkatnya Coverage area layanan internet broadband, 3G dan 4G dari bermacam vendor/ISP
5. Dukungan bermacam aplikasi berbasis TIK yang sudah ada (itangkab, inlislite, kunang2, siga, pisa, dapodik, aplikasi sosial, dll)
6. Dukungan daerah (kebijakan dan anggaran)
7. Kabupaten Tangerang memiliki populasi mencapai 3,6 Juta jiwa sebagai populasi tertinggi di Provinsi Banten;
8. Angka Partisipasi sekolah untuk setingkat SD sederajat (7-12 Tahun) mencapai 99,56% sedangkan untuk setingkat SMP sederajat (13-15 tahun mencapai 95,36%;
9. Rasio guru dan murid di tingkat SD mencapai 24,32, SMP sebesar 23,58. Sedangkan SMA 25,08 atau sedikit di atas rasio maksimal 25;
10. Angka melek Huruf mencapai 96,76%;
11. Angka partisipasi formal dan nonformal penduduk berumur 7-18 tahun mencapai 99,76 untuk kelompok usia 7-12 tahun, 95,81 % untuk kelompok usia 13-15;
12. Interaksi sosial masyarakat secara digital didukung Kesiapan sarana digital melalui Broadband Acces sedangkan Interaksi sosial masyarakat secara fisik didukung terutama fasilitas interaksi masyarakat berupa pusat kegiatan belajar masyarakat di tingkat kelurahan/desa, fasilitas olahraga di tingkat kelurahan/desa;
13. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Lembaga Perguruan Tinggi mencapai 15 Perguruan Tinggi.



Weaknesses

1. Akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin belum maksimal
2. Pembudayaan gemar membaca masih belum optimal
3. Masih lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
4. Kualitas hidup dan perlindungan perempuan & anak belum maksimal
5. Ketahanan keluarga masih belum maksimal
6. Akses, sarana prasarana dan kualitas pendidikan belum merata
7. Rendahnya kualitas dan kuantitas data
8. Penduduk Kabupaten Tangerang setiap hari rata-rata bertambah 294 orang dengan laju pertumbuhan tertinggi di Kecamatan Panongan mencapai 5,58%
9. Harapan Lama Sekolah (HLS) selama 12,38 tahun sedangkan rata - rata bersekolah selama 8,24 tahun.
10. Angka Partisipasi sekolah untuk setingkat SMA sederajat (16-18 Tahun) hanya mencapai 72,32%;
11. Angka partisipasi formal dan nonformal penduduk berumur 7-18 tahun baru mencapai 68,73 untuk kelompok usia 16-18 tahun;
12. Belum mengembangkan pelayanan kegawat daruratan bencana yang terpadu dan terintegrasi sertadilengkapi early warning system.



Opportunities

1. Menjadi daerah penyangga ibu kota Negara
2. Jumlah penduduk yang besar
3. Banyaknya jumlah industri, perumahan dan perkantoran
4. Tersedianya dana desa
5. Meningkatnya informasi teknologi
6. Banyaknya lembaga organisasi kemasyarakatan dan komunitas
7. Meningkatnya Coverage area layanan internet broadband, 3G dan 4G dari bermacam vendor/ISP
8. Kepadatan penduduk mencapai 3.736 jiwa per km² dengan luas wilayah 959,51 km² atau 9,93% dariseluruh Banten;
9. Adanya komunitas minat, pengembang TIK, didukung sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Tangerang;
10. Pemanfaatan alokasi Alokasi anggaran Desa (ADD, Bagi Hasil, dan Dana Desa), Dana kelurahan dan Dana CSR dapat dimanfaatkan dalam peningkatan pelayanan pendidikan dan peningkatan sarana pendukung ekosistem belajar di masyarakat;;
11. Perkembangan digital yang mendorong IoT yang dapat dikembangkan untuk interaksi sosial mengingat sebanyak 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet;
12. Adanya digital start up yang dikembangkan oleh wirausaha, atau sektor privat didukung penyediaan broadband acces oleh pelaku-pelaku usaha di dunia pendidikan;
13. Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Perguruan tinggi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui transfer of knowledge.



1. Tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik yang akuntabel dan transparan
2. Urbanisasi daerah meningkat dan menimbulkan masyarakat yang heterogen
3. Masih tingginya angka kemiskinan
4. Sinkronisasi kebijakan belum maksimal
5. Masih rendahnya pemberdayaan masyarakat
6. Pemanfaatan teknologi yang tidak tepat
7. Belum ada regulasi pemanfaatan TIK di tingkat daerah
8. Tingkat pengangguran terbuka mencapai 10,57% yang dapat micu tindakan kriminalitas;
9. Pemanfaatan internet dan Interaksi di media sosial cenderung tanpa pengawasan;
10. Perkembangan informasi hoax yang by design ditambah interaksi media sosial dengan konten negatif yang mendorong terjadinya disharmonisasi.
11. Penyalahgunaan data penerima manfaat melalui tindakan hacking, fraud, atau kesepakatan illegal oleh oknum vendor yang memiliki akses terhadap data publik atau tindakan cyber crime;
12. Pengaruh perilaku seperti bullying, negatif challenge, atau atraksi imitasi dari suatu program televisi yang ber-konten negatif terhadap dunia pendidikan;
13. Ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir;



Tabel 3.6
Matriks Analisa Kesenjangan Smart EnvironmentSmart Environment



Strengths

1. Tersedianya SDM (ASN) yg memadai
2. Adanya kemampuan keuangan (APBD)
3. Adanya peraturan perundang undangan (PERDA) dan RPJMD lingkungan hidup
4. Kualitas Udara masih di bawah ambang batas dengan rata-rata kadar No2 mencapai 27,95% danSO2 mencapai 8,52 atau dengan nilai Indeks Kualitas Udara mencaapai 74,30 terbaik ke-3 di provinsi Banten;
5. Telah dikembangkan bank sampah di berbagai Desa dan Kelurahan dan bank sampah regional yang dikelola oleh BUMDes
6. Pemerintah daerah mengembangkan inovasi pengelolaan persampahan Kurangi Sampah KantorKita (Kurasaki);
7. Sumber air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat mencapai 59% bersumber dari air kemasan29,28% dari sumur.
8. Akses terhadap pembuangan akhir tangki atau sistem pengolahan air limbah mencapai 87,38%;



Weaknesses

1. Kesadaran masyarakat terhadap kepedulian lingkungan masih rendah
2. Belum tersedianya sarana sanitasi
3. Belum tersedianya pengolahan sampah akhir yang memenuhi syarat
4. Pengolahan sampah kurang maksimal
5. Penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku usaha yang berpotensi melakukan pencemaran lingkungan seperti komersialisasi TPA, pembuangan Limbah B3 ilegal, dsb. Masih lemahnya harmonisasi dan sosialisasi peraturan perundangan lingkungan hidup, yang berdampak pada rendahnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup;
6. Aksesibilitas Informasi tentang Kualitas Lingkungan Hidup belum akomodatif dan transparan;
7. Fasilitas pelayanan persampahan sebanyak 190 unit dengan kelayakan operasional mencapai 80% menyebabkan pengelolaan sampah belum optimal meningkat;
8. Baru terdapat 14 desa telah melaksanakan pilar pertama dari Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS) dan 6 desa sudah mencapai 90% mencapai Open Defecation Free (ODF) Belum optimalnya Penerapan 3R di tingkat rumah tangga;
9. Keterbatasan Kapasitas Masyarakat dalam pemanfaatan energi alternatif dan pelestarian lingkungan;



Opportunities

1. Adanya IPTEK
2. Adanya Perguruan Tinggi
3. Adanya Stake Holder (perusahaan) Pendukung / CSR perusahaan
4. Masih banyak tersedia lahan yg cukup luas
5. Pemanfaatan Alokasi anggaran Desa (ADD, Bagi Hasil, dan Dana Desa), Dana Kelurahan dan Dana CSR yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) per Desa, Pengelolaan Bank Sampah Desa, dan pemanfaatan energy alternative; Komitmen Pemerintah dalam melaksanakan SDG's didukung pelaksanaan Program sektoral yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup seperti Kebijakan sektoral 100 0 100 (sanitasi, kumuh, air bersih) dan Kota Tanpa Kumuh;
6. Perkembangan Teknologi waste management yang berkembang pesat sehingga sampah adalah komoditi bisnis yang menguntungkan.
7. Pengembangan Laboratorium Lingkungan Hidup dengan Sertifikasi Iso Komisi Akreditasi Nasional bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup;
8. Perkembangan digital yang mendorong IoT yang dimanfaatkan untuk pengembangan sensor lingkungan;



Threats

1. Produksi sampah per hari mencapai 2.300 ton
2. Menurunnya kesehatan masyarakat lingkungan sekitar
3. Pencemaran air sungai
4. Kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin masih menggunakan sistem menumpuk sampah atau open dumping
5. Bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran
6. Alih fungsi lahan pertanian. Penggunaan lahan kering untuk permukiman, perkantoran, dan sungai mencapai 38.371 dari total 59.768 Ha lahan kering dan 36.193 lahan sawah
7. Praktek illegal logging dan/atau pemufataan jahat dalam eksploitasi alam dan pengolahan limbah tanpa berwawasan lingkungan.
8. Mobilitas penduduk yang padat (Rapid Mobility) dari daerah hinterland Medan kawasan metropolitan kota Tangerang
9. dan Jabodetabek ditambah pertumbuhan kendaraan pribadi;

BAB IV

ANALISIS VISI SMART CITY

KABUPATEN TANGERANG

4.1 Analisis Visi Pembangunan Daerah

Masterplan Tangerang Smart City adalah dokumen perencanaan operasional sehingga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024- 2026. Sebagai dokumen perencanaan operasional, maka masterplan Tangerang Smart City selaras dengan perencanaan sektoral lainnya seperti Road Map Sustainable Development Goals (SDG's), Rencana Aksi daerah Hak Asasai Manusia (RanHAM), Rencana Aksi Daerah Pencegahan Korupsi, Roadmap Smart City, Pro Poor Planing, Budgeting, and Monitoring, dan rencana aksi lain dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Masterplan Tangerang Smart city memiliki konsep 6 (enam) dimensi meliputi tata kelola birokrasi (smart governance), pemasaran daerah (smart branding), perekonomian (smart economy), ekosistem permukiman penduduk (smart living), lingkungan masyarakat (smart society), dan pemeliharaan lingkungan (smart environment).

Kerangka pikir Tangerang Smart City terdiri dari merupakan kesinambungan analisa masa depan, kesiapan daerah, dan kesenjangan ataugap yang dirangkai secara komprehensif untuk menunjukkan Smart City Readiness atau kesiapan daerah dalam mengimplementasi-kan konsep smart city. Sebagai bagian arsitektur perencanaan pembangunan maka konsep smartcity menjadi bagian dari perencanaan strategis RPJMD yang memuat isu-isu strategis, kinerja utama, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan staregi serta prioritas program pembangunan. Penelaahan dari arsitektur perencanaan strategis menjadi rumusan visi Tangerang smart city yang kemudian dijabarkandalam strategi dan rencana aksi di 6 (enam) dimensi dimana dimuat program unggulan (quick wins) dan pembagian prioritas pelaksanaan strategi dan rencana aksi pada peta jalan. Sebagai penelaahan terhadap perencanaan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Tangerang 2024-2026 maka memperhatikan Visi dan Sasaran Tangerang Smart City sebagaimana berikut;

“Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju **Masyarakat Madani**”

Pada masa bhakti 2024-2026 mengakomodasi berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan baik dalam konstelasi internasional, nasional, regional maupun regional, mempertimbangkan prioritas programprogram nasional dan kebijakan nasional meliputi pengembangan wilayah, kebijakan pembangunan lintas sektoral, maupun pembangunan inklusif yang melibatkan proses teknokratis dan politis. Pembangunan Tangerang Smart City mengacu Visi Kabupaten Tangerang sebagai semangat untuk merangkul seluruh stakeholder pembangunan. Secara filosofis, visi Kabupaten Tangerang mengandung makna sebagai berikut :

Daya Saing (*Competitive Forces*)

Kemampuan/kekuatan adaptasi terhadap perubahan internal dan eksternal untuk meraih keberhasilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.

Daya Saing Daerah; kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetapterbuka pada persaingan regional, nasional dan global.

Daya saing daerah terkait erat dengan Perkembangan Perekonomian

Daerah, Keterbukaan, Sistem Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam serta Potensi Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat, Kinerja Pemerintahan dan kebijakan Pemerintah, Manajemen dan Ekonomi Makro.

Masyarakat Madani (*Civil Society*)

Merupakan masyarakat yang menjadikan agama (hubungan vertikal dengan Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan horizontal antar sesama manusia dan makhluk hidup lainnya) sebagai tolok ukur kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Madani menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan/persaudaraan / kekeluargaan (egalitarianisme), penghargaan didasarkan kepada prestasi, keterbukaan (inclusivisme) dan partisipasi, adil dan demokratis, merdeka (independent) dari segala "penguasaan" manusia atas manusia lainnya, juga masyarakat yang bebas (freedom) dari pertentangan sosial yang anarkis dan destruktif.

Guna mencapai visi Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2026 maka dirumuskan misi sebagaimana berikut:



1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdayasaing berbasis pada potensi keunggulan lokal.
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional.
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif.
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi dijabarkan berikut :

Sinkronisasi Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kinerja Utama RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2024-2026 dan Dimensi Smart City

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi Smart City					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
1	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggikan berakhlak mulia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Pendidikan	✓			V	V	
				Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan						
2	Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan	Presentase Kontribusi PDRB Sektor Unggulan, PMA, Presentase Daya Saing Produk Unggulan Lokal	✓	✓	✓	V		✓
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja						
			Presentase Penduduk Miskin	Meningkatkan Cakupan Penanganan PPKS	Presentase PPKS Yang Berdaya						

Sinkronisasi Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kinerja Utama RPD Kabupaten Tangerang Tahun -2026 dan Dimensi Smart City

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi Smart City					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
3	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Digitalisasi dan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Nilai SAKIP Nilai Indeks Kemandirian Fiskal Opini BPK Indeks Profesionalitas ASN Indeks SPBE Indeks Pelayanan Publik						

Sinkronisasi Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kinerja Utama RPD Kabupaten Tangerang Tahun -2026 dan Dimensi Smart City

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi Smart City					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
4	Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur Yang Terpadu dan Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur						
					Presentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW						
					Rasio Pemukiman, Perumahan dan Pemakaman Yang Layak	✓		✓	✓	✓	
				Meningkatkan Kualitas Hidup yang Sehat dan Tangguh Terhadap Bencana	Rasio Konektivitas Kabupaten Indeks Resiko Bencana (IRBI)						

4.2 Sasaran Tangerang Smart City

Perumusan sasaran Tangerang Smart City dijabarkan berdasarkan pilar dan sup pilar yang terdiri dari 6 (enam) dimensi meliputi tata kelola birokrasi (smart governance), pemasaran daerah (smart branding), perekonomian (smart economy), ekosistem permukiman penduduk (smart living), lingkungan masyarakat (smart society), dan pemeliharaan lingkungan (smart environment). Perumusan sasaran Tangerang Smart City dijabarkan sebagaimana berikut:

Smart Governance

Sub Pilar Dimensi	Sasaran	Strategi
Pelayanan Publik (Public Service)	Menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dengan berbasis NIK yang terintegrasi dengan semua jenis layanan	G.1. Pengembangan Pelayanan Publik berbasis Satu Data ketunggalan identitas dan spasial
Manajemen Birokrasi yang Efisien (Bureaucracy)	Menguatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendorong pengembangan penerapan system informasi berbasis teknologi sehingga menghasilkan Sistem Birokrasi yang simple elegan dan tepat (SILET) dan Sistem Informasi Administrasi Pengadaan (SIAP)	G.2. Pengembangan Pelayanan Publik berbasis Satu Data ketunggalan identitas dan spasial
Efisien Kebijakan Publik (public Policy)	Menghadirkan pelayanan terintegrasi untuk kebutuhan masyarakat, dunia usaha, ASN serta Aparat terkait layanan pemerintahan melalui satu kali klik dengan OGIS (One GetInformation System)	G.3. Integrasi sistem informasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Smart Branding

Sub Pilar Dimensi	Sasaran	Strategi
Tourism Branding	Menjadikan Kabupaten Tangerang sebagai Destinasi Wisata Bisnis dan Industri Indonesia	B.1. Pengembangan Tangerang Smart Bussines and Tourism Paltform
Bussines Branding	Menghadirkan Kabupaten Tangerang sebagai Poros Investasi Dunia dengan layanan terpadu "Eretan" (efektif, responsif, efisien, transparan, dan kuntabel)	B.2. Peningkatan kemudahan, kesehderhanaan, kepastian, dan ketetapan pelayanan terpadu "Eretan"
City Appearance Branding	Mengembangkan landmark artistik dan memorable dengan citra visual berlandaskan keluhuran nilai budaya Kabupaten Tangerang	B.3. Keterpaduan pembangunan Dekorasi Kota berlandaskan keluhuran nilai budaya Kabupaten Tangerang

Smart Economy

Sub Pilar Dimensi	Sasaran	Strategi
Industri Berdaya Saing (Industry)	Membangun daya saing daerah yang didukung infrakstruktur dinamis berbasis kearifan lokal	Ec.1. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas Daerah
Kesejahteraan Rakyat (Welfare)	Meningkatkan peluang pembangunan usaha dan kesempatan kerja masyarakat berbasis transparansi dan perluasan aksesibilitas informasi	Ec.2. Peningkatan aksesibilitas dunia kerja serta penguatan pemberdayaan masyarakat secara inklusif
Transaksi Keuangan (Transaction)	Meningkatkan aksesibilitas bagi pelaku usaha didukung skema pembiayaan yang terintegrasi perbankan serta menjaga stabilitas, nilai tambah, dan perekonomian yang berkelanjutan	Ec.3. Perluasan pembiayaan usaha

Smart Living

SubPilarDimensi	Sasaran	Strategi
Harmonisasi Tata Ruang (Harmony)	Mewujudkan keharmonisan pembangunan dalam pemanfaatan ruang guna menciptakan livable city atau kotalayang huni	L.1. Pengendalian Pembangunan berbasis harmonisasi Penataan Ruang
Prasarana Kesehatan (Health)	Mewujudkan Green Hospital didukung pelayanan kesehatan yang inklusif	L.2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan preventif, promotif, dan kuratif
Ketersediaan Saranan Transportasi (Mobility)	Menhadirkan transportasi publik yang ramah, nyaman dan efisien untuk menunjang konektivitas daerah	L.3. Pengembangan Tangerang Smart Mobility Intra City dengan prioritas keramahan pelayanan, kenyamanan fasilitas, dan efisiensi

Smart Society

SubPilar Dimensi	Sasaran	Strategi
Interaksi Masyarakat yang Efisien (Community)	Membangun kemitraan antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, serta lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat	S.1. Peningkatan kemitraan kerjasama lintas sektoral dalam membangun komunitas Cerdas
Ekosistem Belajar yang Efisien (Learning)	Meningkatkan ketereampilan dan kemandirian masyarakat melalui penguatan layanan pendidikan terintegrasi	S.2. Pengembangan layanan pendidikan terintegrasi berbasis infrastruktur dan suprastruktur pendidikan
Sistem Keamanan Masyarakat (Security)	Menguatkan aksesibilitas layanan masyarakat terpadu	S.3. Pengembangan Layanan Tangerang Call Center

Smart Environment

SubPilar Dimensi	Sasaran	Strategi
Program Proteksi Lingkungan (Protection)	Menguatkan penegakan hukum dalam perlindungan lingkunganhidup	En.1. Penguatan pengawasandan pengendalian pencemaran lingkungan secara terpadu
Tata Kelola Sampah dan Limbah	Meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah serta limbahrumah tangga dan industri	En.2. Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah danlimbah berbasis Reduce, Reuse, Recycle, Replace
Tata Kelola Energy	Meningkatkan efesiensi pemanfaatan energi melalui transformasi teknologi dan pengembangan sumber daya energi melalui komoditas sampahorganik (waste to energy)	En.3. Pengembangan energi alternatif berbasis pengembangan sumber daya energi melalui komoditas sampah organik (waste to energy)

2

Masterplan Smart City Kabupaten Tangerang



2025-2026

**“Kabupaten Tangerang Berdaya
Saing Menuju Masyarakat Madani”**



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tangerang**

KEYNOTE SPEECH BUPATI TANGERANG

Dalam Buku 2 Masterplan Smart City Kabupaten Tangerang 2025-2026, kami ingin menyoroti pendekatan Smart City sebagai konsep yang sangat relevan dan mendesak dalam pembangunan Kabupaten Tangerang. Buku ini mengeksplorasi visi dan strategi kami untuk menghadirkan konsep Smart City yang holistik, mencakup pelayanan publik, infrastruktur teknologi informasi, dan komunikasi yang mendukung aspek kehidupan, sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kota.

Dalam era kompetisi global yang menuntut kecepatan dan efektivitas pelayanan, kami percaya bahwa penerapan Smart City menjadi suatu keharusan. Gerakan Mewujudkan 100 Smart City, yang diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, memiliki tujuan yang sangat sejalan dengan visi kami. Kabupaten Tangerang, sebagai entitas yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, telah secara aktif mengembangkan visi, strategi, dan prioritas unik Smart City.

Kami mengakui bahwa pengembangan Smart City tidak hanya mengenai adopsi teknologi, melainkan juga tentang inovasi dan terobosan untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi prioritas serta pengembangan sektor unggulan di wilayah kami. Semua upaya ini didasarkan pada data yang terintegrasi dan kerja sama lintas sektor. Lebih penting lagi, kami yakin bahwa konsep Smart City harus menciptakan masyarakat yang cerdas dan beradab.

Langkah selanjutnya yang akan kami ambil adalah menyusun Surat Keputusan Bupati mengenai Pembentukan Dewan Smart City Kabupaten Tangerang dan Pembentukan Tim Pelaksana Smart City Kabupaten Tangerang. Dewan Smart City Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan pemimpin pemerintahan, tokoh masyarakat, ahli dari perguruan tinggi, LSM, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di Kabupaten Tangerang, memiliki tanggung jawab merumuskan visi, misi, dan kerangka strategis pembangunan Smart City.

Tim Pelaksana Smart City Kabupaten Tangerang, yang terdiri dari para pelaksana teknis dengan kemampuan teknis di bidang tugas mereka masing-masing, akan mengimplementasikan konsep Smart City yang telah ditetapkan oleh Dewan Smart City. Semua ini diarahkan untuk mencapai tujuan Buku 2, yaitu mewujudkan visi dan strategi Smart City kami.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Buku 2 Masterplan Smart City Kabupaten Tangerang 2025- 2026. Kepala dan Staf Bappeda Kabupaten Tangerang, Kepala

dan Staf Dinas Kominfo, tokoh masyarakat, dan tim konsultan, semuanya telah berkolaborasi dengan baik, menghasilkan buku yang menjadi panduan utama dalam pembangunan Kabupaten Tangerang.

Semoga Buku Revisi Masterplan Smart City Kabupaten Tangerang ini tidak hanya sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026 Kabupaten Tangerang, tetapi juga menjadi instrumen kunci untuk mencapai visi dan misi pembangunan yang berkelanjutan. Kami berharap bahwa melalui upaya membangun Smart City ini, Kabupaten Tangerang akan tumbuh menjadi daerah yang tak hanya kompetitif, tetapi juga kaya akan inovasi dan praktik layanan publik yang cerdas. Terima kasih.

DAFTAR ISI

KEYNOTE SPEECH BUPATI TANGERANG.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perkembangan Smart City di Indonesia	3
1.3 Masterplan Smart City.....	7
1.4 Maksud Dan Tujuan Masterplan Smart City Kabupaten Tangerang	7
1.5 Landasan Hukum	8
1.6 Ketentuan Umum	10
1.7 Kerangka Pikir Smart City	11
BAB II ANALISIS VISI SMART CITY KABUPATEN TANGERANG	17
2.1 Analisis Visi Pembangunan Daerah.....	21
BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY KABUPATEN TANGERAN. 19	
Implementasi Smart City dengan Menggunakan Teknologi AI Dalam Mengatasi Permasalahan Kabupaten Tangerang	28
BAB IV RENCANA AKSI SMART CITY KABUPATEN TANGERANG.....	31
4.1 Aksi Kesiapan Implementasi Kabupaten Tangerang Smart City	33
4.2 Rencanaa Aksi Program Kerja Kabupaten Tangerang Smart City	36
Sinkronisasi Komponen Masterplan Smart City Kabupaten Tangerang Terhadap	
ISO 37122	55
BAB V PETA JALAN SMART CITY KABUPATEN TANGERANG.....	56
BAB VI QUICK WINS.....	95
6.1 Pedoman Quick Wins	95
6.2 Program Quick Wins Smart City	97
BAB VII PENUTUP.....	102

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan persaingan global telah mengalami pergeseran dari fokus pada meningkatkan daya saing nasional atau negara menjadi fokus pada daya saing kota atau daerah. Kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Denpasar, Makassar, dan lainnya kini bersaing dengan kota-kota seperti Singapura, Kuala Lumpur, Johor Bahru, Osaka, Seoul, Tokyo, Mumbai, dan lainnya untuk menjadi tujuan utama masyarakat global dalam hal investasi, perdagangan, pariwisata, kerjasama, dan lain sebagainya. Sementara itu, masyarakat di berbagai daerah semakin menuntut agar lingkungan tempat tinggal mereka menjadi lebih baik, inovatif, dan berkelanjutan. Kemampuan sebuah kota atau lingkungan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, kesehatan, kemudahan, dan kemakmuran telah menjadi indikator penting dalam menilai daya saing kota tersebut.

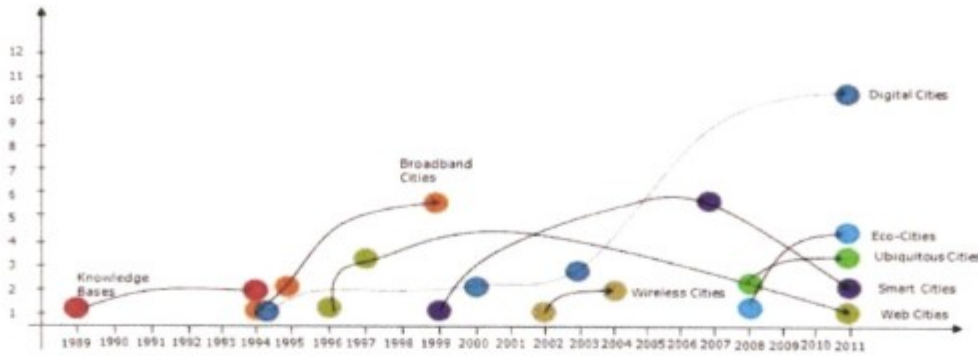
Pada saat yang sama, pergeseran besar dalam dunia digital telah mengubah cara kita hidup dan masa depan peradaban manusia. Gerd Leonhard menggambarkan bahwa proses digitalisasi telah membawa perubahan yang tidak hanya cepat namun juga kompleks. Hal ini membawa kita menuju masa depan di mana perubahan yang akan terjadi dalam dua dekade ke depan akan melampaui perubahan yang terjadi selama tiga ratus tahun terakhir. Salah satu contoh perubahan yang dapat kita lihat adalah percepatan dalam proses urbanisasi di seluruh dunia. Pada tahun 2014, sebuah penelitian dari PBB tentang perkembangan urbanisasi menunjukkan bahwa, untuk pertama kalinya dalam sejarah, lebih dari separuh populasi manusia (54%) tinggal di wilayah perkotaan. Pada tahun 1950, hanya 30% dari populasi dunia yang tinggal di perkotaan. Proses urbanisasi ini diperkirakan akan terus berlanjut, dan pada tahun 2050, diperkirakan sekitar 66% dari seluruh populasi dunia akan tinggal di perkotaan. Di Indonesia, pada tahun 2015, sekitar 53,3% penduduk tinggal di perkotaan (BPS RI), dan menurut penelitian oleh Citiasia Center for Smartnation (CCSN), jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 68% pada tahun 2035. Digitalisasi juga telah memperluas arti dari urbanisasi itu sendiri. Terminologi urbanisasi lahir pertama kali pada masa revolusi industri, ketika kehidupan berubah dari pola ekonomi pertanian ke pola ekonomi industri (manufaktur). Warga desa berbondong-bondong berpindah ke kota untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja di pabrik-pabrik sebagai kesempatan baru yang muncul terutama akibat ditemukannya konsep mesin uap, mekanisasi, dan elektrifikasi. Pada masa ini batasbatas dimensi fisik sangat jelas terlihat. Hal ini sangat kontras dengan apa yang terjadi pada masa kini, dalam dunia digital batasbatas dimensi fisik begitu samar atau bahkan pada kasus-kasus tertentu batasbatas dimensi fisik ini benar-benar tidak ada. Artinya urbanisasi tidak bisa lagi dimanifestasikan sebagai migrasi fisik semata, melainkan juga migrasi gaya hidup dan interaksi socio-cultural masyarakat dari pola-pola bersifat rural ke pola yang bersifat urban. Masyarakat urban merupakan sebuah sistem kompleks dimana aktoraktor penyusunnya yaitu manusia, teknologi, dan lingkungan saling terhubung dan mempengaruhi. Lahir dan berkembangnya pusat-pusat masyarakat yang bersifat urban akan selalu menghadirkan tantangan-tantangan baru seperti kemiskinan, kemacetan, kesenjangan sosial, kriminalitas, berkurangnya sumber daya alam, polusi, masalah kesehatan dan tantangan-tantangan lainnya. Untuk menyelesaikan

tantangan dan persoalan perkotaan tersebut diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien. Pembangunan berbasis Smart City telah menjadi tren pembangunan kota atau daerah di dunia dan menjadi keniscayaan yang harus diadaptasi daerah atau kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Pembangunan Smart City tidak sekedar mengedepankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) namun juga bagaimana membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung atau enabler.

Tren gerakan pembangunan kota atau daerah berbasis Smart City bisa kita saksikan di berbagai belahan dunia seperti Barcelona, Tokyo, London, Berlin, Amsterdam, Melbourne, Seoul, Shanghai, Mumbai, Singapura dan lain- lain. Di setiap kota di berbagai belahan dunia tersebut memiliki kisah sukses pembangunan Smart City yang berbeda-beda sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh setiap kota. Di Korea, sebuah kawasan reklamasi seluas 600 hektar dibangun dari nol sebagai sebuah Smart City, di Dubai menjadikan Masdar sebagai Kota yang membangun program kemandirian energi dengan energi surya dan terbarukan serta bertekad menjadi kota yang bebas emisi karbon, Amsterdam fokus pada pembangunan Smart People, Smart Energy, dan Smart Waste Management. Di Singapura, pembangunan Smart City langsung dikendalikan dibawah Prime Minister Office sebagai sebuah program untuk warga, pebisnis, dan pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dengan memanfaatkan teknologi, ide, aplikasi, dan big data.

'Kota Cerdas' bertujuan untuk mengurangi tantangan yang dihadapi kota-kota, seperti kelangkaan sumber daya energi, layanan kesehatan, perumahan, air, dan infrastruktur yang memburuk (jalan, sekolah, dan transportasi). Mereka juga menderita ketidakstabilan harga, perubahan iklim, dan permintaan untuk peluang ekonomi dan manfaat sosial yang lebih baik (Washburn et al. 2010). Kemajuan terbaru dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), selaras dengan pengurangan biaya teknologi, seperti aplikasi seluler murah, media sosial gratis, komputasi awan, dan cara hemat biaya untuk menangani data volume tinggi, memberi kota peluang dan alat yang lebih baik untuk memahami, berkomunikasi, dan memprediksi fungsi perkotaan (Susanne Dirks dan Mary Keeling 2009; Berst et al. 2013). Dalam konteks ini, proyek Kota Cerdas dan Kota Cerdas dipandang sebagai pendekatan holistik untuk perencanaan kota (Roberto Requena et.al., 2014). Shah (2015) tentang Program 100 Kota Pintar Pemerintah India mengatakan ini adalah tentang membuat kota lebih baik dan dia menekankan perlunya melompat ke arah membawa kota ke tingkat di mana mereka memberikan kualitas hidup yang dituntut masyarakat, yang diharapkan oleh kaum muda dan yang apakah semua orang benar. Himmel et al. (2014) menyimpulkan dengan kebutuhan untuk memahami tantangan perkotaan saat ini oleh para pemuda, yang merupakan 25 persen dari populasi dunia saat ini dan 28 persen (UNFPA 2015) dalam kasus India dan secara aktif berpartisipasi dalam keterlibatan sipil.



Gambar 1.1 Evolusi Pendekatan Smart City
Sumber: Anthopoulos & Fitsilis 2013

Dalam Anthopoulos & Fitsilis (2013) disajikan peta jalan untuk Kota Cerdas. Berdasarkan penelitian ini, terbukti bahwa Smart Cities telah muncul selama 20 tahun terakhir dari bentuk web awal mereka ke status modern di mana-mana dan ramah lingkungan dan dianggap sebagai lingkungan e- Government yang menguntungkan. Garis waktu yang disajikan di bawah ini menunjukkan adanya berbagai pendekatan alternatif untuk Smart City. Peta jalan dalam kasus ini digambarkan melalui metode pemetaan jalan teknologi untuk memahami tren terkini dalam evolusi Kota Cerdas dan untuk membenarkan pendekatan alternatif. Peta jalan ini disusun berdasarkan perangkat layanan elektronik yang ditawarkan oleh Smart Cities dan bisa menjadi alat yang berguna untuk badan-badan lokal perkotaan (ULB). Dari analisis berbagai pendekatan untuk Kota Cerdas ini, dapat dipahami bahwa faktor teknologi merupakan penentu utama bagi kelangsungan Kota Cerdas. Hal ini juga menimbulkan masalah indeks kelayakan dalam mengukur keberlanjutan Kota Cerdas.

Namun perlu dipahami bahwa konsep Smart City adalah konsep yang unik dan dinamis. Inisiasi-inisiasi yang muncul sebagai solusi akan permasalahan kota yang satu tidak serta merta bisa diaplikasikan sebagai solusi akan permasalahan yang muncul di kota yang lain. Hal ini terjadi karena Smart City menekankan pentingnya sebuah inovasi untuk menyelesaikan persoalan masing-masing kota dengan memanfaatkan teknologi TIK, sensor, dan data analytic sebagai faktor pendukung untuk mempermudah penyelesaian masalah (enabling factor). Pembangunan berbasis Smart City menyediakan ruang inovasi yang luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, masyarakat, pelaku bisnis, dunia pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) lain. Jadi inisiasi Smart City yang muncul bukanlah solusi mutlak yang menutup pintu inovasi dan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu diperlukan adanya panduan agar pemerintah kabupaten dan kota mampu mempersiapkan dan mengimplementasikan konsep Smart City dengan baik sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki.

1.2 Perkembangan Smart City di Indonesia

Di tengah-tengah cepatnya laju perkembangan teknologi, berbagai kota di seluruh penjuru dunia berlomba-lomba untuk menjadi yang tercepat dan terbaik dalam implementasi Smart City. Tentu saja yang menjadi tujuan utama adalah untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan dan mendukung peningkatan kualitas hidup warga, namun lebih jauh kotakota tersebut juga terus bersaing demi menyandang predikat atau penghargaan sebagai Smart City atau Kota Pintar.

Integrasi teknologi dalam tata kelola kota untuk mewujudkan Smart City dimungkinkan berkat keberadaan internet of things, yaitu jaringan perangkat elektronik yang saling terhubung dan mampu mengirim data ataupun melakukan tindak lanjut dengan campur tangan manusia yang minimal. Peran internet of things (IoT) dalam mewujudkan konsep smart city sangatlah vital. Perangkat IoT mampu mengirim informasi dan melakukan tindak lanjut melalui jaringan dengan campur tangan manusia yang minimal, sehingga mampu melakukan beragam fungsi secara otomatis. Sedangkan operasional perangkat IoT hanya memerlukan tiga elemen utama, yakni Perangkat fisik, Jaringan internet, dan Aplikasi.



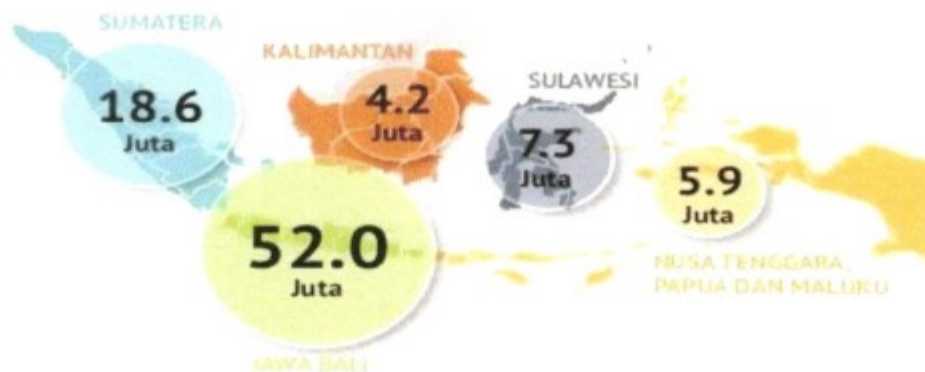
Gambar 1.2 Elemen IoT

IESE pada tahun 2016 merilis Cities in Motion Index yang mengukur implementasi Smart City berbagai kota di dunia secara menyeluruh berdasarkan 77 indikator yang mencakup 10 dimensi dalam tata kelola perkotaan diantaranya: ekonomi, teknologi, sumber daya manusia, kohesi sosial, jangkauan internasional, lingkungan, mobilitas dan transportasi, perencanaan perkotaan, manajemen publik serta tata kelola pemerintahan. Hasilnya kota-kota besar dunia seperti New York (USA), London (Inggris), Paris (Perancis), San Francisco (USA), Boston (USA), Amsterdam (Belanda), Chicago (USA), Seoul (Korea Selatan), Geneva (Swiss), Sydney (Australia), Copenhagen (Denmark) dan Tokyo (Jepang) tampil sebagai jawara sebagai kota-kota terpintar di dunia. Sebagai gambaran di regional Asean Singapura menjadi yang terbaik di peringkat 22, Kota Bangkok (Thailand) berada di peringkat 84, Kuala Lumpur (Malaysia) di peringkat 88 sedangkan Jakarta (Indonesia) jauh tertinggal di peringkat 170.

Dalam proses transformasi menuju Smart City, pemanfaatan TIK memiliki peran yang sangat penting. AT Kearney dalam laporan bertajuk The Asean Digital Revolution menyebutkan bahwa investasi sektor TIK di Asean pada tahun 2014 telah mencapai angka US\$ 100 Juta dan akan terus meningkat sebesar 15% per tahun. Di Indonesia sendiri angka investasi di bidang TIK diproyeksikan akan mencapai angka US\$ 150 juta dalam tiga tahun kedepan. Informasi ini merupakan kabar yang menggembirakan mengingat fakta bahwa penetrasi teknologi Indonesia sangat jauh tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya.

Dalam pemanfaatan internet, Poulasi penduduk Indonesia saat ini mencapai 262 juta orang. Lebih dari 50 persen atau sekitar 143 juta orang telah terhubung jaringan internet sepanjang 2017, menurut laporan teranyar Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Mayoritas pengguna internet sebanyak 72,41 persen masih dari kalangan masyarakat urban. Pemanfaatannya sudah lebih jauh, bukan hanya untuk berkomunikasi tetapi juga membeli barang, memesan transportasi, hingga berbisnis dan berkarya. Berdasarkan wilayah geografisnya, masyarakat

Jawa paling banyak terpapar internet yakni 57,70 persen. Selanjutnya Sumatera 19,09 persen, Kalimantan 7,97 persen, Sulawesi 6,73 persen, Bali-Nusa 5,63 persen, dan Maluku-Papua 2,49 persen.



Gambar 1.3 Pengguna Internet di Indonesia

Price Waterhouse Coopers pada tahun 2015 merilis peringkat kesiapan teknologi (Ranking of Technological Readiness) negara-negara di ASEAN untuk mengimplementasikan Smart City, hasilnya negara di ASEAN yang secara teknologi paling siap untuk mengimplementasikan Smart City berturut-turut adalah Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, Vietnam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos dan Myanmar. Tampaknya banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dalam proses implementasi dan pengembangan Smart City di Indonesia. Jalan yang harus ditempuh masih sangat panjang dan tantangan yang harus dihadapi pun tidaklah ringan. Namun terlepas dari itu semua, proses implementasi Smart City di Indonesia secara konsisten dan bertahap terus digalakkan di berbagai kota di Indonesia. Arah implementasinya juga semakin jelas dengan adanya komitmen dan dorongan dari pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Sebagai bentuk dukungannya pemerintah terhadap pengembangan Smart City di Indonesia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bekerja sama dengan Kemendagri, Kementerian PAN & RB, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PU & PR, Kantor Staf Presiden menginisiasi penyelenggaraan Gerakan Menuju 100 Smart City. Pada tahun 2018 terpilih 25 kota/kabupaten yang akan didampingi dan dibimbing oleh para ahli dalam mengimplementasikan konsep Smart City. Program ini menargetkan pada tahun 2019 sebanyak 100 kota/kabupaten di Indonesia yang telah melaksanakan pembangunan Smart City dan menjadi rolemodel bagi daerah lain di Indonesia.

Tren Smart City juga disambut baik oleh berbagai daerah di Indonesia. Pembentukan UPT (Unit Pelaksana Teknis) Smart City adalah bentuk komitmen pemerintah DKI Jakarta dalam mengimplementasikan Smart City. Program-program unggulan unit ini diantaranya pembentukan portal Smart City yang bisa diakses di smartcity.jakarta.go.id, peningkatan partisipasi masyarakat melalui aplikasi Qlue, situs kinerja.jakarta.go.id, dan layanan SMS. Komitmen yang sama juga ditunjukkan oleh Kota Bandung diantaranya melalui program pembentukan Dewan Pengembangan Bandung Smart City dan pencaanangan visi Bandung Technopolis serta Kota Surabaya diantaranya melalui program Gateway for Short Message (Gessy), Sistem Close Circuit TV(CCTV) dan Redesign Web Surabaya.go.id. Jauh dari hingar-bingar pemberitaan media dan perhatian massa kemajuan dalam pengembangan Smart City juga ditunjukkan oleh kota/kabupaten menengah dan kecil. Pada tahun 2012 Kota Pekalongan menduduki peringkat pertama PEGI (pemeringkatan e-gov) kabupaten/kota se-jawa tengah. Pekalongan juga menjadi kota percontohan penerapan e-

gov berbasis Free and Open-Source Software (FOSS) oleh Kemenristek. Inisiasi yang berbeda ditempuh oleh Tomohon dan Banyuwangi, berangkat dari kesadaran akan potensi alamnya Tomohon memulai pengembangan daerah dengan program unggulan Tomohon Flower Festival. Sedangkan Banyuwangi membangun daerahnya dengan program unggulan seperti International Kite Boarding, Banyuwangi Ethno Carnival dan pengoperasian konsep green airport. Disini bisa dipahami bahwa konsep Smart City diimplementasikan bukan untuk mempersempit ruang inovasi dan eksplorasi, Smart City harus dipahami sebagai disiplin yang luas, berangkat dari tantangan dan potensi yang dimiliki setiap daerah bisa menentukan inovasi dan program prioritas masing-masing.

Gerakan pembangunan Smart City di Indonesia juga semakin semarak dengan munculnya lembaga-lembaga pengukuran dan pemeringkatan kinerja Smart City nasional. Indeks Daerah Pintar merupakan sebuah studi pengukuran dan pemeringkatan daerah-daerah di Indonesia yang dilakukan oleh Citiasia Center for Smart Nation (CCSN) terhadap 98 kota, 412 kabupaten, dan 34 provinsi di Indonesia. Pemeringkatan ini mengevaluasi Kesiapan Daerah dalam Smart City dan Kinerja Smart City Daerah terhadap 6 elemen yaitu governance, branding, economy, living, society, dan environment. Daerah dengan hasil terbaik kemudian diapresiasi dalam acara tahunan Indonesia Smart Nation Award (ISNA). Pengukuran Indeks Smart City juga dilakukan oleh harian Kompas bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) melalui Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI). Daerah dengan indeks terbaik kemudian diapresiasi melalui acara Anugerah Kota Cerdas yang memberikan penghargaan untuk Smart City dari tiga kategori, yaitu kategori ekonomi, kategori sosial, dan kategori lingkungan hidup.

Gerakan Menuju 100 Smart City yang dicanangkan oleh Kementerian Kominfo bertujuan untuk mendorong Kota dan Kabupaten di Indonesia melakukan akselerasi pembangunan dengan menggunakan konsep Smart City atau Daerah Pintar. Mulai dari penyusunan Masterplan Smart City, merencanakan dan melaksanakan program “Quick Win” Smart City dan melaksanakan roadmap atau peta jalan pembangunan Smart City dalam 5 hingga 10 tahun.

Pada tahun 2018, Gerakan Menuju 100 Smart City memilih 25 Kota dan Kabupaten berdasarkan assessment yang dilakukan oleh tim ahli dari berbagai kalangan yang ditunjuk oleh Kemkominfo. Kementerian Kominfo akan memfasilitasi 25 Daerah tersebut dengan menyediakan tenaga ahli pendamping untuk mendampingi daerah dalam menyusun Masterplan Smart City dan merencanakan dan melaksanakan program “Quick Win” Smart City. Kementerian Kominfo mengharapkan Masterplan Smart City tersebut akan menjadi panduan daerah dalam melakukan implementasi pembangunan berbasis Smart City dalam jangka waktu 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun kedepan yang akan di review setelah 5 (lima) tahun pertama dilaksanakan.

Kementerian Kominfo akan melanjutkan program pendampingan di tahun 2018 terhadap 75 Kota dan Kabupaten melalui proses yang sama seperti yang telah dilakukan di tahun 2018. Program Gerakan Menuju 100 Smart City ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi Kota dan Kabupaten diluar 100 Kota dan Kabupaten yang terpilih oleh Kominfo melalui inisiatif daerah masing-masing. Dengan demikian membangun Smart City tidak hanya terhenti di 100 Kota dan Kabupaten tersebut, namun juga akan meliputi seluruh Kota dan Kabupaten di Indonesia yang pada akhirnya akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai Smart Nation.

1.3 Masterplan Smart City

Proses pembangunan Smart City merupakan usaha yang memerlukan waktu dan tidak seketika. Diperlukan komitmen dan perencanaan yang matang serta menyeluruh. Pada tahap-tahap tertentu, usaha pembangunan Smart City juga perlu melibatkan semua pihak di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, baik dari pihak warga, pemerintah maupun swasta. Selain untuk mewujudkan terciptanya sinkronisasi, hal ini juga dimaksudkan untuk menyamakan (alignment) pemahaman akan visi, misi, dan mempertemukan kepentingan yang berbeda dari setiap pihak serta menumbuhkan rasa kepemilikan (sense of belonging) atas rencana pembangunan Smart City yang diinisiasi. Dengan kata lain pembangunan Smart City merupakan usaha yang kontinu, bertahap, dan bersifat multi sektoral oleh karena itu diperlukan sebuah perencanaan berjangka waktu dan terintegrasi yang dituangkan dalam bentuk dokumen masterplan Smart City.

Pada dasarnya konsep Smart City berfokus pada pengembangan elemen manusia melalui pemanfaatan teknologi. Jadi melalui teknologi setiap elemen didorong untuk berpikir kreatif dan aktif dalam melahirkan inovasi- inovasi demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, sehat, nyaman, dan aman. Masterplan Smart City hadir sebagai wadah berbagai inovasi yang muncul dari proses berpikir kreatif dan identifikasi aktif. Masterplan Smart City memungkinkan setiap ide dapat terakomodasi ataupun memperkaya ide yang lainnya. Masterplan Smart City juga memastikan bahwa suatu ide tidak akan berdiri sendiri melainkan akan menjadi bagian dari suatu rencana implementasi yang terintegrasi dan komprehensif. Masterplan Smart City berperan vital sebagai landasan materi dan panduan pembangunan konsep kota masa kini dan masa depan. 12 Masterplan ini berperan besar dalam membantu pemerintah menetapkan kebijakan, regulasi, dan arah serta prioritas pembangunan kota. Sebagai perencanaan yang disusun secara khusus berdasarkan visi, identitas dan karakter kota, masterplan Smart City mempermudah pemerintah dalam mengurai masalah khas perkotaan.

Masterplan Smart City juga memastikan proses transformasi menuju konsep kota cerdas baik itu pada tahap perencanaan, implementasi, maupun monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan hasil yang diharapkan. Sehingga sebuah masterplan Smart City haruslah memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dengan karakter dan kebutuhan spesifik daerah
2. Berpeluang untuk berhasil dilaksanakan yang maksimal
3. Obyektif, tepat sasaran, dan tepat guna
4. Berkesinambungan dalam menjaga keseimbangan kebutuhan ekonomi, social, dan lingkungan
5. Dapat secara nyata diimplementasikan sesuai dengan kemampuan daerah

1.4 Maksud Dan Tujuan Masterplan Smart City Kabupaten Tangerang

Penyusunan Masterplan Smart City ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pemerintah Kabupaten Tangerang, serta pihak lain yang terlibat dalam proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi pengembangan Smart City Kabupaten Tangerang. Tujuan umum perumusan masterplan Tangerang Smart City adalah untuk menjadi pedoman dalam pengembangan 6 (enam) dimensi Smart City meliputi tata kelola birokrasi (smart governance), pemasaran daerah (smart branding), perekonomian (smart economy), ekosistem permukiman penduduk (smart living), lingkungan masyarakat (smart society), dan pemeliharaan lingkungan

(smart environment) pada tahun 2025- 2026. Adapun tujuan teknis perumusan masterplan Tangerang Smart City secara khusus meliputi:

1. Masterplan Tangerang Smart City adalah dokumen perencanaan operasional pengembangan Smart City yang merupakan penjabaran dari merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang 2025- 2026;
2. Masterplan Tangerang Smart City selaras dan memiliki kesinambungan dengan dokumen perencanaan sektoral lainnya sesuai dengan urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
3. Masterplan Tangerang Smart City menjadi pedoman dalam perumusan visi Smart City, Quick Wins, Peta Jalan, dan menentukan strategi serta rencana aksi Smart City di 6 dimensi periode Tahun 2025-2026.
4. Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pengembangan Smart City di tingkat pusat dan Kabupaten Tangerang;
5. Menyediakan landasan materi dan implementasi praktis rencana pengembangan Kabupaten Tangerang berdasarkan konsep Smart City;
6. Menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan nasional dan daerah dalam dokumen perencanaan Smart City Kabupaten Tangerang;
7. Mendorong proses pengembangan Smart City yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.
8. Terlaksananya program pembangunan Smart City di Kabupaten Tangerang sesuai dengan Masterplan yang telah disusun termasuk program Quick Win dalam 1 tahun ke depan.

Membantu pemerintah Kabupaten Tangerang dalam tata pamong (governance) dan tata kelola (manajemen) pengembangan Smart City sehingga dapat berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan.

1.5 Landasan Hukum

Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan penyusunan Master Plan Smart City, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
4. Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

16. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
18. Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
19. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
30. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
31. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
33. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Smart City Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
 39. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
 40. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2031;
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang 2025- 2026.
 43. Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 Smart City di Indonesia.
 44. SK Bupati Tangerang tentang Pembentukan Dewan Smart City Pemerintah Kabupaten Tangerang.
 45. SK Bupati Tangerang Pembentukan Tim Pelaksana Smart City di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 47. Standard SNI ISO 37122:2019 mengenai "Kota dan Komunitas Berkelanjutan – Indikator untuk Kota Cerdas"

1.6 Ketentuan Umum

- a. Smart City atau Smart Region atau Daerah/Kota/kabupaten pintar adalah konsep pengelolaan kota/kabupaten berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi, dan melibatkan partisipasi masyarakat.
- b. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- d. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- e. Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RPD, merupakan dokumen perencanaan kabupaten Tangerang untuk

- periode 2025-2026.
- f. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
 - g. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 - h. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 - i. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 - j. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
 - k. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
 - l. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
 - m. Arah kebijakan merupakan penjabaran misi dan memuat strategi yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah dalam rangka mencapai sasaran yaitu perubahan kondisi sosial masyarakat yang ingin dicapai.
 - n. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
 - o. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian untuk pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
 - p. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
 - q. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

1.7 Kerangka Pikir Smart City

Kerangka pikir (frameworks) Smart City atau Daerah Pintar telah dikembangkan oleh banyak pakar dan akademisi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa lembaga seperti Smart Cities Council, CISCO, Uni Eropa, dan IEEE telah mengembangkan kerangka pikir terhadap pembangunan Smart City. Selain lembaga-lembaga tersebut terdapat kerangka pikir yang dikembangkan oleh lembaga think tank dalam negeri dimana kerangka pikir yang dikembangkan tersebut telah disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Istilah smart dalam bahasa Indonesia disebut dengan “pintar”, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “pandai; cakap”, “cerdik; banyak akal”, dan “mahir (melakukan atau mengerjakan sesuatu)” atau “cerdas” yang diartikan sebagai “sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya); tajam pikiran” dan “sempurna pertumbuhan tubuhnya (sehat, kuat)”. Kata “Kota Pintar” dipilih

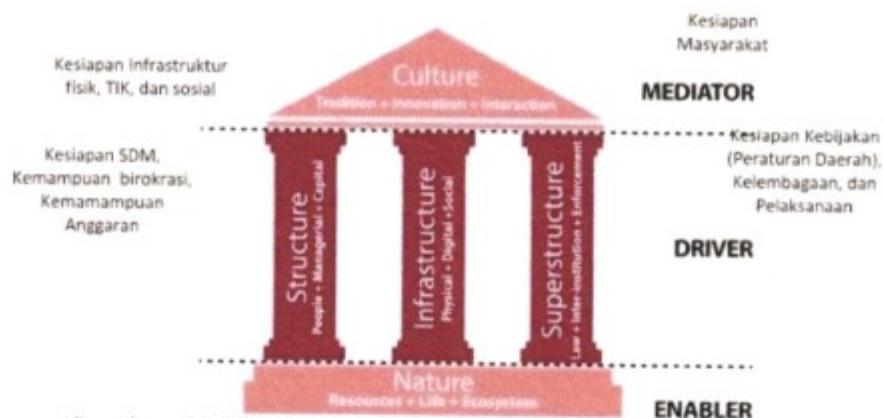
untuk menunjukkan pengertian yang lebih luas dari kata cerdas atau “intelligent”. Namun demikian penggunaan kata “Kota Cerdas” juga diperkenankan jika ada daerah yang memilih menggunakan istilah tersebut.

Dalam membangun Smart City, terlebih dahulu suatu kota/kabupaten harus memiliki Kesiapan Daerah Pintar atau Smart City Readiness. Terdapat beberapa elemen utama dalam kesiapan daerah pintar, yaitu potensi alam (nature); struktur daerah (structure); infrastruktur (infrastructure); suprastruktur (superstructure); dan budaya (culture). Untuk keperluan penyusunan Masterplan ini, kajian Smart City Readiness difokuskan kepada 3 elemen saja yaitu Struktur, Infrastruktur, dan Suprastruktur. Ilustrasi elemen kesiapan daerah pintar tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.4.

- Struktur; pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana (people) dan penerima manfaat Smart City, penyiapan sumber daya anggaran, dan sumber daya tata kelola dan tata pamong;
- Infrastruktur; pembangunan infrastruktur pendukung Smart City yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau TIK, dan infrastruktur social untuk kepentingan umum;
- Suprastruktur; penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-laksana pelaksanaan pembangunan Smart City.

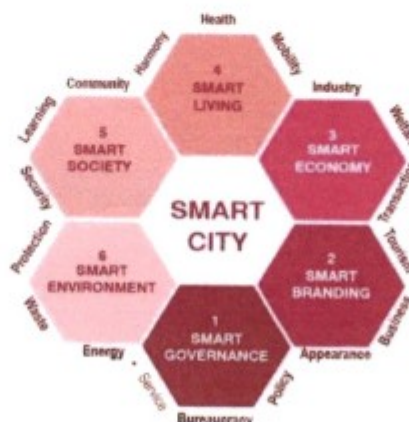
Menurut CCNS (Citiasia Center for Smart Nation) Kerangka berpikir dalam pengembangan Smart City adalah sebagai berikut :

Bagaimana Membangun Kesiapan Menjadi Smart City?



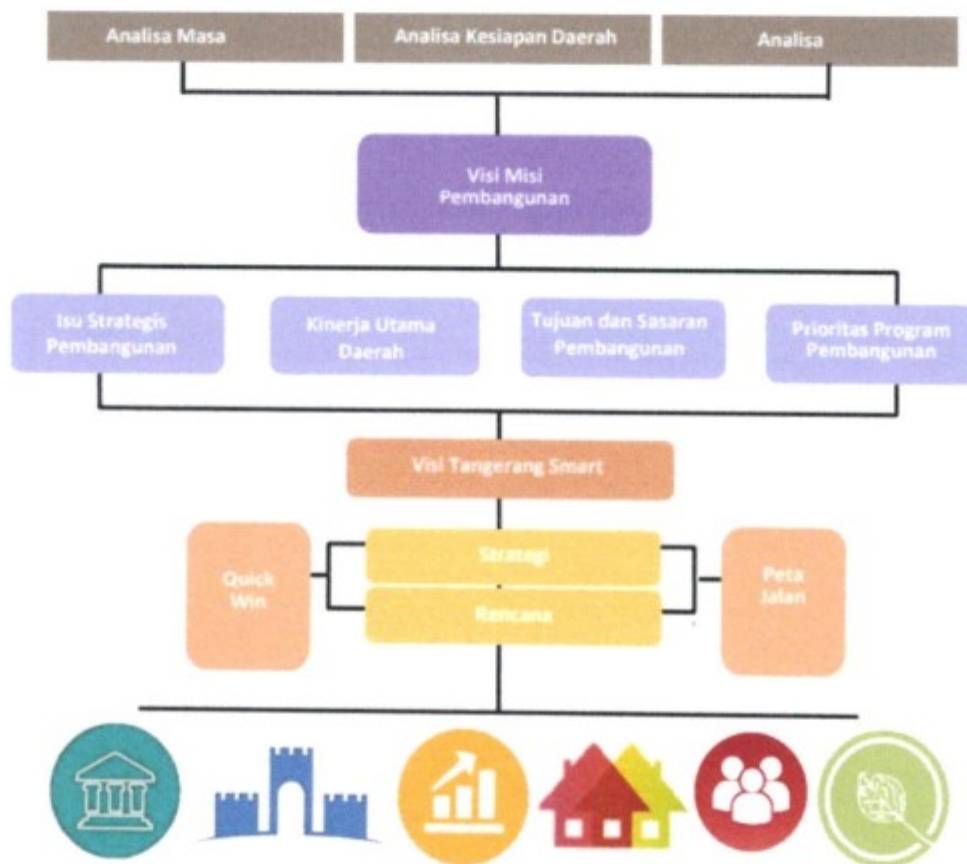
Gambar 1.4 Elemen-elemen kesiapan Smart City.

Kerangka pikir berikutnya dari sebuah Smart City adalah dimensidimensi yang terdapat di dalam Smart City itu sendiri, seperti pada gambar berikut :



Gambar 1.5. Elemen-elemen Pembangunan Smart City

Kerangka pikir Tangerang Smart City merupakan kesinambungan analisa masa depan, kesiapan daerah, dan gap yang dirangkai secara komprehensif untuk menunjukkan Smart City Readiness. Sebagai bagian dari arsitektur perencanaan pembangunan maka konsep smart city menjadi bagian dari perencanaan strategis RPJMD yang memuat isu-isu strategis, kinerja utama, tujuan, sasaran, dan prioritas program pembangunan. Penelaahan dari arsitektur perencanaan strategis menjadi rumusan visi Tangerang smart city yang kemudian dijabarkan dalam strategi dan rencana aksi di 6 (enam) dimensi dimana dimuat program unggulan (quick wins) dan pembagian prioritas pelaksanaan strategi dan rencana aksi pada peta jalan.



Gambar 1.6 Kerangka Pikir Tangerang Smart City 2025-2026

BAB II

ANALISIS VISI SMART CITY KABUPATEN TANGERANG

2.1 Analisis Visi Pembangunan Daerah

Masterplan Tangerang Smart City adalah dokumen perencanaan operasional sehingga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025- 2026. Sebagai dokumen perencanaan operasional, maka masterplan Tangerang Smart City selaras dengan perencanaan sektoral lainnya seperti Road Map Sustainabel Development Goals (SDG's), Rencana Aksi daerah Hak Asasai Manusia (RanHAM), Rencana Aksi Daerah Pencegahan Korupsi, Roadmap Smart City, Pro Poor Planing, Budgeting, and Monitoring, dan rencana aksi lain dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Masterplan Tangerang Smart city memiliki konsep 6 (enam) dimensi meliputi tata kelola birokrasi (smart governance), pemasaran daerah (smart branding), perekonomian (smart economy), ekosistem permukiman penduduk (smart living), lingkungan masyarakat (smart society), dan pemeliharaan lingkungan (smart environment).

Kerangka pikir Tangerang Smart City terdiri dari merupakan kesinambungan analisa masa depan, kesiapan daerah, dan kesenjangan atau gap yang dirangkai secara komprehensif untuk menunjukkan Smart City Readiness atau kesiapan daerah dalam mengimplementasi-kan konsep smart city. Sebagai bagian arsitektur perencanaan pembangunan maka konsep smart city menjadi bagian dari perencanaan strategis RPJMD yang memuat isu-isu strategis, kinerja utama, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan staregi serta prioritas program pembangunan. Penelaahan dari arsitektur perencanaan strategis menjadi rumusan visi Tangerang smart city yang kemudian dijabarkan dalam strategi dan rencana aksi di 6 (enam) dimensi dimana dimuat program unggulan (quick wins) dan pembagian prioritas pelaksanaan strategi dan rencana aksi pada peta jalan. Sebagai penelaahan terhadap perencanaan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Tangerang 2025-2026 maka memperhatikan Visi dan Sasaran Tangerang Smart City sebagaimana berikut;

“Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani”

Pada masa bhakti 2025-2026 mengakomodasi berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan baik dalam konstelasi internasional, nasional, regional maupun regional, mempertimbangkan prioritas programprogram nasional dan kebijakan nasional meliputi pengembangan wilayah, kebijakan pembangunan lintas sektoral, maupun pembangunan inklusif yang melibatkan proses teknokratis dan politis. Pembangunan Tangerang Smart City mengacu Visi Kabupaten Tangerang sebagai semangat untuk merangkul seluruh stakeholder pembangunan. Secara filosofis, visi Kabupaten Tangerang mengandung makna sebagai berikut :

Daya Saing (Competitive Forces)

Kemampuan/kekuatan adaptasi terhadap perubahan internal dan eksternal untuk meraih keberhasilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.

Daya Saing Daerah ; kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan regional, nasional dan global.

Daya saing daerah terkait erat dengan Perkembangan Perekonomian Daerah, Keterbukaan, Sistem Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam serta Potensi Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat, Kinerja Pemerintahan dan kebijakan Pemerintah, Manajemen dan Ekonomi Makro.

Masyarakat Madani (*Civil Society*)

Merupakan masyarakat yang menjadikan agama (hubungan vertikal dengan Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan horizontal antar sesama manusia dan makhluk hidup lainnya) sebagai tolok ukur kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Madani menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan/ persaudaraan / kekeluargaan (egaliterianisme), penghargaan didasarkan kepada prestasi, keterbukaan (inclusivisme) dan partisipasi, adil dan demokratis, merdeka (independent) dari segala "penguasaan" manusia atas manusia lainnya, juga masyarakat yang bebas (freedom) dari pertentangan sosial yang anarkis dan destruktif.

Guna mencapai visi Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2026 maka dirumuskan misi sebagaimana berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal.
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional.
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif.
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi dijabarkan berikut :

Sinkronisasi Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kinerja Utama RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2026 dan Dimensi Smart City

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi Smart City					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
1	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan						
				Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan						
2	Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdayasaing berbasis pada potensi keunggulan lokal	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan	Presentase Kontribusi PDRB Sektor Unggulan, PMA, Presentase Daya Saing Produk Unggulan Lokal						
				Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja					
				Presentase Penduduk Miskin	Meningkatkan Cakupan Penanganan PPKS	Presentase PPKS Yang Berdaya					

Sinkronisasi Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kinerja Utama RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2026 dan Dimensi Smart City

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi Smart City						
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment	
3	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Digitalisasi dan integrasi Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Nilai SAKIP	✓						✓
					Nilai Indeks Kemandirian Fiskal							
					Opini BPK							
					Profesionalitas ASN							
					Indeks SPBE							
					Indeks Pelayanan Publik							

Sinkronisasi Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kinerja Utama RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2026 dan Dimensi Smart City

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi Smart City					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
4	Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur Yang Terpadu dan Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur						
					Presentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang Sesuai RT RW		✓	✓	✓	✓	
					Rasio Luas Pemukiman Perumahan dan Pemakaman Yang Layak		✓	✓	✓	✓	
				Meningkatkan Kualitas Hidup yang Sehat dan Tangguh Terhadap Bencana	Rasio Konektivitas Kabupaten						
					Indeks Resiko Bencana (IRBI)						

BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY KABUPATEN TANGERANG

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. Sehingga Smart Governance di dalam dimensi Smart City merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola- pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan business process yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan. Sasaran dari Smart Governance adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan Kabupaten Tangerang yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Tentu saja peningkatan dalam melakukan perubahan pola-pola tradisional dalam tata kelola pemerintahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun adopsi teknologi adalah hal yang akan memberikan percepatan terhadap perubahan tersebut. Smart Governance harus dapat di implementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (service), birokrasi (bureaucracy), dan kebijakan (policy).

Dimensi kedua dalam Smart City adalah **Smart Branding**, yaitu branding daerah yang pintar. Yang dimaksud dengan Smart Branding adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. Smart Branding menjadi salah satu dimensi dalam Smart City karena di dalam era informasi seperti saat ini, sebuah kota tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokal nya, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerahnya. Sehingga pada dasarnya konsep branding daerah memiliki kemiripan dengan konsep branding di dalam korporasi, hanya saja perbedaannya adalah apabila di dalam branding korporasi tujuannya adalah meningkatkan brand value perusahaan yang berujung pada meningkatnya income dan profit perusahaan, pada branding daerah, tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan brand value daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dimensi ketiga dalam Smart City adalah **Smart Economy** atau tata kelola perekonomian yang pintar. Smart Economy dalam Smart City dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini. Sasaran dari dimensi Smart Economy di dalam Smart City adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan financial literacy masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan less-cash society. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembangkan tiga elemen dalam Smart Economy, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan.

Smart living menjadi salah satu dimensi dalam Smart City untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah Smart City. Sasaran dari Smart Living di dalam Smart City adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.

Smart Society sebagai bagian dari Smart City merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam sebuah Smart City, interaksi antar manusia telah bergerak menuju 33 ekosistem sosio-teknis dimana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antarwarga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi. Sasaran dari Smart Society dalam Smart City adalah mewujudkan ekosistem sosio- teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi. Sasaran dari Smart Society tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen di dalam Smart Society, yaitu komunitas warga (community), ekosistem pembelajaran (learning), dan sistem keamanan (security).

Dimensi keenam dalam sebuah Smart City adalah **Smart Environment**, pengelolaan lingkungan yang pintar, dimana yang dimaksud dengan pintar adalah adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Ide dasar dari Smart Environment di dalam Smart City adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang Smart City yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya. Sasaran dari Smart Environment adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan.

Perumusan strategi Tangerang Smart City dijabarkan berdasarkan pilar dan sub pilar yang terdiri Sasaran dari 6 (enam) dimensi meliputi tata kelola birokrasi (smart governance), pemasaran daerah (smart branding), perekonomian (smart economy), ekosistem permukiman penduduk (smart living), lingkungan masyarakat (smart society), dan pemeliharaan lingkungan (smart environment). Perumusan strategi Tangerang Smart City dijabarkan sebagaimana berikut:

Smart Governance

Sub Pilar Dimensi	Sasaran	Strategi
Pelayanan Publik (Public Service)	Menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dengan berbasis NIK yang terintegrasi dengan semua jenis layanan	G.1.Pengembangan Pelayanan Publik berbasis Satu Data ketunggalan identitas dan spasial
Manajemen Birokrasi yang Efisien (Bureaucracy)	Menguatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendorong pengembangan penerapan system informasi berbasis teknologi sehingga menghasilkan Sistem Birokrasi yang simple elegan dan tepat (SILET) dan Sistem Informasi Administrasi Pengadaan (SIAP)	G.2.Pengembangan Pelayanan Publik berbasis Satu Data ketunggalan identitas dan spasial
Efisien Kebijakan Publik (public Policy)	Menghadirkan pelayanan terintegrasi untuk kebutuhan masyarakat, dunia usaha, ASN serta Aparat terkait layanan pemerintahan melalui satu kali klik dengan OGIS (One Get Information System)	G.3. Integrasi sistem informasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Smart Branding

Sub Pilar Dimensi	Sasaran	Strategi
Tourism Branding	Menjadikan Kabupaten Tangerang sebagai Destinasi Wisata Bisnis dan Industri Indonesia	B.1. Pengembangan Tangerang Smart Bussines and Tourism Paltform
Bussines Branding	Menghadirkan Kabupaten Tangerang sebagai Poros Investasi Dunia dengan layanan terpadu “Eretan” (efektif, responsif, efisien, transparan, dan akuntabel)	B.2. Peningkatan kemudahan, kesehderhanaan, kepastian, dan ketetapan pelayanan terpadu “Eretan’
City Appearance Branding	Mengembangkan landmark artistik dan memorable dengan citra visual berlandaskan keluhuran nilai budaya Kabupaten Tangerang	B.3. Keterpaduan pembangunan Dekorasi Kota berlandaskan keluhuran nilai budaya Kabupaten Tangerang

Smart Economy

Sub Pilar Dimensi	Sasaran	Strategi
Industri Berdaya Saing (Industry)	Membangun daya saing daerah yang didukung infrakstruktur dinamis berbasis kearifan lokal	Ec.1. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas Daerah
Kesejahteraan Rakyat (Welfare)	Meningkatkan peluang pembangunan usaha dan kesempatan kerja masyarakat berbasis transparansi dan perluasan aksesibilitas informasi	Ec.2. Peningkatan aksesibilitas dunia kerja serta penguatan pemberdayaan masyarakat secara inklusif
Transaksi Keuangan (Transaction)	Meningkatkan aksesibilitas bagi pelaku usaha didukung skema pembiayaan yang terintegrasi perbankan serta menjaga stabilitas, nilai tambah, dan perekonomian yang berkelanjutan	Ec.3. Perluasan pembiayaan usaha

Smart Living

Sub Pilar Dimensi	Sasaran	Strategi
Harmonisasi Tata Ruang (Harmony)	Mewujudkan keharmonisan pembangunan dalam pemanfaatan ruang guna menciptakan livable city atau kota layak huni	L.1. Pengendalian Pembangunan berbasis harmonisasi Penataan Ruang
Prasarana Kesehatan (Health)	Mewujudkan Green Hospital didukung pelayanan kesehatan yang inklusif	L.2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan preventif, promotif, dan kuratif
Ketersediaan Saranan Transportasi (Mobility)	Menghadirkan transportasi publik yang ramah, nyaman dan efisien untuk menunjang konektivitas daerah	L.3. Pengembangan Tangerang Smart Mobility Intra City dengan prioritas keramahan pelayanan, kenyamanan fasilitas, dan efisiensi

Smart Society

Sub Pilar Dimensi	Sasaran	Strategi
Interaksi Masyarakat yang Efisien (Community)	Membangun kemitraan antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, serta lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat	S.1. Peningkatan kemitraan kerjasama lintas sektoral dalam membangun komunitas Cerdas
Ekosistem Belajar yang Efisien (Learning)	Meningkatkan ketereampilan dan kemandirian masyarakat melalui penguatan layanan pendidikan tertintegrasi	S.2. Pengembangan layanan pendidikan terintegrasi berbasis infrastruktur dan suprastruktur pendidikan
Sistem Keamanan Masyarakat (Security)	Menguatkan aksesibilitas layanan masyarakat terpadu	S.3. Pengembangan Layanan Tangerang Call Center





Smart Environment

Sub Pilar Dimensi	Sasaran	Strategi
Program Proteksi Lingkungan (Protection)	Menguatkan penegakan hukum dalam perlindungan lingkungan hidup	En.1. Penguatan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara terpadu
Tata Kelola Sampah dan Limbah	Meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah serta limbah rumah tangga dan industri	En.2. Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah dan limbah berbasis Reduce, Reuse, Recycle, Replace
Tata Kelola Energy	Meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi melalui transformasi teknologi dan pengembangan sumber daya energi melalui komoditas sampah organik (waste to energy)	En.3. Pengembangan energi alternatif berbasis pengembangan sumber daya energi melalui komoditas sampah organik (waste to energy)

Perumusan strategi adalah tahap awal pada manajemen strategi, yang mencakup mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Pengembangan Strategi Tangerang Smart City di 6 (enam) dimensi meliputi tata kelola birokrasi (smart governance), pemasaran daerah (smart branding), perekonomian (smart economy), ekosistem permukiman penduduk (smart living), lingkungan masyarakat (smart society), dan pemeliharaan lingkungan (smart environment) merupakan telaah dari analisa SWOT sebagaimana dijabarkan dalam Buku 1 Masterplan Smart City Chapter Analisa Kesenjangan.

Menurut Pearce dan Robinson (2011:140) menjelaskan StrengthWeaknessOpportunities-Threats (SWOT) adalah “acronym for the internal Strengths and Weaknesses of a firm, and the environmental Opportunities and Threats facing that firm. SWOT analysis is a technique through which managers create a quick overview of a company’s strategic situation”.² Menurut David (2011:178) mendefinisikan “SWOT is an important matching tool that helps manager develop four types of strategies: SO (Strength-Opportunities) Strategies, WO (Weaknesses- Opportunities) Strategies, ST (Strength-Threats) and WT (Weakness-Threats) Strategies.”. SWOT dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT merupakan alat pencocokan yang dapat membantu manajer untuk mengembangkan strategi dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan analisa perumusan strategi sebagaimana dimaksud maka penjabaran strategi yang dirumuskan dalam Tangerang Smart City memiliki korelasi terhadap analisa kesenjangan yang dijabarkan sebagaimana berikut:

Tabel 3.1 Matriks Sinkronisasi Strategi Tangerang Smart City dan Analisis Kesenjangan

Strategi	 Strengths	 Weaknesses	 Opportunities	 Threats
G.1. Pengembangan Pelayanan Publik berbasis Satu Data ketunggalan identitas dan spasial	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16	1 2 3 4 5 6
G.2. Peningkatan kebermanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan	5 6 7 8 10 11	5 6 8 9	12 13 14 15	1 2 3 4 5 6 7 9
G.3. Integrasi sistem informasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	5 6 7 8 9	5 7 6	13 15 16	1 2 3 4 5 6 7 8 9

B.1. Pengembangan Tangerang <i>Smart Bussines and Tourism Paltform</i>	1 3 5 6	1 2 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 6 7
B.2. Peningkatan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, dan ketetapan pelayanan terpadu	3 7 8 9	3	4 7 8 9	1 2 4 5
B.3. Keterpaduan pembangunan DekorasiKota berlandaskan keluhuran nilai budaya Kabupaten Tangerang	2 3	3	4 8 9	5 6 7
Ec.1. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas Daerah	1 2 3 9 10 11 12 14	1 8 9 10 12 13	3 7 8 10 13	1 2 9 10 11 12 13 14
Ec.2. Peningkatan aksesibilitas dunia kerja melalui transparansi, peluasan informasi, pengembangan kualitas tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha	4 5 6 7 8	2 3 4 5 6 7 11	1 2 4 5 6 7 8 9 11 13	3 4 5 6 7 8 9
Ec.3. Perluasan pembiayaan usaha	4 5 6 12	9 10	1 2 4 5 6 12	4 5 12 14
L.1. Pengendalian Pembangunan berbasis harmonisasi Penataan Ruang	1 2 3 4 10 11 13	4 10 13	1 2 3 7 9 10	1 2 3 4 6 7

Implementasi Smart City dengan Menggunakan Teknologi AI Dalam Mengatasi Permasalahan Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang kompleks, termasuk tingkat kemiskinan yang tinggi, kemacetan lalu lintas yang serius terutama selama jam sibuk, masalah pengelolaan sampah yang tidak efisien, banjir yang sering terjadi selama musim hujan, polusi udara, keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang merata, krisis perumahan, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta tantangan lingkungan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi. Penyelesaian permasalahan ini memerlukan solusi inovatif dan kolaboratif yang dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk dan menjaga keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Tangerang.

Dari sekian banyak permasalahan, empat masalah utama yang muncul meliputi kemiskinan yang signifikan, kemacetan lalu lintas yang serius terutama selama jam sibuk, masalah pengelolaan sampah yang tidak efisien, dan banjir yang sering terjadi selama musim hujan. Kemiskinan menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Kemacetan lalu lintas menyebabkan pemborosan waktu dan energi serta meningkatkan polusi udara. Masalah pengelolaan sampah menciptakan tumpukan sampah yang merusak lingkungan dan kesehatan. Sementara banjir menjadi ancaman yang berulang terutama di musim hujan, menyebabkan kerusakan properti dan ancaman keselamatan.

1. Permasalahan Kemiskinan di Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang, yang terletak di sekitar wilayah metropolitan Jakarta, telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini, bagaimanapun, tidak selalu mencerminkan peningkatan kualitas hidup bagi semua penduduknya. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang signifikan, masih ada sebagian penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Wilayah perkotaan di Kabupaten Tangerang memiliki sebagian besar populasi miskin.

Mereka mungkin menghadapi ketidaksetaraan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan yang layak, dan lapangan pekerjaan yang stabil. Faktor-faktor seperti tingginya biaya hidup di wilayah perkotaan dan persaingan ketat untuk lapangan pekerjaan dapat membuat situasi ini semakin sulit. Kemiskinan dapat mempengaruhi kualitas hidup, kesehatan, dan pendidikan penduduk. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk mencari solusi yang efektif untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Tangerang.

Solusi AI :

1. Pemantauan Program Bantuan Sosial

- Teknologi AI dapat digunakan untuk memantau distribusi program bantuan sosial dan memastikan bantuan mencapai penerima yang tepat.
- Analisis data dapat mengidentifikasi potensi penyalahgunaan atau kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial.

2. Prediksi Kebutuhan Layanan Sosial

- AI dapat mengumpulkan dan menganalisis data untuk memprediksi di mana layanan sosial seperti klinik kesehatan dan pusat pendidikan dibutuhkan secara mendesak.
- Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien.

3. Meningkatkan Peluang Pekerjaan dengan Pencocokan Pasar Kerja

- Sistem AI dapat memetakan keahlian dan keterampilan pencari kerja dengan pekerjaan yang tersedia di daerah tersebut.
- Ini membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan keluarga, mengurangi tingkat kemiskinan.

2. Permasalahan Kemacetan Lalu Lintas

Kabupaten Tangerang mengalami masalah serius terkait kemacetan lalu lintas. Wilayah ini berbatasan dengan Jakarta, yang memiliki lalu lintas padat dan tingkat urbanisasi tinggi. Jalan-jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Tangerang dengan Jakarta dan sekitarnya seringkali menjadi koridor lalu lintas yang padat, terutama selama jam sibuk. Kemacetan lalu lintas bukan hanya masalah waktu dan kenyamanan bagi penduduk Kabupaten Tangerang, tetapi juga memiliki dampak ekonomi dan lingkungan yang serius.

Waktu yang dihabiskan dalam kemacetan dapat mengakibatkan pemborosan energi dan biaya yang signifikan bagi penduduk. Selain itu, polusi udara yang dihasilkan oleh lalu lintas yang macet dapat berkontribusi pada masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pemecahan masalah kemacetan lalu lintas menjadi prioritas bagi pemerintah setempat, dan solusi inovatif menggunakan teknologi AI merupakan salah satu solusi yang ditinjau.

Solusi AI :

1. Manajemen Lalu Lintas Cerdas dengan AI
 - Sistem manajemen lalu lintas berbasis AI dapat mengoptimalkan sinkronisasi lampu lalu lintas, mengurangi waktu tunggu pengguna jalan.
 - AI dapat menyesuaikan pola lalu lintas berdasarkan data lalu lintas real-time.
2. Sistem Navigasi dan Peringatan Lalu Lintas
 - Aplikasi navigasi AI dapat memberikan pengguna rute tercepat dan menghindari jalan-jalan yang macet.
 - Sistem peringatan lalu lintas dapat memberi pengemudi informasi tentang kecelakaan atau perbaikan jalan.
3. Transportasi Publik Terintegrasi dengan AI
 - Transportasi publik yang terintegrasi dengan AI dapat memprediksi jadwal kedatangan dan keberangkatan, serta memberikan informasi real-time kepada penumpang.
 - Ini memudahkan masyarakat untuk beralih dari penggunaan mobil pribadi ke transportasi publik yang lebih efisien.

3. Permasalahan Sampah dan Lingkungan

Kabupaten Tangerang, dengan populasi yang terus bertambah, menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Pertumbuhan populasi yang cepat telah mengakibatkan peningkatan volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Masalah pengelolaan sampah yang tidak efisien telah menyebabkan tumpukan sampah yang meningkat di berbagai wilayah Kabupaten Tangerang.

Dampak dari masalah pengelolaan sampah ini tidak terbatas pada masalah visual tumpukan sampah yang meningkat. Dampak jauh lebih serius termasuk penurunan kualitas lingkungan dan risiko terhadap kesehatan masyarakat. Tumpukan sampah yang tidak terkendali dapat mencemari tanah dan air, mengancam sumber daya alam, serta menjadi tempat berkembang biaknya vektor penyakit. Pengelolaan sampah yang

lebih efisien dan berkelanjutan adalah suatu keharusan bagi Kabupaten Tangerang agar dapat mengatasi permasalahan ini dengan baik.

Solusi AI :

1. Pengumpulan Sampah yang Efisien
 - Penggunaan kendaraan pengumpulan sampah cerdas yang dijalankan dengan AI dapat mengoptimalkan rute pengumpulan sampah untuk mengurangi waktu dan biaya.
 - Sensor pintar di tempat sampah umum dapat memberi tahu petugas saat tempat sampah penuh, mengurangi kemacetan dan pengumpulan yang tidak efisien.
2. Pemantauan Kualitas Udara dan Air
 - AI dapat digunakan untuk memantau kualitas udara dan air di berbagai lokasi di Kabupaten Tangerang.
 - Data ini dapat memberikan wawasan tentang dampak permasalahan sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
3. Edukasi Masyarakat tentang Pengelolaan Sampah
 - Aplikasi dan platform berbasis AI dapat digunakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
 - Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan pengurangan sampah dapat membantu mengurangi masalah sampah.
4. Permasalahan Banjir di Kabupaten Tangerang

Banjir merupakan ancaman yang sering terjadi di Kabupaten Tangerang, terutama selama musim hujan. Banjir dapat terjadi akibat hujan deras yang berkepanjangan, intensitas curah hujan tinggi, dan sistem drainase yang belum mampu menampung air berlebih dengan baik. Banjir dapat memiliki dampak serius, termasuk kerusakan properti, hilangnya sumber daya, dan ancaman terhadap keselamatan masyarakat. Terutama di wilayah yang rawan banjir, masyarakat seringkali harus menghadapi kerugian finansial dan kehilangan aset. Permasalahan banjir di Kabupaten Tangerang memerlukan solusi yang efektif, terutama dalam hal manajemen air dan sistem peringatan dini untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh banjir.

Solusi AI :

1. Prediksi Banjir dengan Menggunakan Data Cuaca
 - AI dapat memanfaatkan data cuaca dan pola curah hujan untuk memprediksi potensi banjir.
 - Peringatan dini dapat diberikan kepada masyarakat dan pihak berwenang untuk mengambil tindakan pencegahan.
2. Sistem Peringatan Dini Banjir
 - Sistem peringatan dini AI dapat memberikan informasi real-time kepada masyarakat tentang tingkat air sungai dan situasi banjir yang berkembang.
 - Hal ini dapat membantu masyarakat untuk menghindari wilayah berpotensi banjir.
3. Sistem Pengendalian Banjir yang Otomatis
 - AI dapat digunakan dalam pengoperasian pintu air dan sistem pengendalian banjir.
 - Sistem ini memungkinkan respons yang lebih cepat dan efisien terhadap situasi banjir.

BAB IV

RENCANA AKSI SMART CITY KABUPATEN TANGERANG

Rencana Aksi (Action Plan) pelaksanaan Tangerang Smart City merupakan penjabaran strategi yang dirumuskan dalam bentuk program kerja (output atau sub output suatu kegiatan kunci). Rencana aksi dibedakan menjadi 2 (dua) tahapan yaitu tahap kesiapan dan program kerja prioritas. Rencana Aksi pada tahapan kesiapan implementasi Smart City dibedakan menjadi:

- a) Pengembangan kebijakan dan kelembagaan Smart City daerah;
- b) Rencana pembangunan infrastruktur pendukung Smart City;
- c) Rencana penguatan literasi Smart City Daerah;

Tahapan kedua adalah program kerja prioritas. Program kerja Pembangunan Smart City di Kabupaten Tangerang disusun oleh segenap SKPD/OPD di Kabupaten Tangerang. Program kerja prioritas merupakan program-program kerja (output atau sub output suatu kegiatan kunci) yang dirumuskan untuk mewujudkan strategi, sasaran, dan visi Tangerang Smart City secara optimal serta dinilai memiliki titik ungkit tertinggi yang dibagi ke dalam (enam) dimensi Tangerang Smart City meliputi tata kelola birokrasi (smart governance), pemasaran daerah (smart branding), perekonomian (smart economy), ekosistem permukiman penduduk (smart living), lingkungan masyarakat (smart society), dan pemeliharaan lingkungan (smart environment). Program Kerja Pembangunan Smart City mencakup Program Kerja yang sudah berjalan, karena akan dilanjutkan dan juga Program Kerja baru yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, baik jangka pendek (satu tahun ke depan), jangka menengah (lima tahun ke depan), maupun jangka panjang (10 tahun ke depan). Namun untuk Program Kerja Jangka Menengah dan Program Kerja Jangka Panjang, dimungkinkan dilakukan revisi pada tahun-tahun berjalan di masa depan, mengingat perubahan situasi dan kondisi yang terjadi di masa depan.

Oleh sebab itu Masterplan Smart City Kabupaten Tangerang ini bukan merupakan dokumen yang bersifat statis, namun bersifat dinamis, dalam arti setiap tahun dapat dilakukan revisi sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana sifat dari manajemen strategis. Penilaian terhadap ketercapaian indikator program kerja dilaksanakan melalui pendekatan analisa carel meliputi kapabilitas sumber daya dalam melaksanakan pencapaian kinerja, kemudahan, kesiapan, keluasan dampak, dan efek yang ditimbulkan. Rumusan penilaian Carel dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Capabilities: Kemampuan untuk bisa melaksanakan strategi
2. Accessibilities: Kemudahan melaksanakan
3. Readiness: Kesiapan semua pihak untuk melaksanakan dan menerima konsekuensi kalau strategi dilaksanakan
4. Extend: Keluasan dari cakupan strategi tersebut atau dampak (manfaat) yang akan ditimbulkan
5. Leverage: Efek domino atau dampak ganda.

Penilaian Carel menghasilkan timeline pencapaian program kerja pada tahapan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Penilaian terhadap akuntabilitas indikator kinerja dilaksanakan melalui kriteria SMART-C yang dijelaskan sebagai prasyarat dalam pembentukan indikator kinerja. Rumusan kriteria meliputi:

- a. Relevant, yaitu indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis.
- b. Well Defined, yaitu definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda

- sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan.
- c. Measurable, yaitu indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas/harga.
 - d. Approriate, yaitu indikator yang dipilih harus sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja.
 - e. Reliable, yaitu indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja.
 - f. Verifiable, yaitu memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan idikator.
 - g. Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data

Rencana Aksi (Action Plan) pelaksanaan Tangerang Smart City dirumuskan sebagaimana berikut:

4.1 Aksi Kesiapan Implementasi Kabupaten Tangerang Smart City

a. Tabel Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan

Rencana Aksi Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Smart City diprioritaskan sebagaimana berikut:

No	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Baseline - 2025	Target	Time Line	Leading Sector	Kerjasama	Anggaran
1	Penetapan Regulasi tentang Masterplan Smart City	Regulasi Masterplan Smart City	-	Peraturan Bupati	2025	Diskominfo	Bappeda, Bagian Hukum Setda	APBD
2	Inisiasi Masterplan Smart City dalam RPD	Muatan Tangerang Smart City diakomodasi dalam RPD	-	Review RPD 2025-2026	2025-2026	Bappeda	Bag. Hukum Setda, Diskominfo	APBD
3	Penyusunan Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Smart City	Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Smart City tahun ke-n	-	Peraturan Bupati	2025	Bappeda Diskominfo	Bagian Hukum Setda, Inspektorat	APBD

b. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung Tangerang Smart City

Rencana pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pelaksanaan Smart City diprioritaskan sebagaimana berikut:

No	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Baseline (2025)	Target	Time Line	Leading Sector	Kerjasama	Anggaran
1	Pengembangan Jaringan komputer (network) yang terkoneksi internet	Persentase OPD yang telah memiliki layanan internet	90%	100%	2025	Diskominfo	Bappeda, Pihak Ketiga	APBD
		Persentase Kelurahan yang memiliki layanan hotspot publik	0	28 Kelurahan	2025	Diskominfo	Bappeda, Pihak Ketiga	APBD
2	Pembangunan Network operation Center (NOC) atau Pusat Manajemen Jaringan	Persentase maintenance terhadap performa jaringan	-	100%	2025	Diskominfo	Bappeda	APBD
3	Pengembangan Data Center	Sertifikasi Data Center	-	Tier II	2025 Tier II	Diskominfo	Bappeda	APBD
4	Pembangunan City Operation Center (COC) atau Tangerang Command Center	Gedung COC	-	1	2025	Diskominfo	Bappeda	APBD, CSR
		Operasional Command Center		Jaringan, Dashboard, Call Center	2025	Diskominfo	Bappeda	APBD, CSR

c. Rencana Penguatan Literasi Tangerang Smart City

Rencana Penguatan Tangerang Smart City diprioritaskan sebagaimana berikut:

No	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Baseline (2025)	Target	Time Line	Leading Sector	Kerjasama	Anggaran
1	Diseminasi Tangerang Smart City	Buku Masterplan Tangerang Smart City	-	3 buku	2025	Diskominfo	OPD, akademisi	APBD
		Jumlah Pelaksanaan Diseminasi secara online dan terbuka	-	1 kali expo per tahun	2025-2025	Diskominfo	Bappeda Akademisi	APBD
2	Inkubasi pengembangan Aplikasi pendukung Smart City	Jumlah perangkat daerah peserta pengembangan Aplikasi pendukung Smart City	-	Seluruh OPD	2025-2025	Diskominfo	Bappeda Disdukcapil	APBD
3	Integrasi Tangerang Smart City dalam dalam Diklat Pegawai	Jumlah Diklat	-	4 Diklat	2025-2026	BKPSDM	Diskominfo	APBD
4	Pelatihan SDM di bidang IT	Jumlah Pelatihan		4 pelatihan per tahun	2025-2026	Diskominfo	Akademisi	APBD CSR

4.2 Rencana Aksi Program Kerja Kabupaten Tangerang Smart City

Smart Governance

Sub Pilar Dimensi	STRATEGI	Program/Kegiatan	
Pelayanan Publik (Public Service)	G.1. Pengembangan Pelayanan Publik berbasis Satu Data ketunggalan identitas dan spasial	1	Program Pendaftaran Kependudukan
		2	Program Pencatatan Sipil
		3	Pengelolaan Data Statistik Sektoral (OGIS)
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		4	Pengelolaan e-government Di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5	Pengembangan Database Sistem Informasi bidang kebudayaan		
6	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
7	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		

Sub Pilar Dimensi	STRATEGI	Program/Kegiatan	
		8	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
		9	Pemetaan Kependudukan
		10	Fasilitasi data keluarga di Kampung KB
		11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
		12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
		13	Pengembangan Dashboard Satu Data Tangerang

Sub Pilar Dimensi	STRATEGI	Program/Kegiatan	
Manajemen Birokrasi yang Efisien (Bureaucracy)	G.2. Peningkatan kebermanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan	14	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
		15	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
		16	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
		17	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
		18	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
		19	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota
		20	Penyediaan Layanan kemandirian informasi pemerintah daerah kabupaten/kota
		21	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Pilar Dimensi	STRATEGI	Program/Kegiatan	
		22	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		23	Pengelolaan Data Kepegawaian
		24	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
		25	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
		26	Pengelolaan Assessment Center
		27	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Sub Pilar Dimensi	STRATEGI	Program/Kegiatan	
		28	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian SKPD
		29	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Pengembangan sistem informasi e-SLHD
		30	Sistem Informasi Penataan Ruang
		31	Pengembangan sistem Informasi Grand Database berbasis ketunggalan Identitas Tangerang Satu Data
		32	
		33	Perumusan dan Review Grand Design bisnis proses pembangunan Daerah

Sub Pilar Dimensi	STRATEGI	Program/Kegiatan	
		34	Pengembangan sistem informasi Tangerang Integrated Development and Decision Support System
		35	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan (perencanaan, penganggaran, pelaporan, pengendalian dan pengawasan) (tata kelola pemerintah kabupaten dan desa)
		36	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
		37	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan sistem informasi penunjang pelayanan kesehatan
Efisien Kebijakan Publik (public Policy)	G.3. Integrasi sistem informasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	38	Sub Kegiatan Pemeliharaan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
		39	Pengembangan pelayanan informasi publik dan pengaduan pelayanan publik

Smart Branding

Sub Pilar Dimensi	STRATEGI	Program/Kegiatan	
Tourism Branding	B.1. Pengembangan Tangerang Smart Bussines and Tourism Paltform	1	Pemanfaatan teknologi Informasi untuk promosi pariwisata
		2	Pengembangan sistem informasi Tangerang e- Tourism
		3	Festival Kesenian dan Kebudayaan
		4	Pernyusunan rencana induk pariwisata daerah
		5	Pengembangan forum Tangerang Invesment Lounge sebagai sarana pertemuan Bupati, perangkat daerah, pelaku usaha atau investor, akademisi, dan tokoh masyarakat
		6	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
Bussines Branding	B.2. Peningkatan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, dan ketetapan pelayanan terpadu "Eretan	7	Perumusan regulasi pendukung pelayanan publik dalam rangka tata laksana pelayanan khusus perizinan dalam pelaksanaan Online Single Submission (OSS)
		8	Pembangunan infrastruktur pendukung Online Single Submission

Sub Pilar Dimensi	STRATEGI	Program/Kegiatan	
		9	Pengembangan Portal Investasi Tangerang
		10	Pengembangan Perijinan Online SIPINTER 2
		11	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
City Appearance Branding	B.3. Keterpaduan pembangunan Dekorasi Kota berlandaskan keluhuran nilai budaya Kabupaten Tangerang	12	Penataan Potensi Destinasi Pariwisata Kab. Tangerang
		13	Pengembangan Potensi Kawasan Pariwisata Unggulan
		14	Pengembangan Potensi Kawasan Pariwisata Strategis
		15	Pelaksanaan koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata dengan Lembaga/dunia Usaha
		16	Penyelenggaraan Penataan Desa

Sub Pilar Dimensi	STRATEGI	Program/Kegiatan	
		17	Fasilitasi Tata Wilayah Desa
		18	Peningkatan Desa Untuk Menuju Desa Mandiri

Smart Economy

Sub Pilar Dimensi	STRATEGI	Program/Kegiatan	
Industri Berdaya Saing (Industry)	Ec.1. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas Daerah	1	Program Penyelenggaraan Jalan
		2	Peningkatan Kemantapan infrastruktur jalan Kabupaten, jalan poros Desa, Jalan Desa.
		3	Pemenuhan kebutuhan air baku industri dan tenaga listrik kawasan industri terintegrasi

Sub Pilar Dimensi	STRATEGI	Program/Kegiatan	
		4	Pengembangan Pendataan Jalan dan Jembatan
		5	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Drainase
Kesejahteraan Rakyat (Welfare)	Ec.2. Peningkatan aksesibilitas dunia kerja serta penguatan pemberdayaan masyarakat secara inklusif	6	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
		7	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
		8	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
		9	Job Fair/Bursa Kerja
		10	Pengembangan Sistem Informasi Perusahaan (SILPEH) berbasis web dan mobile

Sub Pilar Dimensi	STRATEGI	Program/Kegiatan	
		11	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
		12	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita Pertahun sesuai dengan angka kebutuhan gizi
		13	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
		14	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		15	Pengembangan Pemasaran Hasil Perikanan
		16	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota
		17	Program pengelolaan perikanan tangkap pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota

Sub Pilar Dimensi	STRATEGI	Program/Kegiatan	
		18	Program pengelolaan perikanan tangkap pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
Transaksi Keuangan (Transaction)	Ec.3. Perluasan pembiayaan usaha	19	Program Pelayanan Penanaman Modal
		20	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
		21	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
		22	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Smart Living

Sub Pilar Dimensi	STRATEGI	Program/Kegiatan	
Harmonisasi Tata Ruang (Harmony)	L.1. Pengendalian Pembangunan berbasis harmonisasi Penataan Ruang	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
		2	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
		3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
		4	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		5	Integrasi layer peta sektoral dari tiap-tiap OPD ke dalam WebSIG yang dikelola DTRB
		6	Pengembangan Sistem Informasi pengendalian tata ruang berbasis Geographic Information System (GIS) yang terintegrasi dengan Tangerang Satu Data

Sub Pilar Dimensi	STRATEGI	Program/Kegiatan	
Prasarana Kesehatan (Health)	L.2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan preventif, promotif, dan kuratif	7	Pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional (Universal Health Coverage)
		8	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		9	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Ketersediaan Saranan Transportasi (Mobility)	L.3. Pengembangan Tangerang Smart Mobility Intra City dengan prioritas keramahan pelayanan, kenyamanan fasilitas, dan efisensi	10	Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
		11	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		12	Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Sub Pilar Dimensi	STRATEGI	Program/Kegiatan	
		13	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
		14	Peningkatan kelancaran mobilitas penduduk melalui pengembangan Automatic Traffic Control System (ATCS) di titik kerawanan

Smart Society

Sub Pilar Dimensi	STRATEGI	Program/Kegiatan	
Interaksi Masyarakat yang Efisien (Community)	S.1. Peningkatan kemitraan kerjasama lintas sektoral dalam membangun komunitas Cerdas	1	Pembinaan Keagamaan
		2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		3	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
		5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Sub Pilar Dimensi	STRATEGI	Program/Kegiatan	
		6	Terlaksananya pembinaan IMP dan Organisasi lainnya tentang Bangga Kencana
		7	Pendayagunaan PKB/ PLKB dalam Program Bangga Kencana
		8	Terlaksananya pembinaan Terpadu Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)
Ekosistem Belajar yang Efisien (Learning)	S.2. Pengembangan layanan pendidikan terintegrasi berbasis infrastruktur dan suprastruktur pendidikan	9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
		10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		11	Pengelolaan Pendidikan PAUD
		12	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
		13	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
		14	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		15	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
		16	Kegiatan Sosialisasi Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		17	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

Sub Pilar Dimensi	STRATEGI	Program/Kegiatan	
		18	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
		19	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
		20	Sub Kegiatan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
		21	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
		22	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		23	Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		24	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
Sistem Keamanan Masyarakat (Security)	S.3. Pengembangan Layanan Tangerang Call Center	25	Pengembangan Tangerang Inclusive Call Center
		26	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan sistem informasi penunjang pelayanan kesehatan
		27	Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Smart Environments

Sub Pilar Dimensi	STRATEGI	Program/Kegiatan	
Program Proteksi Lingkungan (Protection)	En.1. Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara terpadu	1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		2	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
		3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		4	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota
		5	Program Pengelolaan SDA
		6	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
Tata Kelola Sampah dan Limbah	En.2. Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah dan limbah berbasis Reduce, Reuse, Recycle, Replace	7	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
		8	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
		9	Program Pengelolaan Persampahan
		10	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Sub Pilar Dimensi	STRATEGI	Program/Kegiatan	
		11	Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)
		12	Penyimpanan sementara limbah B3
Tata Kelola Energy	En.3. Pengembangan energi alternatif berbasis pengembangan sumber daya energi melalui komoditas sampah organik (waste to energy)	13	Pelaksanaan gerakan hemat energi di lingkup perkantoran pemerintah, swasta, sekolah, dan masyarakat
		14	Pengembangan Smart PJU

Sinkronisasi Komponen Masterplan Smart City Kabupaten Tangerang Terhadap ISO 37122.

Masterplan Smart City Kabupaten Tangerang merupakan panduan strategis untuk mengembangkan wilayah tersebut menjadi pusat perkotaan yang cerdas dan berkelanjutan. Sinkronisasi komponen Masterplan dengan ISO 37122, sebuah standar internasional yang menetapkan indikator kinerja kota, menjadi langkah krusial untuk memastikan implementasi yang efektif dan terukur.

ISO 37122 menetapkan kriteria pengukuran kinerja kota dalam berbagai aspek, termasuk transportasi, lingkungan, layanan dasar, dan teknologi informasi. Dengan mensinkronkan Masterplan Smart City Kabupaten Tangerang dengan standar ini, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap komponen strategis yang diusung dalam Masterplan sejalan dengan standar internasional.

Berikut sinkronisasi komponen yang terdapat pada Masterplan Smart City Kabupaten Tangerang terhadap ISO 37122 :

No	Komponen Smart City	Variabel	ISO 37122
1	Smart Governance	Pelayanan Publik (Public Service)	Pemerintahan
		Birokrasi yang Efisien (Bureaucracy)	Pemerintahan
		Kebijakan Publik (Public Policy)	Pemerintahan
2	Smart Branding	Ekosistem Pariwisata (Tourism Branding)	Rekreasi
		Ekosistem Bisnis Daerah (Business Branding)	Ekonomi
		Wajah Kota (City Appearance Branding)	Perencanaan Kota
3	Smart Economy	Industri yang berdaya saing (Industry)	Ekonomi
		Kesejahteraan rakyat (Welfare)	Ekonomi
		Ekonomi Transaksi Keuangan (Transaction)	Ekonomi
4	Smart Living	Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (Harmony)	Perencanaan Kota
		Prasarana kesehatan (Health)	Kesehatan
		Sarana Transportasi (mobility)	Transportasi
5	Smart Society	Komunitas (Community)	Populasi dan Kondisi Sosial
		Ekosistem Belajar yang Efisien (Learning)	Pendidikan
		Sistem Keamanan Masyarakat (Security)	Keamanan
6	Smart Environment	Proteksi Lingkungan (Protection)	Lingkungan & Perubahan Iklim
		Tata Kelola Sampah dan Limbah (Waste)	Limbah Padat
		Energy	Energi

BAB V
PETA JALAN SMART CITY KABUPATEN TANGERANG

Peta Jalan merupakan penjabaran timeline, baseline, indikator keberhasilan, dan target program kerja prioritas dalam (enam) dimensi Smart City meliputi tata kelola birokrasi (smart governance), pemasaran daerah (smart branding), perekonomian (smart economy), ekosistem permukiman penduduk (smart living), lingkungan masyarakat (smart society), dan pemeliharaan lingkungan (smart environment).

Smart Governance

STRATEGI	Program/Kegiatan		Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
					Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
G.1. Pengembangan Pelayanan Publik berbasis Satu Data ketunggalan identitas dan spasial	1	Program Pendaftaran Kependudukan	Cakupan perekaman KTP-el	Persen	99,45%	99,47%	99,49%	DISDUKCAPIL	APBD
			Cakupan kepemilikan KIA	Persen	60%	70%	80%	DISDUKCAPIL	APBD
	2	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Akte Kelahiran 0-18 Tahun yang diterbitkan	Persen	99%	99,50%	99,50%	DISDUKCAPIL	APBD
	3	Pengelolaan Data Statistik Sektoral (OGIS)	Persentase statistik sektoral	Persen	73%	75%	80%	DISKOMINFO	APBD
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Presentase layanan ketebukaan daftar informasi publik	Persen	100%	100%	100%	DISKOMINFO	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
				Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
	4 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penggunaan layanan ketebukaan daftar informasi publik	Persentase	92%	93%	94%	DISKOMINFO	APBD
	Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penyediaan layanan aplikasi	Persentase	100%	100%	100%	DISKOMINFO	APBD
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data perizinan yang diolah dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online	Persen	75	80	85	DPMPTSP	APBD
		Jumlah data perizinan yang dikelola dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online	Dokumen	4	4	4	DPMPTSP	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
				Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
	5 Pengembangan Database Sistem Informasi bidang kebudayaan	Database	-	1	1	1	Disporabudpar	APBD
	6 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial	Unit	174490	174494	174500	DINSOS	APBD
	7 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan, analisis, dan publikasi/diseminasi	Persen	24,95%	25,05%	25,05%	DISPERINDAG	APBD
	8 Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Prosentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan, analisis, dan publikasi/diseminasi	Persen	24,95	25,05	25,05	DISPERINDAG	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
				Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
	Kewenangan Kabupaten/Kota							
	9 Pemetaan Kependudukan	Dokumen Profil dan Database Kependudukan	Persen	100%	100%	100%	DPPKB	APBD
	10 Fasilitasi data keluarga di Kampung KB	Jumlah Rumah Data di Kampung KB	Persen	30%	35%	40%	DPPKB	APBD
	11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	Dokumen	29	29	29	DPPKB	APBD
	12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	274	274	274	DPPKB	APBD
	13 Pengembangan Dashboard Satu Data Tangerang	Dashboard	√	√	√	√	Bappeda, Diskominfo	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan		Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
					Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
G.2. Peningkatan kebermanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan	14	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Unit	25	25	25	DISKOMINFO	APBD
	15	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		Dokumen	48	48	48	DISKOMINFO	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
				Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
	16 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	3	3	3	DISKOMINFO	APBD
	17 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	70	70	70	DISKOMINFO	
	18 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	70	70	70	DISKOMINFO	APBD
	19 Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Presentase layanan keamanan informasi	Persentase	55%	65%	75%	DISKOMINFO	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana	
				Baseline 2024	Target 2025	Target 2026			
	20	Penyediaan Layanan kemanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	70	70	70	DISKOMINFO	APBD
	21	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	70	70	70	DISKOMINFO	APBD
	22	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	DISKOMINFO	APBD
	23	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	BKPSDM	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana	
				Baseline 2024	Target 2025	Target 2026			
	24	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	BKPSDM	APBD
	25	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	2	2	2	BKPSDM	APBD
	26	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	1	1	1	BKPSDM	APBD
	27	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	1	1	BKPSDM	APBD
	28	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian SKPD	Sistem Informasi	√	√	√	√	BKPSDM	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
				Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
	29 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Pengembangan sistem informasi e-SLHD	Sistem Informasi	Persen	50%	70%	100%	DLHK	APBD
	30 Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase sistem informasi bidang tata ruang	Persen	0,4	0,4	0,8	DTRB	APBD
	31 Pengembangan sistem Informasi	Sistem Informasi	√	√	√	√	Bappeda, Diskominfo	APBD
	32 Grand Database berbasis ketunggalan Identitas Tangerang Satu Data	Persentase Data sektoral yang terintegrasi	Persen	40%	70%	100%	Bappeda, Diskominfo	APBD
	33 Perumusan dan Review Grand Design bisnis proses pembangunan Daerah	Grand Design	√	√	√	√	Bappeda, Setda	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
				Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
	34 Pengembangan sistem informasi Tangerang Integrated Development	Sistem Informasi	√	√	√	√	Bappeda, Diskominfo, Setda, Pemerintahan Umum	APBD
	35 Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan (perencanaan, penganggaran, pelaporan, pengendalian dan pengawasan) (tatakelola pemerintah kabupaten dan desa)	Sistem Informasi	√	√	√	√	Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Setda Pemerintahan Umum	APBD
	36 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	dokumen	1	1	1	Bappeda	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan		Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
					Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
	37	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan sistem informasi penunjang pelayanan kesehatan	Tahun pengembangan sistem Informasi	Persen	40%	60%	80%	DINKES	APBD
G.3. Integrasi sistem informasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	38	Sub Kegiatan Pemeliharaan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	1	1	DISNAKER	APBD
	39	Pengembangan pelayanan informasi publik dan pengaduan pelayanan publik	Persentase Data Sektoral dan Statistik yang dipublikasi	Persen	>50%	>50%	100%	Bappeda, Diskominfo, BPS	APBD

Smart Branding

STRATEGI	Program/Kegiatan		Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
					Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
B.1. Pengembangan Tangerang Smart Bussines and Tourism Paltform	1	Pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi pariwisata	Pemutakhiran Sistem Informasi Destinasi wisata Tangerang (SIDEWITA)	Titik Destinasi	15	15	15	Disporabudpar, Diskominfo	APBD
	2	Pengembangan sistem informasi Tangerang e-Tourism	Sistem Informasi	-	√	√	√	Disporabudpar, Diskominfo	APBD
	3	Festival Kesenian dan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival kesenian dan kebudayaan per tahun	Jumlah	14	16	18	Disporabudpar	APBD
	4	Pernyusunan rencana induk pariwisata daerah	Rencana Induk Pariwisata Daerah	Dokume n	√	√	√	Disporabudpar	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
				Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
	5 Pengembangan forum Tangerang Investment Lounge sebagai sarana pertemuan Bupati, perangkat daerah, pelaku usaha atau investor, akademisi, dan tokoh masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Invesment Lounger per tahun	Jumlah	12	12	12	DPMPTSP	APBD
	6 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	dokumen	1	1	1	Bappeda	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana	
				Baseline 2024	Target 2025	Target 2026			
B.2. Peningkatan kemudahan,	7	Perumusan regulasi pendukung pelayanan publik dalam rangka tata laksana pelayanan khusus perizinan dalam pelaksanaan Online Single Submission (OSS)	Regulasi	-	√	√	√	DPMPTSP	APBD
	8	Pembangunan infrastruktur pendukung Online Single Submission	Persentase pemenuhan infrastruktur OSN	Persen	>50%	>50%	1	DPMPTSP	APBD
	9	Pengembangan Portal Investasi Tangerang	Sistem Informasi	-	√	-	-	DPMPTSP	APBD
	10	Pengembangan Perizinan Online SIPINTER 2	Sistem Informasi	-	√	-	-	DPMPTSP	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan		Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
					Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
	11	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data perizinan yang diolah dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online	Persen	75	80	85	DPMPTSP	APBD
B.3. Keterpaduan pembangunan Dekorasi Kota berlandaskan keluhuran nilai budaya Kabupaten Tangerang	12	Penataan Potensi Destinasi Pariwisata Kab. Tangerang	Jumlah Penataan Destinasi Wisata per tahun	Lokasi	1	1	1	Disporabudpar	APBD
	13	Pengembangan Potensi Kawasan Pariwisata Unggulan	Jumlah pengembangan potensi kawasan pariwisata unggulan per tahun	Lokasi	1	2	2	Disporabudpar	APBD
	14	Pengembangan Potensi Kawasan Pariwisata Strategis	Jumlah pengembangan potensi kawasan pariwisata unggulan per tahun	Lokasi	1	2	2	Disporabudpar	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
				Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
	15 Pelaksanaan koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata dengan Lembaga/dunia Usaha	Pembangunan Obyek Pariwisata	-	√	√	√	Disporabudpar	APBD
	16 Penyelenggaraan Penataan Desa	jumlah rekomendasi penataan desa	Desa	1	1	1	DPMPD	APBD
	17 Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	1	1	1	DPMPD	APBD
	18 Peningkatan Desa Untuk Menuju Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Persen	10,16%	14,23%	18,29%	DPMPD	APBD

Smart Economy

STRATEGI	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana	
				Baseline 2024	Target 2025	Target 2026			
Ec.1. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas Daerah	1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten	%	3,38%	4,89%	6%	DBMSDA	APBD
	2	Peningkatan Kemantapan infrastruktur jalan Kabupaten, jalan poros Desa, Jalan Desa.	Presentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	Persen	>90%	>93%	>95%	DBMSDA	APBD
	3	kebutuhan air baku industri dan tenaga listrik kawasan industri terintegrasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Baku	Persen	>65%	>80%	100%	DBMSDA	APBD
	4	Pengembangan Pendataan Jalan dan Jembatan	Rata-rata Persentase pendataan kondisi Jalan di Kecamatan	Persen	>90%	93,00%	95,00%	DBMSDA	APBD
	5	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Drainase	Prosentase Infrastruktur Drainase dalam Kondisi Baik	% Panjang Drainase	11,93%	12,43%	12,93%	DBMSDA	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan		Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
					Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
Ec.2. Peningkatan aksesibilitas dunia kerja serta penguatan pemberdayaan masyarakat secara inklusif	6	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Lowongan Kerja yang Terdaftar	Persen	96%	96.9%	96.9%	DISNAKER	APBD
	7	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya Informasi pasar Kerja	Lowongan	20000	20000	20000	DISNAKER	APBD
	8	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karier hub)	Orang	500	500	500	DISNAKER	APBD
	9	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	500	500	500	DISNAKER	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
				Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
	10 Pengembangan Sistem Informasi Perusahaan (SILPEH) berbasis web dan mobile	Sistem Informasi	√	√	√	√	Disperindag	APBD
	11 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Koperasi berkualitas	persen	17,86%	17,86%	17,86%	Dinas KUKM	APBD
	12 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahunan sesuai dengan angka kebutuhan gizi	Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan	Persen	80%	85%	90%	DPKP	APBD
	13 Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	cadangan pangan Pemerintah Daerah	Persen	16.9%	23.03%	29.15%	DPKP	APBD
	14 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Laju Peningkatan Jumlah Produksi Pertanian	Persen	1%	1%	1%	DPKP	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
				Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
	15 Pengembangan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produk olahan perikanan yang dipasarkan dalam e-commerce	Jumlah	>300	>350	>400	DISKAN,Dinas KUKM,Diskominfo	APBD
	16 Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan yang Diberdayakan	Orang	180	180	180	DISKAN	APBD
	17 Program pengelolaan perikanan tangkap pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	Kelompok	3	3	3	DISKAN	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan		Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
					Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
	18	Program pengelolaan perikanan tangkap pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	Orang	150	150	150	DISKAN	APBD
Ec.3. Perluasan pembiayaan usaha	19	Program Pelayanan Penanaman Modal	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan Investasi	Angka	90,5	91	91,5	DPMPTSP	APBD
	20	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan minat investasi	Persen	25%	25%	25%	DPMPTSP	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
				Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
	21 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase Usaha Mikro yang diberdayakan	Persen	2,8	3,1	3,5	Dinas Koperasi dan UsahaMikro	APBD
	22 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB	Persen	Koperasi : 2,14	Koperasi : 2,14	Koperasi : 2,14	Dinas Koperasi dan UsahaMikro	APBD
Usaha Mikro : 5,95				Usaha Mikro : 5,95	Usaha Mikro : 5,95	Dinas Koperasi dan UsahaMikro	APBD	
Prosentase Usaha Mikro yang Dipromosikan		Persen	Usaha Mikro : 1,4	Usaha Mikro : 1,6	Usaha Mikro : 1,8	Dinas Koperasi dan UsahaMikro	APBD	

Smart Living

STRATEGI	Program/Kegiatan		Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
					Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
L.1. Pengendalian Pembangunan berbasis harmonisasi Penataan Ruang	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan RTBL (Target 1 Dokumen/Tahun)	Persen	0,6	0,8	1	DTRB	APBD
	2	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Ruang yang Terselenggara	Dokumen	0,37	0,46	0,67	DTRB	APBD
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Sinkronisasi RDTR di Kabupaten Tangerang	Persen	0,2143	0,2857	0,4286	DTRB	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
				Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
	4 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Terselenggara	Persen	0,58	0,79	1	DTRB	APBD
	5 Integrasi layer peta sektoral dari tiap-tiap OPD ke dalam WebSIG yang dikelola DTRB	Persentase Informasi Spasial sektoral yang dintgerasikan di webSIG	Persen	>75%	>80%	>100%	DTRB,Bappeda	APBD
	6 Pengembangan Sistem Informasi pengendalian tata ruang berbasis Geographic Information System (GIS) yang terintegrasi dengan Tangerang Satu Data	Sistem Informasi	√	√	√	√		APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan		Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
					Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
L.2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan preventif, promotif, dan kuratif	7	Pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional (Universal Health Coverage)	Persentase UHC	Persen	100%	100%	100%	DINKES	APBD
	8	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100%	100%	100%	DINKES	APBD
	9	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	2	2	2	DINKES	APBD
L.3. Pengembangan Tangerang Smart Mobility	10	Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	6	6	6	DISHUB	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan		Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
					Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
Intra City dengan prioritas keramahan pelayanan, kenyamanan fasilitas, dan efisiensi	11	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelayanan Angkutan Massal	Unit	32	34	38	DISHUB	APBD
	12	Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit	434	444	431	DISHUB	APBD
	13	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Unit	500	600	700	DISHUB	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
				Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
	14 Peningkatan kelancaran mobilitas penduduk melalui pengembangan Automatic Traffic Control System (ATCS) di titik kerawanan	Persentase Persimpangan dengan ATCS	Persen	>50%	>50%	>50%	Dishub, Bappeda, Diskominfo	APBD

Smart Society

STRATEGI	Program/Kegiatan		Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
					Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
S.1. Peningkatan kemitraan kerjasama lintas sektoral dalam membangun komunitas cerdas	1	Pembinaan Keagamaan	Pembinaan guru ngaji melalui media digital	Orang	3014	3014	3014	Setda Kesra	APBD
	2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan	Persen	100%	100%	100%	DISPORAB UDPAR	APBD
	3	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan dan Pengembang	Persen	100%	100%	100%	DISPORAB UDPAR	APBD
	4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kebudayaan	Orang	30	30	30		APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
				Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
	5 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	14,29%	14,29%	14,29%	BKESBAN GPOL	
	6 Terlaksananya pembinaan IMP dan Organisasi lainnya tentang Bangga Kencana	Jumlah kelompok IMP yang dibina	Kelompok	274	274	274	DPPKB	APBD
	7 Pendayagunaan PKB/ PLKB dalam Program Bangga Kencana	Jumlah peserta PKB/PLKB yang didayagunakan	Orang	58	58	58	DPPKB	APBD
	8 Terlaksananya pembinaan Terpadu Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)	Jumlah Kampung KB yang dibentuk dan dibina	Kp. KB	114	134	154	DPPKB	APBD
S.2. Pengembangan layanan pendidikan	9 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	Persen	100%	100%	100%	DISDIK	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan		Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
					Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
terintegrasi berbasis infrastruktur dan suprastruktur pendidikan	10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	Persen	100%	100%	100%	DISDIK	APBD
	11	Pengelolaan Pendidikan PAUD	Tersedianya Jumlah PAUD yang dikelola	Persen	100%	100%	100%	DISDIK	APBD
	12	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Jumlah Non Formal/ Kesetaraan yang dikelola	Persen	100%	100%	100%	DISDIK	APBD
	13	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tercapainya Peserta Didik yang Melaksana kan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Satuan Pendidikan	10.000	10.000	10.000	DISDIK	APBD
	14	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pengelolaan perpustakaan	Persen	100%	100%	100%	DINPERPUSIP	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
				Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
	15 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan	6	6	6	DINPERPUSIP	APBD
	16 Kegiatan Sosialisasi Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pemenuhan pembudayaan gemar membaca	Persen	100%	100%	100%	DINPERPUSIP	APBD
	17 Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus	Lokus	200	210	220	DINPERPUSIP	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
				Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
	18 Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian pemenuhan pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota	Persen	100%	100%	100%	DINPERPUSIP	APBD
	19 Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian pemenuhan pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota	Persen	100%	100%	100%	DINPERPUSIP	APBD
	20 Sub Kegiatan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	Arsip	10000	10000	10000	DINPERPUSIP	APBD
	21 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	63	63	63	DINPERPUSIP	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
				Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
	22 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	40	40	40		APBD
	23 Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya	Perpustakaan	8	8	8		APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
				Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
	24 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	dokumen	1	1	1	Bappeda	APBD
S.3. Pengembangan Layanan Tangerang Call Center	25 Pengembangan Tangerang Inclusive Call Center	Sistem Informasi dan Operasional	v				Diskominfo, BPBD, Dinkes, Satpol PP, Kepolisian	APBD
	26 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan sistem informasi penunjang pelayanan kesehatan	Tahun pengembangan sistem informasi	-	v	-	-	DINKES	APBD
	27 Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat	Prosentase keberhasilan rujukan antar RS melalui call center 119	Persen	80%	85%	100%	DINKES	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
				Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
	Darurat Terpadu (SPGDT)	integrasi SPGDT dengan Sisrute (Sistem Informasi rujukan terpadu)	Persen	40%	60%	80%	DINKES	APBD

Smart Environment

STRATEGI	Program/Kegiatan		Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
					Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
En.1. Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara terpadu	1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen Rencana	Dokumen	Verifikasi KLHK		Perda RPPLH	DLHK	APBD
	2	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana	Dokumen	Verifikasi KLHK		Perda RPPLH	DLHK	APBD
	3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Presentase Peningkatan Kualitas Lingkungan (Udara/Air)	Persen	50/10	50/10	50/10	DLHK	APBD
	4	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	Meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	58/71	58,5/72	59/73	DLHK	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan		Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
					Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
	5	Program Pengelolaan SDA	Persentase Infrastruktur Sungai dan Pembuang dalam Kondisi Baik	%	70,20%	77,20%	84,20%	DBMSDA	APBD
	6	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	25	25	25	DBMSDA	APBD
	7	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Dokumen	3	3	2	DLHK	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan		Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
					Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
En.2. Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah dan limbah berbasis Reduce, Reuse, Recycle, Replace	8	Penyusunan Rencana, Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	2	DLHK	APBD
	9	Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Pengelolaan Sampah	Persen	60%	62%	64%	DLHK	APBD
	10	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Kelompok	10000%	12000%	15000%	DLHK	APBD

STRATEGI	Program/Kegiatan		Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
					Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
	11	Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Presentase tindak lanjut pengaduan, pengelolaan limbah B3	Persen	100%	100%	100%	DLHK	APBD
	12	Penyimpanan sementara limbah B3	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan pihak swasta	Laporan	60	80	100	DLHK	APBD
En.3.Pengembangan energi alternatif berbasis pengembangan sumber daya energi melalui komoditas sampah organik (wasteto energy)	13	Pelaksanaan gerakan hemat energi di lingkup perkantoran pemerintah, swasta, sekolah, dan masyarakat	Jumlah Gerakan Hemat energi Per Tahun	-	4	4	4	DLHK	APBD
	14	Pengembangan Smart PJU	Jumlah titik pengembangan smart PJU	Unit	>20	>50	>100	Dishub	APBD

BAB VI QUICK WINS

6.1 Pedoman Quick Wins

Quick Wins Masterplan Smart City Kabupaten Tangerang akan mendorong terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera. Melalui quick wins diharapkan dapat menjadi momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri untuk selanjutnya melaksanakan Smart City secara konsisten dan berkelanjutan.

Keluaran dari pelaksanaan quick wins adalah perbaikan sistem dan mekanisme kerja atau produk utama Pemerintah Kabupaten Tangerang yang sesuai dengan peran, tupoksi dan karakteristik masing-masing. Untuk mengawal dan memandu pelaksanaan quick wins, maka perlu dipahami bagaimana pelaksanaannya. Tujuan quick wins adalah :

1. Memberikan panduan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menentukan dan melaksanakan quick wins.
2. Memberikan panduan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan quick wins.

Quick wins harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat dari Inovasi, merupakan penerima manfaat, dampak/keuntungan/manfaat yang didapatkan dari inovasi baik secara langsung maupun tidak langsung, bersifat intern maupun ekstern. Penilaian kriteria ini terbagi menjadi 2, antara lain :

Nilai	Penjelasan
1	manfaat dari inovasi dirasakan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (OPD)
3	manfaat dari inovasi dirasakan Pemerintah Kabupaten dilingkungan Tangerang sampai dengan pihak ekstern (pihak luar/ stakeholder)

- b. Keunikan/ Kreativitas. Kreativitas, pemikiran baru, kekhasan yang diperkenalkan, originalitas, pembedaan dari inovasi sejenis lainnya. Penilaian ini terbagi menjadi 2, antara lain :

c.

Nilai	Penjelasan
1	Keunikan/ kreativitas sudah ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (OPD)
3	Belum ada Keunikan/ kreativitas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (OPD)

- d. Kemitraan. Pelibatan pihak lain dalam pembangunan, implementasi dan evaluasi (nama para pihak, peran, dan status progres kemitraan). Dapat berupa instansi pemerintah, sektor pendidikan, sektor usaha, organisasi profesi atau elemen masyarakat/komunitas yang dapat berkontribusi. Penilaian Kriteria ini terbagi menjadi 2, antara lain :

e.

Nilai	Penjelasan
1	Melibatkan pihak internal OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang
3	Melibatkan pihak eksternal di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang

f. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut. Peluang untuk pengembangan/peningkatan dari sisi produk inovasi, ruang lingkup/jangkauan, replikasi, penyebaran dan lain lain. Penilaian Kriteria ini terbagi menjadi 2, antara lain :

Nilai	Penjelasan
1	Dapat dikembangkan dilingkungan Internal (OPD) Pemerintah Kabupaten Tangerang
3	Dapat dikembangkan diluar lingkungan OPD Pemerintah Kabupaten Tangerang

6.2 Program Quick Wins Smart City

Program Quick Wins Smart City Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada table berikut ini :

No	Nama Quick Win (Program/Kegiatan)	Instansi/OPD	Fungsi/ Manfaat	Status	Dimensi Smart City
1	SI JEMPOL	RSUD	Digunakan untuk mengakses berbagai layanan yang diberikan oleh RSUD menggunakan gadget dengan platform Android.	Sudah diimplementasikan sejak 2017 dan terus dikembangkan secara bertahap. Masih akan terus dikembangkan dan sudah masuk ke Renstra.	Smart Governance, Smart Living
			Terdiri dari beberapa modul, yaitu:		
			SIRESPON (pendaftaran online)		
			E-BROJOL (pembuatan akte lahir yang terintegrasi dengan Dukcapil)		
			INFOTON (informasi kesediaan tempat tidur)		
			SIHAKMAS		
			E-RESEP		
SI AWAK CAGEUR (sistem aplikasi layanan RSUD menggunakan WhatsApp)					
2	GSM (Gerakan Sekolah Menyenangkan)	Dinas Pendidikan --> lintas OPD	Gerakan untuk merealisasikan konsep bahwa sekolah adalah taman yang menyenangkan.	Sudah berjalan dan masih terus diperluas dengan koordinasi bersama beberapa OPD.	Smart Society
			Membangun lingkungan belajar, pembelajaran dan penilaian, keterlibatan orang tua dalam komunikasi dalam proses belajar.		
			Mengintegrasikan beberapa program lainnya yang sudah berjalan seperti halnya KURASAKI.		

No	Nama Quick Win (Program/Kegiatan)	Instansi/OPD	Fungsi/ Manfaat	Status	Dimensi Smart City
3	Literasi Berbasis Inklusi Sosial --> Transformasi bentuk dan aktifitas serta peran perpustakaan	Dinas Perpustakaan	<p>Penyediaan informasi literasi berdasarkan pemetaan kebutuhan masyarakat yang ada di lapangan --> literasi untuk meningkatkan kesejahteraan.</p> <p>Program yang dijalankan bekerja sama dengan IZI, melakukan pendataan kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan perpustakaan yang ada di desa.</p> <p>Pelatihan keahlian dalam bentuk literasi dengan pemanfaatan mentor yang ada di sebuah wilayah.</p> <p>Peningkatan peran perpustakaan di desa sebagai pusat informasi.</p>	Sudah berjalan di 6 desa dan dimulai di tahun 2019. Saat ini sudah dimasukkan ke dalam RPJM Kab. Tangerang.	Smart Society
4	Kampung KB Terintegrasi	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	<p>Implementasi program nasional (BKKBN) Kampung KB melalui koordinasi dengan berbagai dinas sehingga tercipta sebuah ekosistem Kampung KB yang terintegrasi.</p> <p>Quick Win yang diusulkan adalah terkait dengan model integrasi antar OPD yang telah dilakukan dalam implementasi Kampung KB melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Disnaker, dan lainnya.</p>	Sudah berjalan sejak 2015 dan integrasi dilakukan di 2018 --> memperoleh peringkat 4 untuk percontohan Kampung KB nasional.	Smart Living, Smart Society

No	Nama Quick Win (Program/Kegiatan)	Instansi/OPD	Fungsi/ Manfaat	Status	Dimensi Smart City
5	AJAK POIMAH	Dinas Dukcapil	Antar Jemput Akta Kematian Sampai Rumah, layanan untuk menjemput dokumen yang dibutuhkan untuk pembuatan akta kematian yang kemudian akan diantarkan langsung apabila akta kematian sudah selesai.	Mulai berjalan tahun 2018 dan masih berjalan di tahun 2025 dengan adanya perluasan.	Smart Governance
6	Tangerang Mantap (Mandiri Tahan Pangan) --> Optimalisasi LP2B	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Fokus pada optimalisasi lahan pangan berkelanjutan dan pengembangan kawasan agropolitan --> fokus pada eksistensi lahan pertanian, khususnya yang memiliki irigasi.	Dimulai tahun 2019 dengan aktifitas perencanaan dan pemetaan. Belum selesai di tahun 2019.	Smart Economy
			Pemetaan lahan yang akan difungsikan sebagai lahan LP2B yang akan menjadi bagian dari RTRW.		
			Di tahun 2019 masuk pada tahap perencanaan dan pemetaan.		
7	Sentra Komoditi Holtikultura	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Membangun sentra pengembangan komoditi holtikultura untuk peningkatan produktifitas dan juga penanganan pasca panen hingga ke tahap pemasarannya.	Dimulai tahun 2019 dengan aktifitas perencanaan dan pemetaan. Belum selesai di tahun 2019.	Smart Economy

No	Nama Quick Win (Program/Kegiatan)	Instansi/OPD	Fungsi/ Manfaat	Status	Dimensi Smart City
			<p>Penetapan kawasan agropolitan guna meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani serta meningkatkan kesadaran akan bentuk pertanian holtikultura dan juga untuk memberikan nilai tambah kepada produk holtikultura yang dihasilkan.</p> <p>Lokasi percontohan urban farming dan pertanian organik serta pemrosesan pasca panen.</p>		
8	<p>Gerbang Mapan: BUDAYAKAN BATIK (budi daya ikan secara bersih, aman pangan dengan penggunaan probiotik</p>	Dinas Perikanan	<p>Fokus pada peningkatan produksi budi daya lele yang masih dibawah kebutuhan pasar.</p> <p>Perubahan bentuk kolam budi daya lele dengan teknologi bioflok, pangan berupa ikan nila dan diberikan probiotik. Program merupakan pemberian kelengkapan unit kepada masyarakat pembudidaya lele</p>	<p>Sudah mulai dilaksanakan 1 periode, pada 2014-2018 dan saat ini memasuki periode ke-2 dengan penyesuaian lokasi.</p>	Smart Economy
9	<p>PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p>	<p>Fokus pada pencegahan terhadap kekerasan pada anak dan perempuan.</p> <p>Pembentukan kelompok yang memiliki kader dan juga psikolog (2 profesional dan 1 tenaga administrasi) --> saat ini memanfaatkan lokasilokasi seperti Posyandu, BKB PAUD atau fasum lainnya.</p>	<p>Mulai berjalan tahun 2019.</p>	Smart Society

No	Nama Quick Win (Program/Kegiatan)	Instansi/OPD	Fungsi/ Manfaat	Status	Dimensi Smart City
10	Kabupaten Tangerang Tertib Ukur	Disperindag	Memastikan ketertiban alat ukur yang digunakan di pasar guna memberikan perlindungan pada konsumen, serta adanya standar dalam pengukuran dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dalam sistem pengawasan.	Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dari tahun ke tahun.	Smart Economy
11	KURASAKI dan KURASAKAN	Dinas LH dan Kebersihan	Kurangi Sampah di Sekolah Kita dan Kurangi Sampah di Kantor -- > program untuk pengurangan produksi sampah.		Smart Environment

BAB VII PENUTUP

Buku Masterplan Smart City Kabupaten Tangerang ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Smart City di Kabupaten Tangerang dalam rangka Gerakan Menuju 100 Smart City di Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan kolaborasi bersama Kementerian dan Lembaga Pemerintah Republik Indonesia, serta peran aktif berbagai pihak lain.

Buku Masterplan Smart City Kabupaten Tangerang ini disusun dengan memperhatikan peraturan perundangan yang masih berlaku hingga buku ini disusun. Buku Masterplan Smart City ini diharapkan dapat menjadi Pemandu Arah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program smart city di Kabupaten Tangerang, juga sebagai pemandu bagi seluruh elemen masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pelaksanaan smart city di Kabupaten Tangerang. Dalam pelaksanaannya, sangat dimungkinkan adanya revisi dari tahun ke tahun oleh Dewan Smart City sesuai dengan perkembangan situasi dan teknologi. Hal tersebut diharapkan dapat memperkaya proses pengembangan smart city di Kabupaten Tangerang. Segala masukan dan informasi dari masyarakat sangat kami harapkan, demi untuk memperbaiki Buku Masterplan Smart City Kabupaten Tangerang ini dari tahun ke tahun.

3

Masterplan Smart City Kabupaten Tangerang



2025-2026

**“Kabupaten Tangerang Berdaya
Saing Menuju Masyarakat Madani”**



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tangerang**

KEYNOTE SPEECH BUPATI TANGERANG

Dalam buku ketiga ini, kami ingin memandang ke masa depan Smart City Kabupaten Tangerang dengan visi yang inspiratif. Kami menyadari bahwa konsep Smart City tidak hanya relevan sebagai pusat pelayanan yang canggih, tetapi juga harus memiliki fungsi yang mendalam. Kami telah melihat bahwa inovasi dan pemecahan masalah yang menjadi prioritas, serta pengembangan sektor unggulan, adalah kunci utama untuk mencapai kesuksesan dalam mewujudkan Smart City di wilayah kami.

Dalam upaya kami untuk membentuk masa depan yang cerdas, kami akan segera menyusun Surat Keputusan Bupati mengenai Pembentukan Dewan Smart City Kabupaten Tangerang dan Pembentukan Tim Pelaksana Smart City Kabupaten Tangerang. Dewan Smart City Kabupaten Tangerang akan melibatkan pemimpin pemerintahan, tokoh masyarakat, ahli perguruan tinggi, LSM, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta. Tugas utama Dewan Smart City adalah merumuskan visi, misi, dan kerangka strategis pembangunan Smart City Kabupaten Tangerang, sementara Tim Pelaksana akan menjadi motor penggerak implementasi konsep Smart City yang telah ditetapkan.

Kami juga ingin menegaskan bahwa Kabupaten Tangerang dengan sungguh-sungguh mendukung Gerakan Mewujudkan 100 Smart City yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kantor Staf Kepresidenan, serta rekan-rekan pemerintah di berbagai daerah, kami berkomitmen untuk menciptakan kerja sama lintas sektor yang kuat dalam menghadapi fenomena zaman ini.

Kami ingin menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Buku 3 Masterplan Smart City Kabupaten Tangerang. Kolaborasi ini menciptakan buku yang terstruktur dengan baik dan akan menjadi panduan kami dalam mencapai visi dan misi pembangunan yang berkelanjutan. Melalui langkah-langkah Smart City, kami optimis Kabupaten Tangerang akan berkembang menjadi wilayah yang tak hanya memiliki daya saing tinggi, tetapi juga kaya akan inovasi dan praktik cerdas dalam pelayanan publik sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026 Kabupaten Tangerang. Kami berharap wilayah kami menjadi tempat yang nyaman, menyenangkan, dan penuh dengan peluang untuk ditinggali. Terima kasih atas dedikasi dan kontribusi semua pihak. Mari bersama-sama membangun masa depan yang cerah untuk Kabupaten Tangerang yang lebih baik.

DAFTAR ISI

KEYNOTE SPECH BUPATI TANGERANG	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
BAB II ANALISIS KESIAPAN KABUPATEN TANGERANG.....	8
BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY KABUPATEN TANGERANG	13
BAB IV PETA JALAN SMART CITY KABUPATEN TANGERANG	18
BAB V PENUTUP	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan persaingan di seluruh dunia saat ini telah berubah dari fokus pada meningkatkan daya saing nasional atau negara menjadi lebih menitikberatkan pada daya saing kota atau daerah. Kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Denpasar, Makassar, dan lainnya, sekarang bersaing dengan kota-kota seperti Singapura, Kuala Lumpur, Johor Bahru, Osaka, Seoul, Tokyo, Mumbai, dan lainnya, untuk menjadi pilihan utama bagi masyarakat global dalam berbagai aktivitas seperti investasi, perdagangan, pariwisata, dan kemitraan bisnis. Di saat yang bersamaan, masyarakat di suatu daerah semakin menuntut agar lingkungan tempat tinggal mereka menjadi lebih baik, yakni nyaman, aman, sehat, berkelanjutan, dan inovatif. Dengan demikian, sebuah kota atau daerah harus memenuhi kriteria-kriteria tersebut agar dapat bersaing dengan sukses di tingkat global.

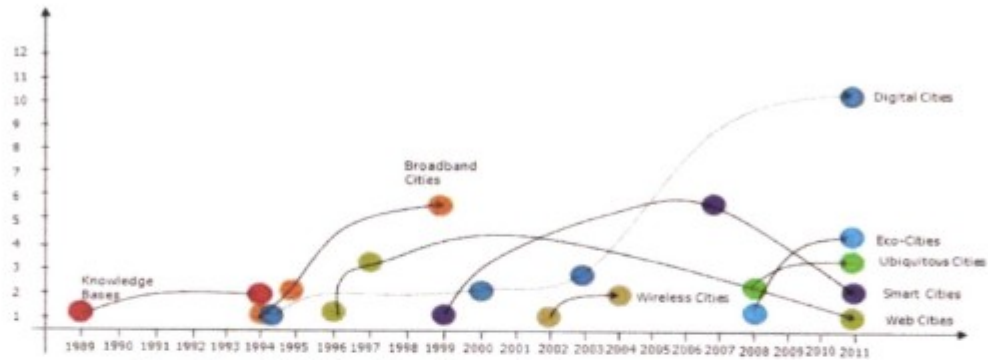
Saat ini, revolusi digital telah mengubah cara kita hidup, bahkan memengaruhi masa depan peradaban manusia. Gerd Leonhard menjelaskan bahwa digitalisasi telah mengakibatkan perubahan yang tidak hanya cepat, tetapi juga dihasilkan melalui berbagai kombinasi faktor. Hal ini membawa kita ke era di mana perubahan yang akan terjadi dalam dua dekade mendatang akan melebihi perubahan yang terjadi dalam tiga ratus tahun terakhir. Salah satu perubahan yang sangat mencolok adalah percepatan urbanisasi di seluruh dunia. Pada tahun 2014, sebuah studi oleh PBB mengenai tren urbanisasi dunia menunjukkan bahwa, untuk pertama kalinya dalam sejarah, lebih dari setengah populasi dunia (54%) tinggal di daerah perkotaan. Untuk memberikan gambaran, pada tahun 1950, hanya 30% dari penduduk dunia yang tinggal di kota. Tren urbanisasi ini diperkirakan akan terus berlanjut, dan diperkirakan bahwa pada tahun 2050, sekitar 66% dari populasi dunia akan tinggal di daerah perkotaan. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2015, sekitar 53,3% dari penduduk tinggal di kota, dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Citiasia Center for Smartnation (CCSN), persentase ini diperkirakan akan meningkat menjadi 68% pada tahun 2035.

Digitalisasi juga telah memperluas makna urbanisasi itu sendiri. Istilah urbanisasi pertama kali muncul selama revolusi industri, ketika orang-orang beralih dari mata pencaharian pertanian ke pekerjaan di industri dan manufaktur di kota. Orang-orang dari desa bermigrasi ke kota untuk bekerja di pabrik-pabrik, yang menjadi peluang baru terutama berkat penemuan seperti mesin uap, mekanisasi, dan elektrifikasi. Pada saat itu, perbedaan fisik dan lokasi sangat jelas terlihat. Namun, saat ini, dalam era digital, batasan fisik tersebut menjadi kabur atau bahkan dalam beberapa kasus tidak ada sama sekali. Ini berarti urbanisasi tidak lagi hanya tentang perpindahan fisik, tetapi juga melibatkan perubahan dalam gaya hidup dan interaksi sosial-budaya dari pola pedesaan ke pola urban.

Masyarakat perkotaan adalah sebuah sistem yang rumit di mana unsur-unsurnya, yaitu manusia, teknologi, dan lingkungan, saling terkait dan saling memengaruhi. Pertumbuhan kota selalu membawa tantangan baru seperti kemiskinan, kemacetan, ketimpangan sosial, kriminalitas, penurunan sumber daya alam, polusi, masalah kesehatan, dan berbagai permasalahan lainnya. Untuk mengatasi beragam masalah perkotaan tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif, dan efisien. Pembangunan berbasis Smart City telah menjadi tren global dalam pembangunan kota dan wilayah, dan telah menjadi suatu keharusan bagi seluruh daerah dan kota di Indonesia. Pembangunan Smart City tidak hanya berarti meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga berarti menciptakan masyarakat yang didukung oleh infrastruktur dan fasilitas TIK sebagai penggerak perkembangan.

Gerakan pembangunan Smart City dapat kita temukan di berbagai belahan dunia, seperti Barcelona, Tokyo, London, Berlin, Amsterdam, Melbourne, Seoul, Shanghai, Mumbai, Singapura, dan sebagainya. Setiap kota di dunia ini memiliki cerita sukses dalam pengembangan Smart City, yang berbeda-beda sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing kota. Sebagai contoh, di Korea, sebuah Smart City dibangun dari awal pada lahan reklamasi seluas 600 hektar. Di Dubai, kota Masdar mengambil langkah-langkah untuk mandiri dalam energi surya dan energi terbarukan, dengan tujuan menjadi kota bebas emisi karbon. Amsterdam fokus pada pengembangan Smart People, Smart Energy, dan Smart Waste Management. Di Singapura, pembangunan Smart City dikelola di bawah Prime Minister Office sebagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga, pengusaha, dan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi, ide, aplikasi, dan data besar.

'Kota Cerdas' bertujuan untuk mengurangi tantangan yang dihadapi kota-kota, seperti kelangkaan sumber daya energi, layanan kesehatan, perumahan, air, dan infrastruktur yang memburuk (jalan, sekolah, dan transportasi). Mereka juga menderita ketidakstabilan harga, perubahan iklim, dan permintaan untuk peluang ekonomi dan manfaat sosial yang lebih baik (Washburn et al. 2010). Kemajuan terbaru dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), selaras dengan pengurangan biaya teknologi, seperti aplikasi seluler murah, media sosial gratis, komputasi awan, dan cara hemat biaya untuk menangani data volume tinggi, memberi kota peluang dan alat yang lebih baik untuk memahami, berkomunikasi, dan memprediksi fungsi perkotaan (Susanne Dirks dan Mary Keeling 2009; Berst et al. 2013). Dalam konteks ini, proyek Kota Cerdas dan Kota Pintar dipandang sebagai pendekatan holistik untuk perencanaan kota (Roberto Requena et.al., 2014). Shah (2015) tentang Program 100 Kota Pintar Pemerintah India mengatakan ini adalah tentang membuat kota lebih baik dan dia menekankan perlunya melompat ke arah membawa kota ke tingkat di mana mereka memberikan kualitas hidup yang dituntut masyarakat, yang diharapkan oleh kaum muda dan yang apakah semua orang benar. Himmel et al. (2014) menyimpulkan dengan kebutuhan untuk memahami tantangan perkotaan saat ini oleh para pemuda, yang merupakan 25 persen dari populasi dunia saat ini dan 28 persen (UNFPA 2015) dalam kasus India dan secara aktif berpartisipasi dalam keterlibatan sipil.



Gambar 1.1 Evolusi Pendekatan Smart City
Sumber: Anthopoulos & Fitsilis 2013

Dalam Anthopoulos & Fitsilis (2013) disajikan peta jalan untuk Kota Cerdas. Berdasarkan penelitian ini, terbukti bahwa Smart Cities telah muncul selama 20 tahun terakhir dari bentuk web awal mereka ke status modern di mana-mana dan ramah lingkungan dan dianggap sebagai lingkungan e- Government yang menguntungkan. Garis waktu yang disajikan di bawah ini menunjukkan adanya berbagai pendekatan alternatif untuk Smart City. Peta jalan dalam kasus ini digambarkan melalui metode pemetaan jalan teknologi untuk memahami tren terkini dalam evolusi Kota Cerdas dan untuk membenarkan pendekatan alternatif. Peta jalan ini disusun berdasarkan perangkat layanan elektronik yang ditawarkan oleh Smart Cities dan bisa menjadi alat yang berguna untuk badan-badan lokal perkotaan (ULB). Dari analisis berbagai pendekatan untuk Kota Cerdas ini, dapat dipahami bahwa faktor teknologi merupakan penentu utama bagi kelangsungan Kota Cerdas. Hal ini juga menimbulkan masalah indeks kelayakan dalam mengukur keberlanjutan Kota Cerdas.

Namun perlu dipahami bahwa konsep Smart City adalah konsep yang unik dan dinamis. Inisiasi-inisiasi yang muncul sebagai solusi akan permasalahan kota yang satu tidak serta merta bisa diaplikasikan sebagai solusi akan permasalahan yang muncul di kota yang lain. Hal ini terjadi karena Smart City menekankan pentingnya sebuah inovasi untuk menyelesaikan persoalan masing-masing kota dengan memanfaatkan teknologi TIK, sensor, dan data analytic sebagai faktor pendukung untuk mempermudah penyelesaian masalah (enabling factor). Pembangunan berbasis Smart City menyediakan ruang inovasi yang luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, masyarakat, pelaku bisnis, dunia pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) lain. Jadi inisiasi Smart City yang muncul bukanlah solusi mutlak yang menutup pintu inovasi dan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu diperlukan adanya panduan agar pemerintah kabupaten dan kota mampu mempersiapkan dan mengimplementasikan konsep Smart City dengan baik sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki.

Di tengah-tengah cepatnya laju perkembangan teknologi, berbagai kota di seluruh penjuru dunia berlomba-lomba untuk menjadi yang tercepat dan terbaik dalam implementasi Smart City. Tentu saja yang menjadi tujuan utama adalah untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan dan mendukung peningkatan kualitas hidup warga, namun lebih jauh kotakota tersebut juga terus bersaing demi menyandang predikat atau penghargaan sebagai Smart City atau Kota Pintar.

Integrasi teknologi dalam tata kelola kota untuk mewujudkan Smart City dimungkinkan berkat keberadaan internet of things, yaitu jaringan perangkat elektronik yang saling terhubung dan mampu mengirim data ataupun melakukan tindak lanjut dengan campur tangan manusia yang minimal. Peran internet of things (IoT) dalam mewujudkan konsep smart city sangatlah vital. Perangkat IoT mampu mengirim informasi dan melakukan tindak lanjut melalui jaringan dengan campur tangan manusia yang minimal, sehingga mampu melakukan beragam fungsi secara otomatis. Sedangkan operasional perangkat IoT hanya memerlukan tiga elemen utama, yakni Perangkat fisik, Jaringan internet, dan Aplikasi.



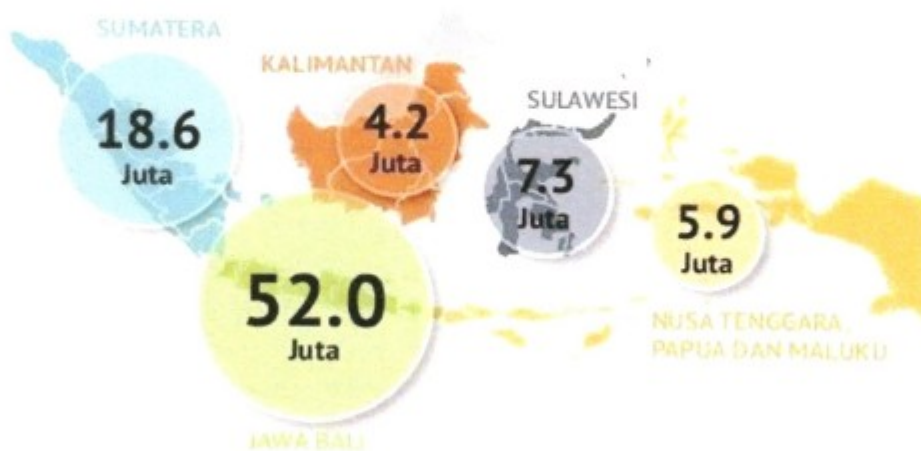
Gambar 1.2 Elemen IoT

IESE pada tahun 2016 merilis Cities in Motion Index yang mengukur implementasi Smart City berbagai kota di dunia secara menyeluruh berdasarkan 77 indikator yang mencakup 10 dimensi dalam tata kelola perkotaan diantaranya: ekonomi, teknologi, sumber daya manusia, kohesi sosial, jangkauan internasional, lingkungan, mobilitas dan transportasi, perencanaan perkotaan, manajemen publik serta tata kelola pemerintahan. Hasilnya kota-kota besar dunia seperti New York (USA), London (Inggris), Paris (Perancis), San Francisco (USA), Boston (USA), Amsterdam (Belanda), Chicago (USA), Seoul (Korea Selatan), Geneva (Swiss), Sydney (Australia), Copenhagen (Denmark) dan Tokyo (Jepang) tampil sebagai juara sebagai kota-kota terpintar di dunia. Sebagai gambaran di regional Asean Singapura menjadi yang terbaik di peringkat 22, Kota Bangkok (Thailand) berada di peringkat 84, Kuala Lumpur (Malaysia) di peringkat 88 sedangkan Jakarta (Indonesia) jauh tertinggal di peringkat 170.

Dalam proses transformasi menuju Smart City, pemanfaatan TIK memiliki peran yang sangat penting. AT Kearney dalam laporan bertajuk The Asean Digital Revolution menyebutkan bahwa investasi sektor TIK di Asean pada tahun 2014 telah mencapai angka US\$ 100 Juta dan akan terus meningkat sebesar 15% per tahun. Di Indonesia sendiri angka investasi di bidang TIK diproyeksikan akan mencapai angka US\$ 150 juta dalam tiga tahun kedepan. Informasi ini merupakan kabar yang menggembirakan mengingat fakta bahwa penetrasi teknologi Indonesia sangat jauh tertinggal dari negara- negara ASEAN lainnya.

Dalam pemanfaatan internet, Poulasi penduduk Indonesia saat ini mencapai 262 juta orang. Lebih dari 50 persen atau sekitar 143 juta orang telah terhubung jaringan internet sepanjang 2017, menurut laporan teranyar Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Mayoritas pengguna internet sebanyak 72,41 persen masih dari kalangan masyarakat urban. Pemanfaatannya sudah lebih jauh, bukan

hanya untuk berkomunikasi tetapi juga membeli barang, memesan transportasi, hingga berbisnis dan berkarya. Berdasarkan wilayah geografisnya, masyarakat Jawa paling banyak terpapar internet yakni 57,70 persen. Selanjutnya Sumatera 19,09 persen, Kalimantan 7,97 persen, Sulawesi 6,73 persen, Bali-Nusa 5,63 persen, dan Maluku-Papua 2,49 persen.



Gambar 1.3 Pengguna Internet di Indonesia

Price Waterhouse Coopers pada tahun 2015 merilis peringkat kesiapan teknologi (Ranking of Technological Readiness) negara-negara di ASEAN untuk mengimplementasikan Smart City, hasilnya negara di ASEAN yang secara teknologi paling siap untuk mengimplementasikan Smart City berturut-turut adalah Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, Vietnam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos dan Myanmar. Tampaknya banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dalam proses implementasi dan pengembangan Smart City di Indonesia. Jalan yang harus ditempuh masih sangat panjang dan tantangan yang harus dihadapi pun tidaklah ringan. Namun terlepas dari itu semua, proses implementasi Smart City di Indonesia secara konsisten dan bertahap terus digalakkan di berbagai kota di Indonesia. Arah implementasinya juga semakin jelas dengan adanya komitmen dan dorongan dari pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Sebagai bentuk dukungannya pemerintah terhadap pengembangan Smart City di Indonesia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bekerja sama dengan Kemendagri, Kementerian PAN & RB, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PU & PR, Kantor Staf Presiden menginisiasi penyelenggaraan Gerakan Menuju 100 Smart City. Pada tahun 2018 terpilih 25 kota/kabupaten yang akan didampingi dan dibimbing oleh para ahli dalam mengimplementasikan konsep Smart City. Program ini menargetkan pada tahun 2019 sebanyak 100 kota/kabupaten di Indonesia yang telah melaksanakan pembangunan Smart City dan menjadi rolemodel bagi daerah lain di Indonesia.

Tren Smart City juga disambut baik oleh berbagai daerah di Indonesia. Pembentukan UPT (Unit Pelaksana Teknis) Smart City adalah bentuk komitmen pemerintah DKI Jakarta dalam mengimplementasikan Smart City. Program-program unggulan unit ini diantaranya pembentukan portal Smart City yang bisa diakses di smartcity.jakarta.go.id, peningkatan partisipasi masyarakat melalui aplikasi Qlue, situs kinerja.jakarta.go.id, dan layanan SMS. Komitmen

yang sama juga ditunjukkan oleh Kota Bandung diantaranya melalui program pembentukan Dewan Pengembangan Bandung Smart City dan penancangan visi Bandung Technopolis serta Kota Surabaya diantaranya melalui program Gateway for Short Message (Gessy), Sistem Close Circuit TV(CCTV) dan Redesign Web Surabaya.go.id. Jauh dari hingar-bingar pemberitaan media dan perhatian massa kemajuan dalam pengembangan Smart City juga ditunjukkan oleh kota/kabupaten menengah dan kecil. Pada tahun 2012 Kota Pekalongan menduduki peringkat pertama PEGI (pemeringkatan e-gov) kabupaten/kota se-jawa tengah. Pekalongan juga menjadi kota percontohan penerapan e- gov berbasis Free and Open-Source Software (FOSS) oleh Kemenristek. Inisiasi yang berbeda ditempuh oleh Tomohon dan Banyuwangi, berangkat dari kesadaran akan potensi alamnya Tomohon memulai pengembangan daerah dengan program unggulan Tomohon Flower Festival. Sedangkan Banyuwangi membangun daerahnya dengan program unggulan seperti International Kite Boarding, Banyuwangi Ethno Carnival dan pengoperasian konsep green airport. Disini bisa dipahami bahwa konsep Smart City diimplementasikan bukan untuk mempersempit ruang inovasi dan eksplorasi, Smart City harus dipahami sebagai disiplin yang luas, berangkat dari tantangan dan potensi yang dimiliki setiap daerah bisa menentukan inovasi dan program prioritas masing-masing.

Gerakan pembangunan Smart City di Indonesia juga semakin semarak dengan munculnya lembaga-lembaga pengukuran dan pemeringkatan kinerja Smart City nasional. Indeks Daerah Pintar merupakan sebuah studi pengukuran dan pemeringkatan daerah-daerah di Indonesia yang dilakukan oleh Citiasia Center for Smart Nation (CCSN) terhadap 98 kota, 412 kabupaten, dan 34 provinsi di Indonesia. Pemeringkatan ini mengevaluasi Kesiapan Daerah dalam Smart City dan Kinerja Smart City Daerah terhadap 6 elemen yaitu governance, branding, economy, living, society, dan environment. Daerah dengan hasil terbaik kemudian diapresiasi dalam acara tahunan Indonesia Smart Nation Award (ISNA). Pengukuran Indeks Smart City juga dilakukan oleh harian Kompas bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) melalui Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI). Daerah dengan indeks terbaik kemudian diapresiasi melalui acara Anugerah Kota Cerdas yang memberikan penghargaan untuk Smart City dari tiga kategori, yaitu kategori ekonomi, kategori sosial, dan kategori lingkungan hidup.

Gerakan Menuju 100 Smart City yang dicanangkan oleh Kementerian Kominfo bertujuan untuk mendorong Kota dan Kabupaten di Indonesia melakukan akselerasi pembangunan dengan menggunakan konsep Smart City atau Daerah Pintar. Mulai dari penyusunan Masterplan Smart City, merencanakan dan melaksanakan program "Quick Win" Smart City dan melaksanakan roadmap atau peta jalan pembangunan Smart City dalam 5 hingga 10 tahun. Pada tahun 2018, Gerakan Menuju 100 Smart City memilih 25 Kota dan Kabupaten berdasarkan assessment yang dilakukan oleh tim ahli dari berbagai kalangan yang ditunjuk oleh Kemkominfo. Kementerian Kominfo akan memfasilitasi 25 Daerah tersebut dengan menyediakan tenaga ahli pendamping untuk mendampingi daerah dalam menyusun Masterplan Smart City dan merencanakan dan melaksanakan program "Quick Win" Smart City. Kementerian Kominfo mengharapkan Masterplan Smart City tersebut akan menjadi panduan daerah dalam melakukan implementasi pembangunan berbasis Smart City dalam jangka waktu 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun kedepan yang akan di review setelah 5 (lima) tahun

pertama dilaksanakan.

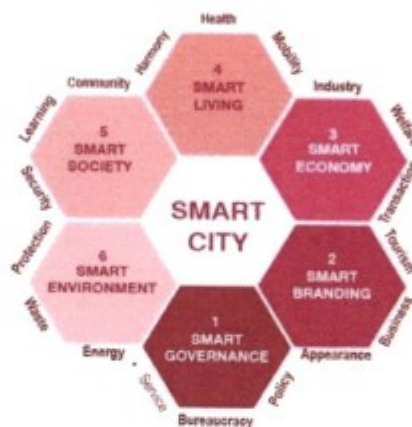
Kementerian Kominfo akan melanjutkan program pendampingan di tahun 2018 terhadap 75 Kota dan Kabupaten melalui proses yang sama seperti yang telah dilakukan di tahun 2018. Program Gerakan Menuju 100 Smart City ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi Kota dan Kabupaten diluar 100 Kota dan Kabupaten yang terpilih oleh Kominfo melalui inisiatif daerah masing-masing. Dengan demikian membangun Smart City tidak hanya terhenti di 100 Kota dan Kabupaten tersebut, namun juga akan meliputi seluruh Kota dan Kabupaten di Indonesia yang pada akhirnya akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai Smart Nation.

Penyusunan Masterplan Smart City ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pemerintah Kabupaten Tangerang, serta pihak lain yang terlibat dalam proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi pengembangan Smart City Kabupaten Tangerang. Tujuan umum perumusan masterplan Tangerang Smart City adalah untuk menjadi pedoman dalam pengembangan 6 (enam) dimensi Smart City meliputi tata kelola birokrasi (smart governance), pemasaran daerah (smart branding), perekonomian (smart economy), ekosistem permukiman penduduk (smart living), lingkungan masyarakat (smart society), dan pemeliharaan lingkungan (smart environment) pada tahun 2025- 2026. Adapun tujuan teknis perumusan masterplan Tangerang Smart City secara khusus meliputi:

1. Masterplan Tangerang Smart City adalah dokumen perencanaan operasional pengembangan Smart City yang merupakan penjabaran dari merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang 2025- 2026;
2. Masterplan Tangerang Smart City selaras dan memiliki kesinambungan dengan dokumen perencanaan sektoral lainnya sesuai dengan urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
3. Masterplan Tangerang Smart City menjadi pedoman dalam perumusan visi Smart City, Quick Wins, Peta Jalan, dan menentukan strategi serta rencana aksi Smart City di 6 dimensi periode Tahun 2025-2026.
4. Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pengembangan Smart City di tingkat pusat dan Kabupaten Tangerang;
5. Menyediakan landasan materi dan implementasi praktis rencana pengembangan Kabupaten Tangerang berdasarkan konsep Smart City;
6. Menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan nasional dan daerah dalam dokumen perencanaan Smart City Kabupaten Tangerang;
7. Mendorong proses pengembangan Smart City yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.
8. Terlaksananya program pembangunan Smart City di Kabupaten Tangerang sesuai dengan Masterplan yang telah disusun termasuk program Quick Win dalam 1 tahun ke depan.
9. Membantu pemerintah Kabupaten Tangerang dalam tata pamong (governance) dan tata kelola (manajemen) pengembangan Smart City sehingga dapat berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan.

BAB II ANALISIS KESIAPAN KABUPATEN TANGERANG

Masterplan Tangerang Smart City adalah dokumen perencanaan operasional sehingga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025- 2026. Sebagai dokumen perencanaan operasional, maka masterplan Tangerang Smart City selaras dengan perencanaan sektoral lainnya seperti Road Map Sustainable Development Goals (SDG's), Rencana Aksi daerah Hak Asasai Manusia (RanHAM), Rencana Aksi Daerah Pencegahan Korupsi, Roadmap Smart City, Pro Poor Planning, Budgeting, and Monitoring, dan rencana aksi lain dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Masterplan Tangerang Smart city memiliki konsep 6 (enam) dimensi meliputi tata kelola birokrasi (smart governance), pemasaran daerah (smart branding), perekonomian (smart economy), ekosistem permukiman penduduk (smart living), lingkungan masyarakat (smart society), dan pemeliharaan lingkungan (smart environment).



Gambar 2.1 Dimensi Tangerang Smart City

Kerangka pikir Tangerang Smart City terdiri dari merupakan kesinambungan analisa masa depan, kesiapan daerah, dan kesenjangan atau gap yang dirangkai secara komprehensif untuk menunjukkan Smart City Readiness atau kesiapan daerah dalam mengimplementasi-kon konsep smart city. Sebagai bagian arsitektur perencanaan pembangunan maka konsep smart city menjadi bagian dari perencanaan strategis RPJMD yang memuat isu-isu strategis, kinerja utama, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan stategi serta prioritas program pembangunan. Penelaahan dari arsitektur perencanaan strategis menjadi rumusan visi Tangerang smart city yang kemudian dijabarkan dalam strategi dan rencana aksi di 6 (enam) dimensi dimana dimuat program unggulan (quick wins) dan pembagian prioritas pelaksanaan strategi dan rencana aksi pada peta jalan. Sebagai penelaahan terhadap perencanaan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Tangerang 2025-2026 maka memperhatikan Visi dan Sasaran Tangerang Smart City sebagaimana berikut:

“Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani”

Pada masa bhakti 2025-2026 mengakomodasi berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan baik dalam konstelasi internasional, nasional, regional maupun regional, mempertimbangkan prioritas program-program nasional dan kebijakan nasional meliputi pengembangan wilayah, kebijakan pembangunan lintas sektoral, maupun pembangunan inklusif yang melibatkan

proses teknokratis dan politis. Pembangunan Tangerang Smart City mengacu Visi Kabupaten Tangerang sebagai semangat untuk merangkul seluruh stakeholder pembangunan. Secara filosofis, visi Kabupaten Tangerang mengandung makna sebagai berikut :

Daya Saing (Competitive Forces)

Kemampuan/kekuatan adaptasi terhadap perubahan internal dan eksternal untuk meraih keberhasilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.

Daya Saing Daerah ; kemampuan perkonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan regional, nasional dan global.

Daya saing daerah terkait erat dengan Perkembangan Perekonomian Daerah, Keterbukaan, Sistem Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam serta Potensi Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat, Kinerja Pemerintahan dan kebijakan Pemerintah, Manajemen dan Ekonomi Makro.

Masyarakat Madani (Civil Society)

Merupakan masyarakat yang menjadikan agama (hubungan vertikal dengan Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan horizontal antar sesama manusia dan makhluk hidup lainnya) sebagai tolok ukur kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Madani menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan/ persaudaraan / kekeluargaan (egaliterianisme), penghargaan didasarkan kepada prestasi, keterbukaan (inclusivisme) dan partisipasi, adil dan demokratis, merdeka (independent) dari segala "penguasaan" manusia atas manusia lainnya, juga masyarakat yang bebas (freedom) dari pertentangan sosial yang anarkis dan destruktif.

Guna mencapai visi Kabupaten Tangerang Tahun 2023-2026 maka dirumuskan misi sebagaimana berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal.
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional.
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif.
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi dijabarkan beriku

Sinkronisasi Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kinerja Utama RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2026 dan Dimensi Smart City

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi Smart City					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
1	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan				✓	✓	
				Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan						
2	Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sektor Unggulan	Presentase Kontribusi PDRB Sektor Unggulan, PMA, Presentase Daya Saing Produk Unggulan Lokal		✓	✓			
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja				✓		
			Presentase Penduduk Miskin	Meningkatkan Cakupan Penanganan PPKS	Presentase PPKS Yang Berdaya					✓	

Sinkronisasi Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kinerja Utama RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2026 dan Dimensi Smart City

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi Smart City					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
3	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Nilai SAKIP						
					Nilai Indeks Kemandirian Fiskal						
					Opini BPK						
					Indeks Profesionalitas ASN	✓					
					Indeks SPBE						
					Indeks Pelayanan Publik					✓	

Sinkronisasi Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kinerja Utama RPD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2026 dan Dimensi Smart City

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Dimensi Smart City					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
4	Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi	Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur Yang Terpadu dan Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur						
					Presentase Realisasi Pola Pemanfaatan Ruang Sesuai RT RW						
					Rasio Luas Pemukiman, Perumahan dan Pemakaman Yang Layak	✓	✓	✓	✓		
				Meningkatkan Kualitas Hidup yang Sehat dan Tangguh Terhadap Bencana	Rasio Konektivitas Kabupaten						
					Indeks Resiko Bencana (IRBI)						

BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY* KABUPATEN TANGERANG

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. Sehingga Smart Governance di dalam dimensi Smart City merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan business process yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan. Sasaran dari Smart Governance adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan Kabupaten Tangerang yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Tentu saja peningkatan dalam melakukan perubahan pola-pola tradisional dalam tata kelola pemerintahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun adopsi teknologi adalah hal yang akan memberikan percepatan terhadap perubahan tersebut. Smart Governance harus dapat di implementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*).

Dimensi kedua dalam Smart City adalah Smart Branding, yaitu branding daerah yang pintar. Yang dimaksud dengan Smart Branding adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. Smart Branding menjadi salah satu dimensi dalam Smart City karena di dalam era informasi seperti saat ini, sebuah kota tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhan kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokal nya, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerahnya. Sehingga pada dasarnya konsep branding daerah memiliki kemiripan dengan konsep branding di dalam korporasi, hanya saja perbedaannya adalah apabila di dalam branding korporasi tujuannya adalah meningkatkan brand value perusahaan yang berujung pada meningkatnya income dan profit perusahaan, pada branding daerah, tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan brand value daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dimensi ketiga dalam Smart City adalah Smart Economy atau tata kelola perekonomian yang pintar. Smart Economy dalam Smart City dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini. Sasaran dari dimensi Smart Economy di dalam Smart City adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan financial literacy masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan less-cash society. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembangkan tiga elemen dalam Smart Economy, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan.

Smart living menjadi salah satu dimensi dalam Smart City untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah Smart City. Sasaran dari Smart Living di dalam Smart City adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.

Smart Society sebagai bagian dari Smart City merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam sebuah Smart City, interaksi antar manusia telah bergerak menuju 33 ekosistem sosio-teknis dimana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antarwarga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi. Sasaran dari Smart Society dalam Smart City adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi. Sasaran dari Smart Society tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen di dalam Smart Society, yaitu komunitas warga (community), ekosistem pembelajaran (learning), dan sistem keamanan (security).

Dimensi keenam dalam sebuah Smart City adalah Smart Environment, pengelolaan lingkungan yang pintar, dimana yang dimaksud dengan pintar adalah adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Ide dasar dari Smart Environment di dalam Smart City adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang Smart City yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya. Sasaran dari Smart Environment adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan.

Perumusan strategi Tangerang Smart City dijabarkan berdasarkan pilar dan sub pilar yang terdiri Sasaran dari 6 (enam) dimensi meliputi tata kelola birokrasi (smart governance), pemasaran daerah (smart branding), perekonomian (smart economy), ekosistem permukiman penduduk (smart living), lingkungan masyarakat (smart society), dan pemeliharaan lingkungan (smart environment). Perumusan strategi Tangerang Smart City dijabarkan sebagaimana berikut:

Smart Governance

Sub Pilar Dimensi	Sasaran	Strategi
Pelayanan Publik (Public Service)	Menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dengan berbasis NIK yang terintegrasi dengan semua jenis layanan	G.1. Pengembangan Pelayanan Publik berbasis Satu Data ketunggalan identitas dan spasial
Manajemen Birokrasi yang Efisien (Bureaucracy)	Menguatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendorong pengembangan penerapan system informasi berbasis teknologi sehingga menghasilkan Sistem Birokrasi yang simple elegan dan tepat (SILET) dan Sistem Informasi Administrasi Pengadaan (SIAP)	G.2. Pengembangan Pelayanan Publik berbasis Satu Data ketunggalan identitas dan spasial
Efisien Kebijakan Publik (public Policy)	Menghadirkan pelayanan terintegrasi untuk kebutuhan masyarakat, dunia usaha, ASN serta Aparat terkait layanan pemerintahan melalui satu kali klik dengan OGIS (One Get Information	G.3. Integrasi sistem informasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Smart Branding

Sub Pilar Dimensi	Sasaran	Strategi
Tourism Branding	Menjadikan Kabupaten Tangerang sebagai Destinasi Wisata Bisnis dan Industri Indonesia	B.1. Pengembangan Tangerang Smart Bussines and Tourism Paltform
Bussines Branding	Menghadirkan Kabupaten Tangerang sebagai Poros Investasi Dunia dengan layanan terpadu "Eretan" (efektif, responsif, efisien, transparan, dan akuntabel)	B.2. Peningkatan kemudahan, kesehderhanaan, kepastian, dan ketetapan pelayanan terpadu "Eretan"
City Appearance Branding	Mengembangkan landmark artistik dan memorable dengan citra visual berlandaskan keluhuran nilai budaya Kabupaten Tangerang	B.3. Keterpaduan pembangunan Dekorasi Kota berlandaskan keluhuran nilai budaya Kabupaten Tangerang

Smart Economy

Sub Pilar Dimensi	Sasaran	Strategi
Industri Berdaya Saing (Industry)	Membangun daya saing daerah yang didukung infrakstruktur dinamis berbasis kearifan lokal	Ec.1. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas Daerah
Kesejahteraan Rakyat (Welfare)	Meningkatkan peluang pembangunan usaha dan kesempatan kerja masyarakat berbasis transparansi dan perluasan aksesibilitas informasi	Ec.2. Peningkatan aksesibilitas dunia kerja serta penguatan pemberdayaan masyarakat secara inklusif
Transaksi Keuangan (Transaction)	Meningkatkan aksesibilitas bagi pelaku usaha didukung skema pembiayaan yang terintegrasi perbankan serta menjaga stabilitas, nilai tambah, dan perekonomian yang berkelanjutan	Ec.3. Perluasan pembiayaan usaha

Smart Living

Sub Pilar Dimensi	Sasaran	Strategi
Harmonisasi Tata Ruang (Harmony)	Mewujudkan keharmonisan pembangunan dalam pemanfaatan ruang guna menciptakan livable city atau kota layak huni	L.1. Pengendalian Pembangunan berbasis harmonisasi Penataan Ruang
Prasarana Kesehatan (Health)	Mewujudkan Green Hospital didukung pelayanan kesehatan yang inklusif	L.2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan preventif, promotif, dan kuratif

Smart Economy

Sub Pilar Dimensi	Sasaran	Strategi
Industri Berdaya Saing (Industry)	Membangun daya saing daerah yang didukung infrakstruktur dinamis berbasis kearifan lokal	Ec.1. Peningkatan infrastrktuktur dan konektivitas Daerah
Kesejahteraan Rakyat (Welfare)	Meningkatkan peluang pembangunan usaha dan kesempatan kerja masyarakat berbasis transparansi dan perluasan aksesibilitas informasi	Ec.2. Peningkatan aksesibilitas dunia kerja serta penguatan pemberdayaan masyarakat secara inklusif
Transaksi Keuangan (Transaction)	Meningkatkan aksesibilitas bagi pelaku usaha didukung skema pembiayaan yang terintegrasi perbankan serta menjaga stabilitas, nilai tambah, dan perekonomian yang berkelanjutan	Ec.3. Perluasan pembiayaan usaha

Smart Living

Sub Pilar Dimensi	Sasaran	Strategi
Harmonisasi Tata Ruang (Harmony)	Mewujudkan keharmonisan pembangunan dalam pemanfaatan ruang guna menciptakan livable city atau kota layak huni	L.1. Pengendalian Pembangunan berbasis harmonisasi Penataan Ruang
Prasarana Kesehatan (Health)	Mewujudkan Green Hospital didukung pelayanan kesehatan yang inklusif	L.2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan preventif, promotif, dan kuratif

Ketersediaan Saranan Transportasi (Mobility)	Menhadirkan transportasi publik yang ramah, nyaman dan efisien untuk menunjang konektivitas daerah	L.3. Pengembangan Tangerang Smart Mobility Intra City dengan prioritas keramahan pelayanan,kenyamanan fasilitas, dan efisensi
--	--	---

Smart Environment

Sub Pilar Dimensi	Sasaran	Strategi
Program Proteksi Lingkungan (Protection)	Menguatkan penegakan hukun dalam perlindungan lingkungan hidup	En.1. Penguatan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara terpadu
Tata Kelola Sampah dan Limbah	Meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah serta limbah rumah tangga dan industri	En.2. Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah dan limbah berbasis Reduce, Reuse, Recycle, Replace
Tata Kelola Energy	Meningkatkan efesiensi pemanfaatan energi melalui transformasi teknologi dan pengembangan sumber daya energi melalui komoditas sampah organik (waste to energy)	En.3. Pengembangan energi alternatif berbasis pengembangan sumber daya energi melalui komoditas sampah organik (waste to energy)

BAB IV
PETA JALAN SMART CITY KABUPATEN TANGERANG

Peta Jalan merupakan penjabaran timeline, baseline, indikator keberhasilan, dan target program kerja prioritas dalam (enam) dimensi Smart City meliputi tata kelola birokrasi (smart governance), pemasaran daerah (smart branding), perekonomian (smart economy), ekosistem permukiman penduduk (smart living), lingkungan masyarakat (smart society), dan pemeliharaan lingkungan (smart environment).

Smart Governance									
STRATEGI	Program/Kegiatan		Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
					Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
G.1. Pengembangan Pelayanan Publik berbasis Satu Data ketunggalan identitas dan spasial	1	Program Pendaftaran Kependudukan	Cakupan perekaman KTP-el	Persen	99,45%	99,47%	99,49%	DISDUKCAPIL	APBD
			Cakupan kepemilikan KIA	Persen	60%	70%	80%	DISDUKCAPIL	APBD
	2	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Akte Kelahiran 0-18 Tahun yang diterbitkan	Persen	99%	99,50%	99,50%	DISDUKCAPIL	APBD
	3	Pengelolaan Data Statistik Sektoral (OGIS)	Persentase statistik sektoral	Persen	73%	75%	80%	DISKOMINFO	APBD
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	100%	100%	100%	DISKOMINFO	APBD

	4	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penggunaan layanan ketebukaan daftar informasi publik	Persentase	92%	93%	94%	DISKOMINFO	APBD
		Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penyediaan layanan aplikasi	Persentase	100%	100%	100%	DISKOMINFO	APBD
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data perizinan yang diolah dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online	Persen	75	80	85	DPMPTSP	APBD
			Jumlah data perizinan yang dikelola dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online	Dokumen	4	4	4	DPMPTSP	APBD
	5	Pengembangan Database Sistem Informasi bidang kebudayaan	Database	-	1	1	1	Disporabudpar	APBD

	6	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial	Unit	174490	174494	174500	DINSOS	APBD
	7	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan, analisis, dan publikasi/diseminasi	Persen	24,95%	25,05%	25,05%	DISPERINDAG	APBD
	8	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan, analisis, dan publikasi/diseminasi	Persen	24,95	25,05	25,05	DISPERINDAG	APBD
	9	Pemetaan Kependudukan	Dokumen Profil dan Database Kependudukan	Persen	100%	100%	100%	DPPKB	APBD
	10	Fasilitasi data keluarga di Kampung KB	Jumlah Rumah Data di Kampung KB	Persen	30%	35%	40%	DPPKB	APBD

	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	Dokumen	29	29	29	DPPKB	APBD
	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	274	274	274	DPPKB	APBD
	13	Pengembangan Dashboard Satu Data Tangerang	Dashboard	√	√	√	√	Bappeda, Diskominfo	APBD
G.2. Peningkatan kebermanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan	14	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Unit	25	25	25	DISKOMINFO	APBD

	15	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		Dokumen	48	48	48	DISKOMINFO	APBD
	16	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	3	3	3	DISKOMINFO	APBD
	17	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	70	70	70	DISKOMINFO	
	18	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	70	70	70	DISKOMINFO	APBD

19	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Presentase layanan kemandan informasi	Persentase	55%	65%	75%	DISKOMINFO	APBD
20	Penyediaan Layanan kemandan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	70	70	70	DISKOMINFO	APBD
21	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	70	70	70	DISKOMINFO	APBD
22	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	DISKOMINFO	APBD

	23	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	BKPSDM	APBD
	24	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1	BKPSDM	APBD
	25	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	2	2	2	BKPSDM	APBD
	26	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	1	1	1	BKPSDM	APBD
	27	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	1	1	BKPSDM	APBD
	28	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian SKPD	Sistem Informasi	√	√	√	√	BKPSDM	APBD

29	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Pengembangan sistem informasi e-SLHD	Sistem Informasi	Persen	50%	70%	100%	DLHK	APBD
30	Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase sistem informasi bidang tata ruang	Persen	0,4	0,4	0,8	DTRB	APBD
31	Pengembangan sistem Informasi	Sistem Informasi	√	√	√	√	Bappeda, Diskominfo	APBD
32	Grand Database berbasis ketunggalan Identitas Tangerang Satu Data	Persentase Data sektoral yang terintegrasi	Persen	40%	70%	100%	Bappeda, Diskominfo	APBD
33	Perumusan dan Review Grand Design bisnis proses pembangunan Daerah	Grand Design	√	√	√	√	Bappeda, Setda	APBD

	34	Pengembangan sistem informasi Tangerang Integrated Development	Sistem Informasi	√	√	√	√	Bappeda, Diskominfo, Setda, Pemerintahan Umum	APBD
	35	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan (perencanaan, penganggaran, pelaporan, pengendalian dan pengawasan) (tatakelola pemerintah kabupaten dan desa)	Sistem Informasi	√	√	√	√	Bappeda, BPKAD, Inspektorat, Setda Pemerintahan Umum	APBD
	36	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	dokumen	1	1	1	Bappeda	APBD

	37	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan sistem informasi penunjang pelayanan kesehatan	Tahun pengembangan sistem Informasi	Persen	40%	60&	80%	DINKES	APBD
G.3. Integrasi sistem informasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	38	Sub Kegiatan Pemeliharaan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan Informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	1	1	DISNAKER	APBD
	39	Pengembangan pelayanan informasi publik dan pengaduan pelayanan publik	Persentase Data Sektoral dan Statistik yang dipublikasi	Persen	>50%	>50%	100%	Bappeda, Diskominfo, BPS	APBD

Smart Branding									
STRATEGI	Program/Kegiatan		Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
					Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
B.1. Pengembangan Tangerang Smart Bussines and Tourism Paltform	1	Pemanfaatan teknologi Informasi untuk promosi pariwisata	Pemutakhiran Sistem Informasi Destinasi wisata Tangerang (SIDEWITA)	Titik Destinasi	15	15	15	Disporabudpar, Diskominfo	APBD
	2	Pengembangan sistem informasi Tangerang e-Tourism	Sistem Informasi	-	√	√	√	Disporabudpar, Diskominfo	APBD
	3	Festival Kesenian dan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival kesenian dan kebudayaan per tahun	Jumlah	14	16	18	Disporabudpar	APBD
	4	Pernyusunan rencana induk pariwisata daerah	Rencana Induk Pariwisata Daerah	Dokumen	√	√	√	Disporabudpar	APBD

	5	Pengembangan forum Tangerang Investment Lounge sebagai sarana pertemuan Bupati, perangkat daerah, pelaku usaha atau investor, akademisi, dan tokoh masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Invesment Lounger per tahun	Jumlah	12	12	12	DPMPTSP	APBD
	6	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	dokumen	1	1	1	Bappeda	APBD

B.2. Peningkatan kemudahan,	7	Perumusan regulasi pendukung pelayanan publik dalam rangka tata laksana pelayanan khusus perizinan dalam pelaksanaan Online Single Submission (OSS)	Regulasi	-	√	√	√	DPMPTSP	APBD
	8	Pembangunan infrastruktur pendukung Online Single Submission	Persentase pemenuhan infrastruktur OSN	Persen	>50%	>50%	1	DPMPTSP	APBD
	9	Pengembangan Portal Investasi Tangerang	Sistem Informasi	-	√	-	-	DPMPTSP	APBD
	10	Pengembangan Perijzinan Online SIPINTER 2	Sistem Informasi	-	√	-	-	DPMPTSP	APBD

	11	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data perizinan yang diolah dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online	Persen	75	80	85	DPMPTSP	APBD
B.3. Keterpaduan pembangunan Dekorasi Kota berlandaskan keluhuran nilai budaya Kabupaten Tangerang	12	Penataan Potensi Destinasi Pariwisata Kab. Tangerang	Jumlah Penataan Destinasi Wisata per tahun	Lokasi	1	1	1	Disporabudpar	APBD
	13	Pengembangan Potensi Kawasan Pariwisata Unggulan	Jumlah pengembangan potensi kawasan pariwisata unggulan per tahun	Lokasi	1	2	2	Disporabudpar	APBD
	14	Pengembangan Potensi Kawasan Pariwisata Strategis	Jumlah pengembangan potensi kawasan pariwisata unggulan per tahun	Lokasi	1	2	2	Disporabudpar	APBD

	15	Pelaksanaan koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata dengan Lembaga/dunia Usaha	Pembangunan Obyek Pariwisata	-	√	√	√	Disporabudpar	APBD
	16	Penyelenggaraan Penataan Desa	jumlah rekomendasi penataan desa	Desa	1	1	1	DPMPD	APBD
	17	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	1	1	1	DPMPD	APBD
	18	Peningkatan Desa Untuk Menuju Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Persen	10,16%	14,23%	18,29%	DPMPD	APBD

Smart Economy									
STRATEGI	Program/Kegiatan		Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
					Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
Ec.1. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas Daerah	1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten	%	3,38%	4,89%	6%	DBMSDA	APBD
	2	Peningkatan Kemantapan infrastruktur jalan Kabupaten, jalan poros Desa, Jalan Desa.	Presentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	Persen	>90%	>93%	>95%	DBMSDA	APBD
	3	kebutuhan air baku industri dan tenaga listrik kawasan industri terintegrasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Baku	Persen	>65%	>80%	100%	DBMSDA	APBD
	4	Pengembangan Pendataan Jalan dan Jembatan	Rata-rata Persentase pendataan kondisi Jalan di Kecamatan	Persen	>90%	93,00%	95,00%	DBMSDA	APBD
	5	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Drainase	Prosentase Infrastruktur Drainase dalam Kondisi Baik	% Panjang Drainase	11,93%	12,43%	12,93%	DBMSDA	APBD

Ec.2. Peningkatan aksesibilitas dunia kerja serta penguatan pemberdayaan masyarakat secara inklusif	6	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Lowongan Kerja yang Terdaftar	Persen	96%	96.9%	96.9%	DISNAKER	APBD
	7	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya Informasi pasar Kerja	Lowongan	20000	20000	20000	DISNAKER	APBD
	8	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karier hub)	Orang	500	500	500	DISNAKER	APBD
	9	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	500	500	500	DISNAKER	APBD
	10	Pengembangan Sistem Informasi Perusahaan (SILPEH) berbasis web dan mobile	Sistem Informasi	√	√	√	√	Disperindag	APBD

11	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Koperasi berkualitas	persen	17,86%	17,86%	17,86%	Dinas KUKM	APBD
12	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita Pertahun sesuai dengan angka kebutuhan gizi	Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan	Persen	80%	85%	90%	DPKP	APBD
13	Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	cadangan pangan Pemerintah Daerah	Persen	16.9%	23.03%	29.15%	DPKP	APBD
14	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Laju Peningkatan Jumlah Produksi Pertanian	Persen	1%	1%	1%	DPKP	APBD
15	Pengembangan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produk olahan perikanan yang dipasarkan dalam e-commerce	Jumlah	>300	>350	>400	DISKAN,Dinas KUKM,Diskominfo	APBD

	16	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan yang Diberdayakan	Orang	180	180	180	DISKAN	APBD
	17	Program pengelolaan perikanan tangkap pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	Kelompok	3	3	3	DISKAN	APBD
	18	Program pengelolaan perikanan tangkap pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	Orang	150	150	150	DISKAN	APBD
Ec.3. Perluasan pembiayaan usaha	19	Program Pelayanan Penanaman Modal	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	Angka	90,5	91	91,5	DPMPTSP	APBD

			Perizinan Investasi						
20	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan minat investasi	Persen	25%	25%	25%	DPMPTSP	APBD	
21	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase Usaha Mikro yang diberdayakan	Persen	2,8	3,1	3,5	Dinas Koperasi dan UsahaMikro	APBD	
22	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB	Persen	Koperasi : 2,14	Koperasi : 2,14	Koperasi : 2,14	Dinas Koperasi dan UsahaMikro	APBD	
				Usaha Mikro : 5,95	Usaha Mikro : 5,95	Usaha Mikro : 5,95	Dinas Koperasi dan UsahaMikro	APBD	
		Prosentase Usaha Mikro yang Dipromosikan	Persen	Usaha Mikro : 1,4	Usaha Mikro : 1,6	Usaha Mikro : 1,8	Dinas Koperasi dan UsahaMikro	APBD	

Smart Living									
STRATEGI	Program/Kegiatan		Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
					Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
L.1. Pengendalian Pembangunan berbasis harmonisasi Penataan Ruang	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan RTBL (Target 1 Dokumen/Tahun)	Persen	0,6	0,8	1	DTRB	APBD
	2	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Ruang yang Terselenggara	Dokumen	0,37	0,46	0,67	DTRB	APBD
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Sinkronisasi RDTR di Kabupaten Tangerang	Persen	0,2143	0,2857	0,4286	DTRB	APBD

	4	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Terselenggara	Persen	0,58	0,79	1	DTRB	APBD
	5	Integrasi layer peta sektoral dari tiap-tiap OPD ke dalam WebSIG yang dikelola DTRB	Persentase Informasi Spasial sektoral yang dintgerasikan di webSIG	Persen	>75%	>80%	>100%	DTRB,Bappeda	APBD
	6	Pengembangan Sistem Informasi pengendalian tata ruang berbasis Geographic Information System (GIS) yang terintegrasi dengan Tangerang Satu Data	Sistem Informasi	√	√	√	√		APBD
L.2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	7	Pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional (Universal	Persentase UHC	Persen	100%	100%	100%	DINKES	APBD

preventif, promotif, dan kuratif		Health Coverage)							
	8	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100%	100%	100%	DINKES	APBD
	9	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	2	2	2	DINKES	APBD
L.3. Pengembangan Tangerang Smart Mobility	10	Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	6	6	6	DISHUB	APBD

Intra City dengan prioritas keramahan pelayanan, kenyamanan fasilitas, dan efisiensi	11	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelayanan Angkutan Massal	Unit	32	34	38	DISHUB	APBD
	12	Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit	434	444	431	DISHUB	APBD
	13	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Unit	500	600	700	DISHUB	APBD

	14	Peningkatan kelancaran mobilitas penduduk melalui pengembangan Automatic Traffic Control System (ATCS) di titik kerawanan	Persentase Persimpangan dengan ATCS	Persen	>50%	>50%	>50%	Dishub, Bappeda, Diskominfo	APBD
--	----	---	-------------------------------------	--------	------	------	------	-----------------------------	------

Smart Society									
STRATEGI	Program/Kegiatan		Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
					Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
S.1. Peningkatan kemitraan kerjasama lintas sektoral dalam membangun komunitas Cerdas	1	Pembinaan Keagamaan	Pembinaan guru ngaji melalui media digital	Orang	3014	3014	3014	Setda Kesra	APBD
	2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Pengembangan Kapasitas Dayasaing Keolahragaan	Persen	100%	100%	100%	DISPORAB UDPAR	APBD
	3	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan dan Pengembang	Persen	100%	100%	100%	DISPORAB UDPAR	APBD
	4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kebudayaan	Orang	30	30	30		APBD

	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	14,29%	14,29 %	14,29%	BKESBAN GPOL	
	6	Terlaksananya pembinaan IMP dan Organisasi lainnya tentang Bangga Kencana	Jumlah kelompok IMP yang dibina	Kelompok	274	274	274	DPPKB	APBD
	7	Pendayagunaan PKB/ PLKB dalam Program Bangga Kencana	Jumlah peserta PKB/PLKB yang didayagunakan	Orang	58	58	58	DPPKB	APBD
	8	Terlaksananya pembinaan Terpadu Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)	Jumlah Kampung KB yang dibentuk dan dibina	Kp. KB	114	134	154	DPPKB	APBD
S.2. Pengembangan layanan pendidikan	9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	Persen	100%	100%	100%	DISDIK	APBD

terintegrasi berbasis infrastruktur dan suprastruktur pendidikan	10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	Persen	100%	100%	100%	DISDIK	APBD
	11	Pengelolaan Pendidikan PAUD	Tersedianya Jumlah PAUD yang dikelola	Persen	100%	100%	100%	DISDIK	APBD
	12	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Jumlah Non Formal/ Kesetaraan yang dikelola	Persen	100%	100%	100%	DISDIK	APBD
	13	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tercapainya Peserta Didik yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Satuan Pendidikan	10.000	10.000	10.000	DISDIK	APBD
	14	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pengelolaan perpustakaan	Persen	100%	100%	100%	DINPERPUSIP	APBD

15	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan	6	6	6	DINPERPUSIP	APBD
16	Kegiatan Sosialisasi Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pemenuhan pembudayaan gemar membaca	Persen	100%	100%	100%	DINPERPUSIP	APBD
17	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus	Lokus	200	210	220	DINPERPUSIP	APBD
18	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian pemenuhan pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota	Persen	100%	100%	100%	DINPERPUSIP	APBD

	19	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian pemenuhan pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota	Persen	100%	100%	100%	DINPERPUSIP	APBD
	20	Sub Kegiatan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	Arsip	10000	10000	10000	DINPERPUSIP	APBD
	21	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	63	63	63	DINPERPUSIP	APBD

	22	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	40	40	40		APBD
	23	Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya	Perpustakaan	8	8	8		APBD
	24	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	dokumen	1	1	1	Bappeda	APBD

S.3. Pengembangan Layanan Tangerang Call Center	25	Pengembangan Tangerang Inclusive Call Center	Sistem Informasi dan Operasional	√				Diskominfo, BPBD, Dinkes, Satpol PP, Kepolisian	APBD
	26	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan sistem informasi penunjang pelayanan kesehatan	Tahun pengembangan sistem Informasi	-	√	-	-	DINKES	APBD
	27	Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Prosentase keberhasilan rujukan antar RS melalui call center 119	Persen	80%	85%	100%	DINKES	APBD
			integrasi SPGDT dengan Sisrute (Sistem Informasi rujukan terpadu)	Persen	40%	60%	80%	DINKES	APBD

Smart Environment									
STRATEGI	Program/Kegiatan		Indikator Keberhasilan	Satuan	Target			Leading Sector	Sumber Dana
					Baseline 2024	Target 2025	Target 2026		
En.1. Pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara terpadu	1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen Rencana	Dokumen	Verifikasi KLHK		Perda RPPLH	DLHK	APBD
	2	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana	Dokumen	Verifikasi KLHK		Perda RPPLH	DLHK	APBD
	3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Presentase Peningkatan Kualitas Lingkungan (Udara/Air)	Persen	50/10	50/10	50/10	DLHK	APBD
	4	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota	Meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	58/71	58,5/72	59/73	DLHK	APBD

	5	Program Pengelolaan SDA	Persentase Infrastruktur Sungai dan Pembuang dalam Kondisi Baik	%	70,20%	77,20%	84,20%	DBMSDA	APBD
	6	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	25	25	25	DBMSDA	APBD
	7	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Dokumen	3	3	2	DLHK	APBD

En.2. Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah dan limbah berbasis Reduce, Reuse, Recycle, Replace	8	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	2	DLHK	APBD
	9	Program Pengelolaan Persampahan	Presentase Pengelolaan Sampah	Persen	60%	62%	64%	DLHK	APBD
	10	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Kelompok	10000%	12000%	15000%	DLHK	APBD

	11	Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Presentase tindak lanjut pengaduan, pengelolaan limbah B3	Persen	100%	100%	100%	DLHK	APBD
	12	Penyimpanan sementara limbah B3	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan pihak swasta	Laporan	60	80	100	DLHK	APBD
En.3.Pengembangan energi alternatif berbasis pengembangan sumber daya energi melalui komoditas sampah organik (wasteto energy)	13	Pelaksanaan gerakan hemat energi di lingkup perkantoran pemerintah, swasta, sekolah, dan masyarakat	Jumlah Gerakan Hemat energi Per Tahun	-	4	4	4	DLHK	APBD
	14	Pengembangan Smart PJU	Jumlah titik pengembangan smart PJU	Unit	>20	>50	>100	Dishub	APBD

BAB V PENUTUP

Buku *Master Plan Smart City* Kabupaten Tangerang ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Smart City di Kabupaten Tangerang dalam rangka Gerakan Menuju 100 Smart City di Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan kolaborasi bersama Kementerian dan Lembaga Pemerintah Republik Indonesia, serta peran aktif berbagai pihak lain.

Buku *Master Plan Smart City* Kabupaten Tangerang ini disusun dengan memperhatikan peraturan perundangan yang masih berlaku hingga buku ini disusun. Buku *Master Plan Smart City* ini diharapkan dapat menjadi pemandu arah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program smart city di Daerah, juga sebagai pemandu bagi seluruh elemen masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pelaksanaan *smart city* di Daerah. Dalam pelaksanaannya, sangat dimungkinkan adanya revisi dari tahun ke tahun oleh Dewan *Smart City* sesuai dengan perkembangan situasi dan teknologi. Hal tersebut diharapkan dapat memperkaya proses pengembangan *smart city* di Daerah. Segala masukan dan informasi dari masyarakat sangat kami harapkan, demi untuk memperbaiki Buku *Master Plan Smart City* Kabupaten Tangerang ini dari tahun ke tahun.

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID